



# *Jurnal* **Sejarah**

*Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*

## **Perjuangan Yang Tak Kunjung Selesai**

**Koesnadi Hardjasoemantri**

**Taufik Abdullah**

**David Reeve**

**Putra Agung**

**Adrian B. Lopian**

**Andrik Purwasito**

**Gusti Asnan**

**Nasrul Hamdani**

**Emil W. Aulia**

**Andi Suwirta**

**In Memoriam**

Diterbitkan oleh:

**YAYASAN MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA**

Bekerjasama dengan

**YAYASAN OBOR INDONESIA**



# JURNAL SEJARAH

**BADAN PELAKSANA PENERBITAN JURNAL SEJARAH**

**2005 - 2009**

## **EDITOR SENIOR**

1. A.B Lopian
2. Anhar Gonggong
3. Djoko Suryo
4. Mestika Zed
5. Mukhlis PaEni
6. Nina Herlina Lubis
7. R.Z. Leirissa
8. Taufik Abdullah

## **DEWAN REDAKSI**

- Ketua : Toeti Kakiaailatu  
Anggota :
  1. Azyumardi Azra
  2. Susanto Zuhdi
  3. Moh. Hisyam
  4. M. Iskandar
  5. Erwiza Erman
  6. Asvi Warman Adam

## **REDAKTUR PELAKSANA**

: M. Dien Madjid

## **PELAKSANA TATA USAHA**

- Ketua : Sri Sutjiatiningsih  
Anggota :
  1. Agus Santoso
  2. Restu Gunawan
  3. Amieka Hasraf
  4. Suminarsih

---

**ALAMAT** : d.a. Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya,  
Cilandak Timur, Jakarta 12560, Telp. (021) 7805851, Fax. 7805812

---

Editor menerima naskah para ahli atau penulis manapun meminati bidang sejarah. Naskah dalam bentuk asli dan belum pernah diterbitkan; ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris; panjang naskah antara 15-20 halaman kuarto (termasuk daftar acuan) disertai abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris sepanjang 20 kata, spasi rangkap. Editor berhak menyunting naskah tanpa bermaksud mengubah isinya. Ke-terangan tentang cara pengiriman tulisan dapat dilihat pada halaman kulit belakang dalam.


# JURNAL SEJARAH

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi		v
Koesnadi Hardjasoemantri	<b>Peran Pemuda Pelajar Indonesia dalam Perjuangan Bangsa</b>	1
Taufik Abdullah	<b>PDRI, Kesadaran Sejarah dan Masa Kini</b>	13
David Reeve	<b>Ong Hok Ham, a Historian's Tastes</b>	28
Putra Agung	<b>Lahir dan Bubarnya NIT</b>	32
Adrian B. Lopian	<b>Pepera di Irian Jaya versi Belanda</b>	49
Andrik Purwasito	<b>Menggugat Historiografi Indonesia</b>	55
Gusti Asnan	<b>PRRI, Penulisan Sejarah dan Kekerasan</b>	66
Nasrul Hamdani	<b>Aktor &amp; Aksi Kekerasan Gaya Medan</b>	85
Emil W. Aulia	<b>Van den Brand 'Nog Millioenen Uit Deli'</b>	96
Andi Suwirta	<b>'Suara Merdeka' di Tasik</b>	102
In Memoriam	<b>Ramadhan K.H. (Toeti Kakailatu)</b>	111
	<b>Teuku Ibrahim Alfian (Djoko Suryo)</b>	114
	<b>Ayatrohaedi (Moh. Hisyam)</b>	117
	<b>Hasan Muarif Ambary (N. K. Lubis)</b>	119
	<b>Edi K. Jati (N.K. Lubis)</b>	120

# JURNAL SEJARAH

## PENGANTAR REDAKSI

 *Jurnal Sejarah* nomor ini seyogyanya terbit bersamaan dengan kongres MSI November lalu. Tetapi karena kesukaran teknis yang tak bisa kami hindarkan, baru bisa selesai cetak di akhir tahun 2006. Dengan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sehubungan dengan datangnya tahun 2007, bersama ini kami ucapkan Selamat Tahun Baru. Semoga tahun-tahun mendatang membawa perdamaian dan keselamatan yang lebih baik. Amin

Tema *Jurnal* nomor ini adalah ‘perjuangan yang tak kunjung selesai.’ Karena itu daftar isi *Jurnal* diawali oleh tulisan Kusnadi Hardjasoemantri dan Taufik Abdullah. Keduanya menggambarkan bagaimana generasi pertama, yaitu mereka yang lahir pada 1925 hingga 1945, disebut Generasi Kemerdekaan. Generasi ini bersifat sangat patriotik dan memiliki nasionalisme kuat. Adapun generasi kedua adalah mereka yang lahir pada 1950 – 1980, ‘generasi sekolahan,’ memburu apa yang namanya profesionalisme yang menghasilkan Generasi Pekerja yang menjadi cikal bakal masyarakat menengah di Indonesia saat ini. Sayangnya, aspirasi politik dan ideologinya tidak sekuat generasi sebelumnya. Sedangkan generasi baru adalah mereka yang lahir pada 1980 – 2000, yang di Amerika Serikat disebut sebagai generasi *Millenials*. Baik di Barat, di Asia bahkan di Indonesia, generasi ini lebih terfokus pada masalah globalisasi dan .... MTV. Banyak yang menganggap nasionalisme adalah hal yang kuno, karena sekarang era globalisasi, suatu mekanisme pasar yang melibatkan seluruh dunia. Kepedulian baru bagi generasi *Millenials* ini terpusat pada masalah-masalah kemiskinan, HIV, lingkungan dan terorisme. Karena itu untuk merangkum ketiga generasi ini, Koesnadi menyatakan perlunya 3-K, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan. Sebab, demikian Taufik Abdullah, keutuhan ingatan akan rentetan peristiwa adalah penunjang yang kuat bagi masa depan bangsa.

Karena ‘perjuangan yang tak kunjung selesai’ ini kami hidangkan pula sejarah ‘masa lalu’ dari Putra Agung, tentang ‘lahir dan bubarinya NIT.’ Tinjauan Buku tentang Pepera di Irian Jaya ditulis oleh Adrian B. Lopian. Irian Jaya dengan gunungnya bersalju abadi, semula dikuasai orang Papua. Mereka membangun nilai-nilai kultural, merumuskan kearifan lokal dan merajut impian bahwa gunung -- bukan sekedar ongkongan material untuk kebutuhan komersial -- akan membawa kemakmuran. Ketika Pepera tiba mereka memutuskan bergabung dengan NKRI, dengan harapan Pemerintah Indonesia mampu membantu mewujudkan impian mereka. Apakah impian mereka telah terwujud?!

Gusti Asnan telah menulis dalam perspektif historiografis tentang PRRI. Sejak berakhirnya Orde Baru, studi tentang timbulnya PRRI adalah kejadian historis yang semakin menarik. Sedangkan tulisan Nasrul Hamdani tentang 'Aktor dan Aksi Kekerasan Gaya Medan'. Karena Hamdani juga menyinggung riwayat *De Deli Maatschappij*, kami lampirkan pula cuplikan dari novel karya van den Brand, pengacara yang menentang *poenale sanctie*. Den Brand akhirnya dibenci oleh bangsanya sendiri, dan sehari sebelum kapalnya tiba di Belawan untuk membawanya pulang ke Belanda, van den Brand meninggal. Beberapa tahun kemudian, sekitar akhir 1800-an, *poenale sanctie* dan perbudakan dihapus. Kisah kehidupan Jumini, para kuli kontrak dan laporan van den Brand menjadi pertentangan antara moralitas di satu pihak dan sejarah di pihak lainnya. Cerita kuli kontrak banyak dibumbui oleh ironi yang segar, ironi yang hanya menyangkut pada peristiwa, bukan makna, sehingga tidak mempunyai efek metaforis.

Selain itu, ada dua penyumbang baru dalam nomor ini. Andrik Purwasito yang mendapat pendidikan doktor di EHESS, Paris. Purwasito melihat gejala *l'histoire immediate* dan yang terjadi adalah apatisme terhadap masa depan yang tak jelas. Dia menawarkan pendekatan multikultural adalah cara pandang ke depan untuk mempersatu republik ini. Bukankah terlalu banyak perpecahan yang terjadi pada bangsa ini, memungkinkan merambahnya hegemoni neo liberal asing masuk ke Indonesia? Sedangkan penyumbang tulisan yang lain, David Reeve, nama yang tak asing lagi bagi banyak sejarawan, khususnya di Jakarta dan Yogya. Reeve kini tengah merampungkan biografi sejarawan yang nyentrik tapi pintar, hedonis dan *semau gue*. Ong Hok Ham, yang kini sudah tahunan lamanya menderita *stroke*.

In Memoriam adalah rubrik yang menyedihkan. Lima sejarawan kita telah berakhir dengan kematian yang mulus. Kehidupan mereka telah terbang ke tempat dari mana tak seorang pun dapat memanggilnya kembali. Nama-nama mereka kami urutkan dari yang berusia paling tua ke usia termuda


Yang terakhir kali ialah tulisan Andi Suwirta yang mengisahkan tentang surat kabar di masa revolusi di kota kecil, Tasik. Jangan bayangkan surat kabar dewasa ini yang isinya berlembar-lembar, gambar berwarna dengan wartawan yang paling tidak naik motor (untuk wartawan junior). '*Suara Merdeka*' hanya empat halaman tabloid dan bukan dicetak, melainkan distensil. Meski sederhana sekali, koran ini sangat dicari Belanda (baca: Nica), karena dari koran yang sederhana ini ada jiwa perjuangan yang besar (tk).

--ooOoo--

*Koesnadi Hardjasoemantri*<sup>1</sup>

## PERAN PEMUDA PELAJAR INDONESIA DALAM PERJUANGAN BANGSA ' Sebuah Refleksi dan Harapan '

### PENDAHULUAN

 orak perjuangan masing-masing pelajar pejuang ditentukan oleh tantangan yang dihadapi di dalam zamannya.

Generasi muda 1908 menghadapi tantangan untuk menggalang persatuan bangsa melalui didirikannya Boedi Oetomo, karena perjuangan yang dilakukan di masing-masing daerah ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan.

Generasi muda 1928 memberi jiwa kepada perjuangan dengan mencetuskan Sumpah Pemuda yang menyatakan tekad bulat generasi muda mengenai satunya Tanah Air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini merupakan perwujudan dari Manifesto Politik yang dicetuskan oleh PPI Nederland di Leiden pada tahun 1925 yang merupakan komitmen pemuda Indonesia terhadap perjuangan nasionalisme Indonesia.

Generasi muda 1945 memberi dorongan kepada dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Generasi muda 1945 mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan itu dalam kesatuan-kesatuan bersenjata, yaitu Tentara pelajar (TP) dengan berbagai kesatuannya dan Coprs Mahasiswa (CM). dalam rangka mengisi kemerdekaan, generasi muda 1945 telah membantu pemerataan pendidikan menengah di luar Jawa melalui Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) dalam kurun waktu 1951-1962 yang pada gilirannya telah mempengaruhi pula pemerataan pendidikan tinggi di luar Jawa.

Generasi muda 1966, dengan KAPPI, KAMI, dan KASI-nya turut mematahkan dominasi PKI dan melahirkan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan konsisten.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Gurubesar (Emeritus) Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum UGM. Sejak muda, beliau pernah menjadi anggota API (1945), Ketua IPPI Jakarta (1946) dan berbagai jabatan lainnya, khususnya organisasi pergerakan/perjuangan di republik ini. Tetapi bidang pendidikan rupanya menjadi kegemarannya yang paling utama. Beliau pernah menjabat Rektor UGM (1986-1990) dan mungkin satu-satunya rektor yang turut serta berdemonstrasi bersama mahasiswa, sementara yang lain "bertiarap" di kala pemerintahan Suharto. Kemudian menjadi Ketua MWA UGM (2002 — 2004). Tokoh yang sudah berusia 10 windu mi kini menjadi Ketua Dewan Paripurna Daerah DIY Legiun Veteran Republik Indonesia.

Generasi muda 1998 melancarkan Gerakan Reformasi yang merombak Orde Baru yang ternyata bersifat sangat sentralistik, kurang membuka partisipasi masyarakat, koruptif dan kurang demokratis.

Generasi muda 1998 menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit dibanding dengan generasi-generasi muda sebelumnya. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara yang sedang membangun di tengah-tengah arus globalisasi, sungguh tidaklah mudah. Dalam pada itu, pelaksanaan otonomi daerah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tantangan tersebut harus dihadapi dengan kemampuan profesional yang tinggi, dilandasi cinta Tanah Air yang mendalam serta iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Generasi muda yang akan mengemban tugas kepemimpinan, perlu memahami sikap keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan.

## PERJUANGAN PELAJAR PASCA PROKLAMASI

### 1. Kurun Waktu 1945-1949

Perjuangan pemuda pelajar Generasi Muda 1945 dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan saham yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kegiatan merebut kemerdekaan yang dilaksanakan oleh pemuda pelajar sesungguhnya telah dimulai pada waktu zaman Jepang dengan bentuk perjuangan yang terselubung (di bawah tanah).

Pada waktu itu mahasiswa Jakarta Ika Daigaku (Fakultas kedokteran di Jakarta) yang bermarkas di Asrama Mahasiswa Prapatan 10, telah menetapkan ideology yang disebut dengan *Reine Jugend ideologie*, cita-cita Pemuda Murni, suatu ideology tanpa pamrih. Ideology ini telah meresap dalam kalbu masing-masing anggota "Masyarakat Prapatan 10", suatu kelompok muda yang sangat unik sifatnya. Mereka adalah bagian yang murni dari rakyat yang sepi ing pamrih dan rela kebahagiaan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan dimilikinya disiplin yang tinggi serta *Reine Jugend Ideologie*, mereka menjelma menjadi kelompok sebagai kesatuan ampuh yang memiliki kepercayaan teguh atas kemampuan diri sendiri untuk turut menggerakkan roda revolusi, memelopori dan membakar semangat rakyat untuk berjuang.

Kelompok inilah yang mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia "sekarang juga, segera setelah mendengar Jepang kalah."

Kelompok inilah pula yang sibuk dan ikut serta menyusun dan membina kelompok-kelompok pemuda diseluruh kota Jakarta segera setelah kemerdekaan diproklamasikan, mengambil alih gedung-gedung penting

beserta peralatannya dan alat angkutan, melaksanakan aksi tulisan/coret-coret dijalanan, tembok-tembok, angkutan umum dan lain sebagainya, ikut serta dalam penyusunan aparatur Negara seperti Komite Nasional Indonesia Pusat dan Badan Keamanan Negara (cikal-bakal Tentara Nasional Indonesia) dan sebagainya. Perjuangan mereka dibantu oleh oara pelajar SMT Jakarta yang tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia (API).

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pelajar sepakat untuk mengadakan Kongres Pelajar Indonesia yang diadakan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 September 1945 di Yogyakarta.

Kongres Pelajar I dibuka pada tanggal 15 September 1945 dengan rapat raksasa di tanah lapang Kridosono, yang dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, Pemimpin-pemimpin Komite Nasional Daerah, dan 8000 pemuda-pemuda pelajar Sekolah Menengah Yogya serta para utusan dari kota-kota seluruh Jawa dan Madura.

Pada tanggal 28 September 1945 Kongres Pelajar ditutup, dilanjutkan dengan rapat raksasa di Stadion Kridosono, dimana dibacakan mosi dan keputusan Kongres. Mosi yang dibacakan berbunyi sebagai berikut :  
**Mengingat :**

- a. Kedudukan Negara Indonesia pada masa sekarang.
- b. Bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan oleh segala lapisan masyarakat Indonesia.
- c. Bahwa pelajar-pelajar Sekolah Lanjutan merupakan satu lapisan besar dalam masyarakat Indonesia.

**Menimbang :**

Bahwa pelajar-pelajar Sekolah-sekolah Lanjutan sebagai pemuda Indonesia berkewajiban berjuang bersama-sama dengan segala lapisan masyarakat untuk mempertahankan Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia.

**Memutuskan :**

1. Kami adalah pelajar Negara Republik Indonesia
2. Menolak menjadi pelajar pemerintah lain daripada pemerintah Republik Indonesia
3. Menyediakan tenaga, jiwa dan raga untuk kepentingan kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia.

Keputusan ini kemudian diangkat sebagai "Ikrrar Pelajar Republik Indonesia"

Kongres Pelajar I telah membentuk pula Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) sebagai wadah perjuangan pelajar Indonesia. Meskipun baru saja terwujud adanya IPI,

namun dalam waktu sangat singkat masyarakat bangsa Indonesia sudah mengenal IPI sebagai organisasi perjuangan pelajar. Mulai dalam urusan sosial yang bekerja di belakang garis peperangan sampai ke medan pertempuran, di tengah-tengah kancan letusan mortar dan meriam, di situ terdapat anggota IPI yang sanggup mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Tanah Air tercinta.

Kongres Pelajar ke II diadakan pada tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 1946 di Madiun. Sebagai hasil dari Kongres ke II ini diadakan Bagian Pertahanan dalam Pengurusan Besar IPI, sebagai realisasi Ikrar Pelajar tanggal 28 September 1945. dalam pada itu, pasukan pelajar seperti TP dan TRIP timbul mula-mula secara lokal dan baru kemudian dihimpun oleh Bagian Pertahanan Pelajar Pusat/Markas Besar TP Pusat di Yogyakarta dalam kurun waktu 1 Juli 1946 sampai dengan 28 Februari 1948.

Pasukan-pasukan pelajar meliputi Bat. 200 di Solo, Bat. 300 di Yogyakarta, Bat. 500 (TRIP) di Jawa Timur, Bat. 400 (Corps Palajar Siliwangi) di Jawa Barat, dan kemudian menyusul Bat. 500 di Banyumas dan Pekalongan, yang merupakan peningkatan dari TP Rogojembangan.

Dalam kurun waktu 1 Maret 1948 sampai dengan 31 Oktober 1948, pasukan-pasukan pelajar dijadikan Korps Reserve Umum Brigade "W" (KRUW). Dalam kurun waktu 1 November 1948 sampai dengan 31 Maret 1951 pasukan pelajar menjadi Tentara Nasional Indonesia Brigade XVII, yang terdiri atas Detasemen I : Jawa Timur, Detasemen II : Surakarta, Detasemen III : DIY, Kedu, Magelang, Banyumas, dan Detasemen IV : Jawa Barat.

Pada tanggal 1 April 1951 dilaksanakan Demobilisasi anggota Brigade XVII yang diatur oleh Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar (KUDP). Para anggota Brigade XVII dapat memilih antara (1) tetap di kalangan Angkatan Bersenjata atau (2) melanjutkan sekolah. Bagi mereka yang akan melanjutkan sekolah disediakan Ikatan Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949.

Pada tanggal 2 Februari 1948 diadakan fusi antara IPI yang beranggotakan pelajar dan Sarekat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang beranggotakan mahasiswa, menjadi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). Di dalam perkembangan IPPI di tahun-tahun berikutnya telah terjadi pertarungan yang sengit antara pihak yang tetap mempertahankan kemurnian organisasi pemuda pelajar dan pihak yang ingin membawa IPPI ke kubu komunis. Akhirnya perpecahan dalam tubuh IPPI tidak dapat direlakan lagi, sehingga timbullah IPPI Pancasila dan IPPI yang dipengaruhi PKI, yaitu IPPI kiri. Dengan adanya peristiwa G30S, IPPI kiri sudah tidak lagi berfungsi.

## **2. Kurun Waktu 1950-1962**

IPPI bersama dengan perserikatan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan Corps Mahasiswa (CM) mengajukan surat bersama kepada Menteri PP dan K pada tanggal 30 Januari 1950, agar para mahasiswa dikerahkan untuk menjadi pengajar agar menampung kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan pengajaran setelah periode perjuangan fisik 1945-1949.

Setelah diadakan pembicaraan dengan Kementerian PP dan K tentang saran ketiga organisasi mahasiswa tersebut di atas, maka pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan SK Menteri PP dan K ditetapkan Peraturan Dasar Proyek Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM).

Angkatan Pertama PTM berangkat untuk tahun ajaran 1951-1952 ke luar Jawa dengan delapan mahasiswa UGM sebagai pesertanya. Selama 12 Tahun Proyek PTM berjalan, telah dikerahkan 12 angkatan dengan 1359 mahasiswa. Perincian 97 tempat di luar Jawa yang SLTA-nya memperoleh tenaga PTM adalah sebagai berikut : Sumatera 52 tempat, Kalimantan 10 tempat, Sulawesi 25 tempat, Maluku 3 tempat, Bali dan Nusa Tenggara 7 tempat. Adapun 161 SLTA yang memperoleh guru PTM terdiri dari 98 SMA, 42 SGA, 7 SMEA, 3 SGPD, 2 SGKP, 3 SGTK, 1 SPMA, dan 1 SMKA.

Apabila diamati bahwa pada tahun 1951 hanya ada k.l., 25 SLTA di luar Jawa, maka pada tahun 1962 yaitu tahun berakhirnya proyek PTM, di luar Jawa telah ada 161 SLTA, yang berarti bahwa 136 SLTA telah dibuka oleh para mahasiswa peserta PTM. Proyek PTM ini merupakan saham luar biasa dari para siswa untuk kepentingan mencerdaskan bangsa melalui pemerataan pendidikan menengah di luar Jawa.

Dengan dibukanya sekian banyak SLTA di luar Jawa, berarti diperolehnya lulusan SLTA yang kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di luar Jawa, sehingga proyek PTM ini secara tidak langsung telah pula memberikan sumbangannya kepada pemerataan pendidikan tinggi bagi generasi muda di luar Jawa.

### **3. Kurun Waktu Setelah 1972**

Kedua kegiatan tersebut di atas, yaitu pengabdian melalui Tentara Pelajar dan Corps Mahasiswa serta melalui PTM, memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi pengembang kepribadian bagi mereka yang turut dalam kegiatan tersebut. Pengabdian tersebut merupakan perwujudan cinta Tanah Air yang disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi generasi muda pada waktu itu. Kedua kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan sukarela.

Mengingat manfaat yang sangat besar dari kedua kegiatan tersebut bagi pembentukan kepribadian, cinta Tanah Air dan pengabdian kepada masyarakat, maka timbullah keinginan untuk memasukan kegiatan berbaur dengan masyarakat kedalam kurikulum pendidikan tinggi dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pada waktu dimulai operasionalisasi embrio gagasan KKN pada tahun 1971, landasan yang digunakan adalah Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan pada tahun 1967 oleh Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Departement Pendidikan dan kebudayaan pada waktu itu.

**Kebijaksanaan tersebut meliputi:**

- a. Reorganisasi struktur dan pengelolaan
- b. Pengembangan kurikulum
- c. Pengembangan ketenagaan
- d. Pengembangan materiel
- e. Pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat

**Tujuan utama dari perubahan yang didasarkan atas Kebijakan Pokok 1967 tersebut adalah :**

- a. Agar isi pendidikan lebih disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia
- b. Agar kebutuhan lebih dikaitkan dengan keterampilan yang dibutuhkan di Indonesia, dan dengan jumlah tenaga yang diperlukan dalam masing-masing bidang keterampilan, agar tenaga kerja yang tersedia lebih memadai dengan kesempatan kerja.
- c. Agar lebih ditingkatkan pendidikan nonformal untuk melengkapi pendidikan formal.
- d. Agar lebih banyak memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan negaranya dengan jalan yang praktis dan memuaskan.

Dalam Kebijakan Pokok 1967 tersebut dimasukkan keinginan agar para mahasiswa diwajibkan untuk bekerja di daerah perdesaan sebagai bagian dari pendidikan.

Pada tahun 1971, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tiga universitas sebagai proyek perintis dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan multidisipliner yang didasarkan atas partisipasi mahasiswa, yaitu Universitas Andalas dibagian Barat, Universitas Gadjah Mada di bagian Tengah, dan Universitas Hasanuddin di bagian Timur Indonesia, sehingga masukan yang diperoleh dari proyek-proyek perintis tersebut cukup beragam dari sudut pembagian geografis.

Masing-masing proyek perintis dipersilakan melaksanakan proyeknya berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Sepanjang tahun 1972, Presiden dalam berbagai kesempatan menyatakan

perlunya mahasiswa diwajibkan untuk bekerja di bidang pembangunan masyarakat perdesaan sebagai bagian dari pendidikannya.

Salah satu kesempatan tersebut adalah Rapat Rektor Universitas/ Institut Negeri pada bulan Maret 1972. Setelah membicarakan masalah kuliah kerja nyata dan memperhatikan laporan dari ketiga proyek perintis dan sebuah makalah yang dipersiapkan atas permintaan Direktur Pendidikan Tinggi, maka para Rektor menyetujui diadakannya proyek-proyek perintis kuliah kerja nyata di beberapa universitas sebagai langkah ke arah program secara nasional.

Setelah selesai Rapat Rektor tersebut, Direktur Pendidikan Tinggi meminta 13 universitas di 13 propinsi, yang tersebar di tanah air, untuk menyelenggarakan proyek perintis kuliah kerja nyata dalam tahun kuliah 1973-1974

Universitas-universitas tersebut adalah : UNSYIAH, USU, UNAND, UNSRI, UNPAD, UNDIP, UGM, UNIBRAW, UNUD, UNLAM, UNHAS, UNSRAT, UNPATTI.

Selain UGM, universitas-universitas lainnya termasuk kategori universitas madya. Dasar kebijaksanaan yang diambil oleh Direktur Pendidikan Tinggi untuk mengutamakan universitas madya adalah untuk menyelenggarakan kuliah kerja nyata secara berhasil di universitas madya terlebih dahulu sebelum mengintroduksikannya di universitas pembinaan yang dianggap lebih sukar. UGM sebagai universitas Pembina diambil karena telah diketahui komitmennya terhadap kuliah kerja nyata ini.

Dalam rangka untuk menarik perhatian terhadap kuliah kerja nyata ini, Direktur Pendidikan Tinggi dengan bekerja sama dengan Rektor UGM mengadakan sebuah seminar internasional di Yogyakarta dengan tema "Study-service Activities in Indonesia" pada tanggal 20-24 November 1972.

Di samping dihadiri oleh wakil ke 13 universitas proyek perintis, seminar dihadiri pula oleh wakil BUTSI dan instansi-instansi pemerintah, maupun oleh wakil-wakil dari luar negeri yang di negaranya masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan program semacam kuliah kerja nyata.

Pada tanggal 17-18 November 1972, beberapa hari sebelum seminar internasional tersebut di atas, diadakan seminar nasional yang dihadiri oleh wakil ke 13 universitas yang ditugasi melaksanakan proyek perintis, dan juga oleh wakil-wakil dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Tenaga Kerja.

Di dalam seminar inilah Direktur Pendidikan Tinggi menyarankan penggunaan dari istilah "Kuliah Kerja Nyata" (KKN), yang merupakan gabungan dari istilah "Kuliah Kerja" yaitu kegiatan di lapangan yang dikaitkan dengan suatu disiplin ilmu, dan "Kerja Nyata" yang berarti kegiatan praktis untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, KKN mula-mula adalah kegiatan yang merupakan perpaduan antara darma pertama, yaitu pengajaran dan darma ketiga yaitu

pengabdian kepada masyarakat.

Dalam perkembangan kemudian, KKN juga meliputi darma penelitian, sehingga KKN merupakan sub-sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Falsafah dan tujuan KKN berkaitan sangat erat satu dengan yang lainnya, karena falsafah merupakan landasan idealnya, sedangkan tujuan merupakan landasan operasional. Hakekat KKN adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Falsafah KKN tidak terlepas dari landasan ideal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Fokus utama adalah pada aspek mental para mahasiswa yang berkaitan dengan pengabdian kepada bangsa dan Negara sebagai perwujudan cinta Tanah Air. Pengalaman TP dan CM serta Proyek PTM dalam pengembangan kepribadian mahasiswa banyak mempengaruhi landasan falsafah KKN. Apabila mahasiswa menganggap diri sebagai pembela rakyat, maka ia harus memahami aspirasi rakyatnya dengan tinggal di tengah-tengah rakyat itu sendiri. Meskipun KKN dilaksanakan dalam jangka waktu pendek, namun hal tersebut dapat merupakan langkah awal untuk berintegrasi dengan rakyat.

Focus lainnya secara ideal adalah membiasakan diri untuk berfikir secara multi dan interdisipliner dan dengan demikian memasukan dalam diri pribadi sifat keterbukaan.

Tujuan KKN diarahkan kepada :

- a. Pengembangan kepribadian mahasiswa (personality development)
- b. Pengembangan kelembagaan (institusional development)
- c. Pengembangan masyarakat (community development)

Hakekat KKN adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Tridharma Perguruan Tinggi sebagai doktrin Perguruan tinggi di Indonesia yang pertama kali dicetuskan oleh Menteri PTIP kedua, yaitu Prof. DR. Ir. Thojib Hadiwidjaja, yang disarikan dari tujuan perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Tridarma Perguruan Tinggi tersebut meliputi (1) darma pengajaran (2) darma penelitian dan (3) darma pengabdian kepada masyarakat. Apabila dilihat latar belakang mahasiswa, dapat diadakan tiga kategori yaitu :

- a. Mahasiswa yang tinggal di desa dan “melaju” (commuting) ke perguruan tingginya di kota. Bagi mereka, kehidupan pedesaan sudah sangat dipahami karena tinggal di tengah-tengah rakyat di desanya.

KKN bagi yang bersangkutan tetap penting karena melalui KKN belajar memecahkan masalah pedesaan dari sudut multi dan interdisipliner dalam kaitannya dengan bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas-fakultas yang ada di dalam kelompok KKN-Nya.

- b. Mahasiswa yang tinggal di kota akan tetapi berasal dari pedesaan dan kembali

ke desanya pada waktu-waktu tertentu.

Mereka mengalami sedikit banyak keterasingan dengan kehidupan di desa karena bertempat tinggal di kota.

KKN penting bagi kategori mahasiswa ini, karena KKN berarti menyegarkan kembali pemahaman tentang kehidupan pedesaan dan membiasakan diri berfikir secara multi dan interdisipliner melalui kelompok KKN-nya.

- c. Mahasiswa yang bertempat tinggal di kota dan tidak pernah ke desa. KKN bagi kategori ini penting, karena dengan demikian mereka mulai memahami kehidupan di pedesaan dan mencoba memecahkan masalah pedesaan dengan pendekatan inter dan multidisipliner dalam kelompok KKN-nya.

Kesimpulannya adalah bahwa bagi semua kategori mahasiswa, KKN mempunyai makna yang penting yang mempengaruhi pengembangan kepribadiannya. Pengembangan kelembagaan dikaitkan dengan masukan yang diperoleh dari pelaksanaan KKN bagi relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan rakyat.

Pengalaman mahasiswa selama mengikuti KKN membawa kepada pemahaman tentang kekurangan yang ada pada dirinya yang seluruhnya diisi oleh perguruan tinggi dalam proses belajar mengajar.

Hal ini terutama nampak dari masalah-masalah yang dihadapi di pedesaan yang tidak dapat dipahami oleh para mahasiswa karena kurikulumnya tidak membawa kepada kemampuan akademik yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Berdasarkan pengamatan seperti ini para mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dapat mengajukan saran-saran konkrit yang perlu diperhatikan oleh fakultas/universitas dalam upaya untuk meningkatkan relevansi keberadaan perguruan tinggi dengan pemenuhan kebutuhan rakyat.

Pengembangan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, dikaitkan dengan aspek fisik maupun aspek mental.

Aspek fisik dikaitkan dengan bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat pedesaan berupa peningkatan sarana dan prasarana yang bersifat fisik seperti pelebaran jalan, pembuatan jembatan penghubung antara dua dusun, dan sebagainya (hardware).

Aspek mental dikaitkan dengan membantu masyarakat pedesaan dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk mengembangkan desanya dengan swadaya (software). Dalam interaksi dengan masyarakat pedesaan terbentuk suatu *community of learning*, karena tidak hanya masyarakat pedesaan yang memperoleh manfaat, akan tetapi juga mahasiswa memahami kearifan masyarakat pedesaan dan belajar dari kearifan masyarakat pedesaan dan belajar dari kearifan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dari tujuan ketiga KKN, yaitu pengembangan masyarakat (*community development*). Pemberdayaan masyarakat dewasa ini yang actual adalah bagaimana masyarakat daerah, terutama di Kabupaten/Kota, dapat diberdayakan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Perlu disadari bahwa kenyataan membuktikan masyarakat belum mampu memikul otonomi tersebut, terutama perangkat eksekutif dan legislatifnya. Adalah kewajiban perguruan tinggi untuk memberikan sumbangannya ke arah memberdayakan pihak eksekutif dan legislative tersebut.

Melalui KKN dapat dilakukan upaya untuk membawakan pemahaman tentang arti demokrasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memahami hak dan kewajibannya dalam alam demokrasi.

Pemberdayaan masyarakat yang aktual lainnya adalah dalam rangka menghadapi globalisasi dengan segala aspeknya. Globalisasi membawa kepada akses terhadap informasi yang sangat luas melalui alat komunikasi yang canggih dengan segala pengaruhnya, baik positif maupun negatif. Akibat yang negatif yang harus sangat diwaspadai adalah pengaruh terhadap moral, terutama bagi generasi muda, dengan akses terhadap informasi yang menimbulkan erosi moral. Dalam hubungan ini agama harus mampu memberikan benteng kepada diri generasi muda, yang dapat memilah antara yang benar dan yang salah. KKN dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam memperoleh benteng diri tersebut.

Globalisasi membawa kepada persaingan yang sangat ketat. KKN dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam kaitannya dengan dampak globalisasi, agar dalam percaturan bisnis di era globalisasi masyarakat Indonesia, mulai dari pedesaan tidak tersingkirkan dan tidak menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

## **PELAJAR PEJUANG SEKARANG**

Pelajar Pejuang sekarang adalah generasi reformasi mulai dengan Gerakan Reformasi Nasional (GRN) pada bulan Mei 1998, yang telah melibatkan para pelajar dan mahasiswa di seluruh Tanah Air. GRN timbul sebagai reaksi terhadap cara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Orde Baru dengan sifat-sifatnya yang sentralisme, kurang melibatkan partisipasi masyarakat, kurang demokratis, dan pemerintahan yang korutif. Perubahan dari pemerintahan yang sentralistis ke pemerintahan desentralistis terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Sedangkan infrastruktur, baik yang bersifat perangkat lunak maupun perangkat keras, tidak siap untuk menampung perubahan mendadak tersebut.

Perjuangan yang dilakukan oleh para pelajar/mahasiswa melalui berbagai organisasinya ditujukan kepada berbagai dampak negative yang timbul sebagai akibat dari kurang siapnya berbagai aparat pemerintah maupun kemampuan masyarakat untuk melaksanakan reformasi yang diinginkan.

Perjuangan ditujukan terutama kepada masalah korupsi dalam berbagai bentuk yang menghambat pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dan desentralistis. Berbagai kepentingan partai politik telah pula mempengaruhi gerakan pelajar/mahasiswa, sehingga telah terjadi polarisasi di antara kalangan pelajar/mahasiswa kurang kondusif untuk menjadikannya potensi guna menyelesaikan Gerakan Reformasi yang telah dimulai pada bulan Mei 1998.

Keadaan sekarang ini memerlukan introspeksi di kalangan pelajar/mahasiswa, apabila akan tetap mempertahankan fungsinya sebagai potensi bangsa untuk mengadakan perubahan dan pembangunan.

Masalah yang sangat mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah pelaksanaan otonomi daerah dan menghadapi konsekuensi globalisasi dalam rangka melangkah sebagai bangsa yang memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur.

Dalam menghadapi kedua masalah besar tersebut, prioritas diberikan kepada pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan professional yang tinggi, mencintai Tanah Air, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **SIKAP KETERBUKAAN, KEBERSAMAAN, DAN KEMITRAAN**

Dari pengalaman yang amat banyak serta beragam dari generasi muda sebelumnya, telah berkembang keyakinan akan perlu dikembangkannya sikap keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan (3K).

Sikap keterbukaan adalah sikap mental (a state of mind), yang berkembang secara bertahap, tidak datang dengan tiba-tiba. Sikap keterbukaan adalah sikap membuka diri pada orang lain dalam interaksi personal. Sikap membuka diri ini berarti adanya kesediaan untuk mendengarkan orang lain atau pendapat lain.

Kewajiban mendengar bagi pemimpin perlu dibudayakan di masyarakat kita. Hal ini berkenaan dengan pengakuan adanya hak berbicara bagi masyarakat yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar dapat dipahami oleh pemimpin dan ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

Sikap kebersamaan didasarkan atas keyakinan bahwa pemecahan masalah secara bersama selalu baik daripada memecahkan sendiri, masalah yang bersifat kompleks yang tidak mungkin dipecahkan oleh satu disiplin ilmu, lebih-lebih

masalah pembangunan yang multi kompleks harus didekati dengan cara inter dan multidisipliner serta lintas sektoral. Masalah tidak pernah sama sepanjang masa, karena kendala-kendala yang dihadapi berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat dengan demikian pemecahannya pun tidak sama.

Adanya kebersamaan berarti partisipasi pemikiran sebagai pihak yang menguntungkan bagi pengambilan keputusan yang bijaksana. Kebersamaan berkaitan pula dengan kebersamaan antara generasi tua dan generasi muda dengan dasar saling menghargai dan saling mempercayai. Generasi tua mempunyai pengalaman yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya, sedangkan generasi muda dapat melahirkan konsep-konsep yang cemerlang dan inovatif.

Sikap kemitraan ialah memandang orang lain sebagai mitra, sebagai sahabat. Perbedaan pendapat yang datang dari mitra diterima sebagai memperluas wawasan dan oleh karenanya perbedaan pendapat merupakan hikmah. Perbedaan pendapat dalam konfrontasi mengekskalasikan konflik karena adanya keinginan untuk tetap mempertahankan pendapatnya sendiri. Akan tetapi karena datangnya dari lawan, pendapat tersebut harus terus ditentang dengan segala cara.

Jawaban atas pertanyaan apakah seseorang mempunyai sikap K3 (Keterbukaan, Kebersamaan dan Kemitraan) sebagaimana diuraikan di atas hanyalah dapat dijawab oleh orang itu sendiri. Ini adalah pertanggungjawaban moral terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Orang lain dapat dibohongi, akan tetapi diri sendiri dan Tuhan tidak dapat dibohongi. Orang lain hanya dapat menilai dari sudut lahiriyahnya saja.

## **PENUTUP**

Dalam menghadapi tantangan di era globalisasi perlu ditingkatkan hubungan antara generasi tua dan generasi muda atas dasar saling menghargai.

Cinta Tanah Air yang perwujudannya ditentukan oleh tantangan yang dihadapi setiap angkatan generasi muda, harus senantiasa dipupuk untuk tetap mempertahankan keberlangsungan Bangsa dan Negara sepanjang masa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yayasan Jati Diri Bangsa, seorang pemimpin yang ideal adalah yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengetahuan, keterampilan, watak terpuji, jiwa, kerohanian, spiritualitas dan tuntunan Ilahi.

Jati diri generasi muda secara keseluruhan akan tertanam dengan kuat dengan pemimpin generasi muda yang memenuhi persyaratan tersebut di atas disertai cinta Tanah Air, dengan semangat keterbukaan, kemitraan, dan kebersamaan.

Bandung, 11 Agustus 2005

*Taufik Abdullah:!*)

## PDRI, KESADARAN SEJARAH, DAN MASA KINI <sup>2)</sup>

### KENANGAN SEBAGAI PENDAHULUAN

Tak ingat lagi saya tanggalnya, tetapi kejadian ini saya alami di awal tahun 1989. Saya ditelepon Dr Alwi Dahlan, salah seorang Deputy Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Ia meminta kesediaan saya untuk menyelenggarakan seminar tentang PDRI. Meskipun ketika itu saya telah lebih dari sepuluh tahun tidak terlibat dalam kerja kebirokrasian, reaksi saya agak birokratis juga, "Apa urusannya KLH dengan sejarah PDRI?" Tentu saja reaksi ini tidak saya katakan secara terbuka. Tetapi sang Deputy Menteri mengatakan bahwa ini adalah permintaan Menteri Emil Salim. Katanya lagi beberapa tokoh Minang dan eks aktivis PDRI merasa telah terjadi "ketidakadilan" dalam penulisan sejarah, ingin mengingatkan bangsa akan peranan PDRI dalam perjuangan kemerdekaan. Mengapa PDRI dengan begitu saja telah dilupakan, seakan-akan peristiwa itu tak pernah terjadi? Benar juga, saya pikir, mengapa PDRI dibiarkan saja sebagai bagian dari "masa lalu", tetapi hampir-hampir digagalkan untuk lulus dalam seleksi masuk "sejarah"? PDRI praktis telah diperlakukan sebagai sesuatu yang terjadi "di sana", di negeri asing yang disebut "masa lalu", tetapi tidak dipilih untuk menjadi "tempat" yang sekali-sekali perlu "dikunjungi" oleh ingatan dan kenangan sejarah bangsa. Tampak-tampaknya PDRI telah terkena "politik pelupaan" yang dijalankan dengan sengaja ataupun tidak oleh sistem kekuasaan. Dari cerita ringkas Alwi tahulah saya bahwa rencana mengadakan seminar PDRI itu telah agak lama juga dirintis. Beberapa mantan pelaku sejarah telah bertemu dengan Laksamana Sudomo dan bahkan Teuku M. Hasan, mantan wakil Ketua PDRI, telah sempat juga menemui Presiden Soeharto untuk membicarakan masalah itu.

Lampu hijau dari pimpinan negara yang tertinggi inilah yang membuka jalan bagi kemungkinan terselenggaranya seminar PDRI. Kalau dipikir-pikir aneh juga, seminar tentang sebuah episode pendek dalam sejarah revolusi nasional dan perang kemerdekaan saja harus mendapat izin Presiden. Tetapi sudahlah, saya paham juga sedikit-sedikit tentang politik dan saya memang telah melihat -- walaupun waktu itu belum merumuskannya -- Orde Baru, seperti halnya dengan Demokrasi Terpimpin, adalah sebuah "greedy state", negara serakah. Inilah negara yang tak

- 1). Anggota Komite Ilmu-ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Mantan Ketua LIPI (2000-2002) dan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) tahun 1997-2001 dan 2001-2006.
- 2). Makalah ini pernah disajikan dalam Seminar Nasional Sehari, "Meninjau Kembali PDRI dalam Sejarah Penulisan Sejarah Nasional", Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 26 Juli 2006.

puas hanya dengan penguasaan politik dan sistem *patronage* ekonomi, tetapi juga ingin menjadi pemegang hegemoni kesadaran dan ingatan kolektif bangsa. Sadar akan hal ini, saya langsung saja setuju dan mengatakan bahwa seminar PDRI itu sebaiknya diadakan oleh sebuah badan, organisasi, atau apa saja yang dengan mudah dapat diterima masyarakat dan tentu saja, oleh sistem kekuasaan. Berdasarkan pertimbangan ini saya mengusulkan agar seminar diadakan secara resmi oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Soalnya pada waktu itu saya adalah salah seorang anggota dewan penasihat organisasi profesi para sejarawan itu dan juga mantan ketua dewan formatir kepengurusan MSI. Jadi saya yakin saya mempunyai semacam *persuasive capacity*. Tebakan ini benar juga, karena ketua MSI, (almarhum) Dr. Abdurrahman Suryomihardjo, menyambut baik usul saya itu. Bahkan saya kira, meskipun seandainya saya bukan anggota MSI ataupun jika sekiranya idée ini diusulkan oleh orang lain, usul agar MSI mengadakan seminar itu akan segera juga diterimanya. Begitulah beberapa hari kemudian saya diberi tahu bahwa usul saya agar MSI menjadi penyelenggara disetujui pihak pengambil inisiatif.

Semua akhirnya terasa sudah akan beres saja. Presiden memang tidak bermaksud untuk hadir tetapi ia menyampaikan sambutan tertulis, yang akan dibacakan oleh Mensekneg Moerdiono. Para penulis makalah telah siap sedia dan peserta dari luar kota telah mulai berdatangan ke Jakarta. Tetapi sayang sampai beberapa jam sebelum seminar dibuka, surat izin masih belum juga diberikan. Barulah setelah Menteri Negara KLH menelpon secara pribadi ke kantor penguasa HANKAM yang berhak menanganinya, surat izin seminar bisa keluar. Dan ini terjadi hanya satu dua jam sebelum seminar dibuka. Untunglah dalam pidato sambutannya, Presiden menekankan pentingnya arti PDRI dalam sejarah perang kemerdekaan. Barangkali pada waktu itu Presiden telah sampai pada kesimpulan bahwa “politik pelupaan sejarah” tentang PDRI sudah waktunya ditinggalkan. Tetapi rupanya petugas di lapangan masih terbiasa dengan kebijaksanaan lama, yang masih “serakah” ingin menguasai ingatan kolektif bangsa. Maklum *bak* kata orang sana, *Old habit dies hard*. Tetapi biarlah insiden kecil ini sekadar dicatat saja. Yang jelas terlepas dari segala keharusan pendekatan “tingkat tinggi” dan keanehan yang dihadapi di lapangan itu, seminar ini berjalan lancar. Rasanya tidaklah berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa seminar ini adalah yang terbaik tentang PDRI yang pernah diadakan. Soalnya sederhana saja. Di samping topik pembicaraan terasa masih baru dan bahkan cukup *revealing*, seminar ini masih sempat dihadiri oleh beberapa “aktor sejarah” yang pernah memainkan peranan penting dalam PDRI, baik pada tingkat kepemimpinan atas, ataupun -- dan ini cukup mengharukan -- pada tingkat desa.

Seminar PDRI di bulan September 1989, yang diadakan di ruang sidang kepunyaan Sekretariat Negara ini, adalah pembuka jalan. Setelah itu beberapa kali seminar atau diskusi tentang sejarah PDRI telah diadakan. Jika keikutsertaan

saya, baik sebagai salah seorang pembicara, maupun peserta biasa, bisa dipakai sebagai ukuran, maka seingat saya di Jakarta telah diadakan dua kali lagi, selain seminar yang pertama itu. Seminar kedua bahkan dibuka oleh Wakil Presiden Hamzah Haz dan diadakan juga di kantor Wakil Presiden, sedangkan yang ketiga diselenggarakan di sebuah hotel berbintang. Tak terasa sama sekali bahwa tanggal itu adalah ulang tahun ke 57 penyerahan kembali mandat PDRI kepada Presiden.

Seminar yang terakhir ini, seperti juga halnya dengan seminar-seminar sebelumnya, dihadiri oleh beberapa orang “aktor sejarah” dan anak-anak mantan “aktor sejarah” yang telah tiada serta beberapa menteri dan mantan menteri. Di Bandung seingat saya diadakan dua kali. Keduanya diselenggarakan oleh kerjasama Angkatan '45 Sumatra Barat dengan UNPAD. Sedangkan di Bukittinggi diadakan sekali. Sejak seminar pertama (1989) telah pula diterbitkan beberapa buku tentang PDRI.

Jadi aspek sejarah PDRI yang mana lagi yang perlu saya kisahkan dalam kesempatan ini? Berbagai pendapat dan pandangan tentang arti PDRI dalam sejarah bangsa telah banyak pula disampaikan. Karena itu baiklah saya membicarakan masalah PDRI sebagai sebuah penggalan sejarah yang ikut membentuk struktur kesadaran dari kekinian, bukan sebagai kisah tentang peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu.

## REVOLUSI : PERISTIWA DAN KESADARAN

Kalau sekali-sekali situasi masa kini direnungkan, barangkali terasa juga bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu yang seakan-akan merupakan bagian dari kekinian. Ada peristiwa yang membanggakan dan menimbulkan rasa haru, sehingga kadang-kadang ingin juga hati untuk mengalaminya, meskipun peristiwa itu sesungguhnya bukan pengalaman aktual yang pernah dilalui, tetapi hanyalah pengetahuan sejarah saja. Bukankah ada lagu yang mendendangkan kerinduan akan kebesaran Srivijaya -- seakan-akan kerajaan maritime abad ke 7-13 di Sumatra itu adalah peristiwa yang terjadi jauh di kelampauan pernah secara riil dialami? Lagu *Halo-halo Bandung* pun masih terasa sebagai gambaran suasana kontemporer, pada hal liriknya berisi ajakan untuk merebut Bandung dari tangan musuh. Nostalgia memang tidak selamanya berkaitan dengan pengalaman pribadi yang riil di masa lalu. Perasaan rindu ini sering juga mengacu pada gambaran dan bayangan tentang episode yang mempesona yang pernah -- atau bahkan konon pernah, -- dilalui masyarakat sendiri di masa lalu. Di samping yang menimbulkan nostalgia, tentu ada juga peristiwa yang mencekam perasaan bahkan menimbulkan rasa dendam. Karena itu janganlah heran kalau, umpamanya, setiap kali “peristiwa G-30 S” -- apalagi kejadian traumatis yang terjadi sesudahnya -- dibicarakan ada saja orang yang tergelincir pada reaksi emosional yang negatif. Contoh-contoh peristiwa lain yang menggugah perasaan, baik pada tatanan lokal, ataupun nasional, tentu masih banyak. Tetapi sebuah pertanyaan sederhana

tertanyakan juga, “Pernahkah ada perjuangan yang bersifat kemasyarakatan dijalankan tanpa dukungan pengetahuan dan pemahaman sejarah?”

Kalau dibanding-banding barangkali episode sejarah yang paling jauh menukik ke dalam struktur kenangan dan kesadaran bangsa secara keseluruhan -- bukannya yang bersifat lokal, etnis, atau unsur keragaman lainnya -- ialah revolusi nasional. Episode historis ini bukan saja suatu rangkaian kejadian dan peristiwa yang mendebarkan ketika patriotisme, rasa cinta tanah air, dan nasionalisme, pemahaman akan cita-cita kebangsaan yang trans-etnis dan modern, sedang menghadapi ujian yang keras, tetapi juga awal terlepasnya bangsa dari genggamannya kolonialisme. Salah satu faktor dari kokohnya tempat peristiwa ini dalam struktur kenangan kolektif bangsa ialah karena kenangan padanya diperkuat oleh ritual tahunan kenegaraan. Bukankah perayaan Hari Proklamasi adalah ritual negara yang selalu meriah dan dimeriahkan? Peringatan dan perayaan berbagai hari penting lain yang terkait dengan revolusi, seperti Hari Pahlawan, Hari Angkatan Bersenjata dan sebagainya, menjadikan *event* nasional itu semakin hidup dalam kenangan. Bahkan andaipun kenangan sejarah berhenti pada saat Indonesia sedang mencoba menampilkan diri sebagai salah satu pemimpin Dunia Ketiga dan ketika paradigma konflik sedang dominan dalam melihat realitas sosial-politik, revolusi nasional, yang terjadi jauh sebelum episode itu, tetap juga mempunyai kedudukan yang kuat. Hal ini tentu bisa juga diterangkan kalau diingat bahwa masa itu adalah periode ketika Demokrasi Terpimpin (1959-1967) menjadikan revolusi sebagai suasana kekinian yang otentik. Demokrasi Terpimpin, yang telah meninggalkan “demokrasi liberal” -- demokrasi, yang kata Bung Karno bertentangan dengan “kepribadian nasional” -- menjadikan revolusi sebagai pilar ideologi. Dengan ideologisasi ini maka revolusi pun dijadikan sebagai landasan strategis dalam perumusan sistem dan orientasi politik. Di masa inilah “revolusi” dan “kepribadian nasional” menjadi pilar dari ideologi-instrumental, yang disebut Manipol-USDEK. Dengan dukungan kedua pilar ini Indonesia menampilkan dirinya sebagai pemimpin dari *The New Emerging Forces*.

Meskipun bertolak dari pengalaman yang empirik di masa lalu, tetapi di tangan sang *ideologue* dari Demokrasi Terpimpin, pengertian tentang revolusi mengalami proses transformasi. Revolusi tidak lagi hanya sekadar *event* yang pernah terjadi di suatu ruang dan waktu tertentu, tetapi telah beralih rupa menjadi suatu fenomena sejarah menetap dan melampaui batas-batas kesejarahan yang konvensional itu. Dalam pemikiran ini revolusi adalah keharusan tanpa henti bagi bangsa yang berjuang. *There is no journey's end for a struggling nation*, kata Bung Karno di berbagai kesempatan. Revolusi adalah saat ketika berbagai hal harus “dihancurkan dan dibangun, *retooling, herodening*”. Hal ini harus terjadi, karena revolusi Indonesia adalah “*a summary of many revolutions in one generation*”. Dalam suasana ini rakyat Indonesia tidak mempunyai pilihan lain selain harus selalu tampil (sambil mengutip ungkapan Danton, seorang tokoh revolusi Prancis) “berani, berani, sekali berani”. Revolusi Indonesia, yang penuh romantika perjuangan itu, *congruent* dengan hati-nurani manusia.

Meskipun lahirnya Demokrasi Terpimpin dikatakan sebagai awal dari *"the rediscovery of our revolution"*, Bung Karno tidak bermaksud untuk menghidupkan kembali kenangan sejarah ke masa revolusi, yang dimulai ketika ia dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Ia tidak tertarik pada sejarah sebagai rekonstruksi dari rangkaian peristiwa dan kejadian di masa lalu. Ia lebih terpukau oleh "apinya sejarah" yaitu semangat dan pesan yang dipantulkan oleh rekaman atau ingatan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu itu. Bung Karno hanya membayangkan saja sejarah sebagai *event*, tetapi melukiskannya sebagai sebuah tumpukan idée yang inspiratif dalam suasana kekinian sebagai alat untuk membentuk masa depan. Meskipun demikian, jika saja ideologisasi dan romantisasi revolusi yang dilakukannya dikembalikan kepada *event* yang terjadi di suatu masa dan di suatu tempat, maka bayangan dari suasana revolusi yang diberikan Bung Karno itu hanya mungkin ditemukan di masa-masa awal revolusi, ketika "zaman bersiap" sedang mewarnai kehidupan kota-kota.

Bulan-bulan pertama revolusi -- di manapun juga di persada tanah air ini -- adalah saat ketika patriotisme yang penuh rasa pengorbanan dan keberanian, yang tak kenal halangan, tampil sebagai faktor pembentuk utama dari pola perilaku dan gaya wacana. Terutama tentu saja, di kalangan para pemuda. Dalam suasana ini "bambu runcing" di tangan dengan kepala yang diikat secarik kain merah-putih para patriot tampil menghadapi ancaman meriam dan segala macam senjata pembunuh yang modern. Ke luar, ketika berhadapan dengan musuh, semboyan "Merdeka atau Mati" menjadi pendorong semangat perjuangan. Tetapi ke dalam, ketika dialog intense diadakan dengan formasi sosial sendiri, segala keharusan formalitas dari sistem hirarki sosial yang berlaku di zaman normal mencair begitu saja. Dalam suasana ketika massa telah terlibat dalam proses politik yang fundamental ini maka membayar pulalah segala batas-batas status sosial yang kini dianggap tidak lebih daripada hasil bikinan yang artifisial tanpa nilai kultural yang otentik. Ketika itu pulalah penegasan yang keras dan lantang dari kehadiran kategori sosial baru ditampilkan ke depan. Penilaian terhadap tingkat keterikatan pada cita-cita kemerdekaan dan sikap penolakan pada kolonialisme tampil sebagai landasan dari sistem hirarki yang baru. Di dalam periode yang singkat inilah berbagai kesatuan laskar, dengan orientasi politik beragam bermunculan dan permusuhan terhadap semua yang dianggap sebagai wakil atau perwujudan dari masa lalu yang "terkutuk" tampil ke depan. Dalam suasana inilah beberapa daerah mengalami "revolusi (*sosial*) dalam revolusi (*nasional*)" yang mengucurkan air mata dan darah dan sekaligus menyemaikan benih tradisi dendam yang disintegrasif.

Masa awal revolusi -- "zaman bersiap"-- adalah saat romantik heroisme yang pendek. Masa itu, di saat batas-batas konseptual antara masyarakat, sebagai kumpulan yang terikat oleh suatu sistem nilai dengan negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak memaksa, masih kabur. Mungkin kekaburan dari batas konseptual yang dirasakannya di masa awal revolusi inilah yang menyebabkan Bung Karno di zaman Demokrasi Terpimpin yang revolusioner

itu melihat dirinya bukan saja seorang Presiden dari negara-bangsa yang harus dikelolanya, tetapi juga seorang Pemimpin Besar Revolusi dari masyarakat yang sedang bergolak.

Periode yang serba-spontan dan revolusioner ini -- sebagaimana juga pernah diungkapkan Tan Malaka ( dalam bukunya *Gerpolek*) dengan nada protes - - mengalami pasang surut ketika perundingan dengan Belanda telah dimulai. Ketika peristiwa itu telah terjadi, batas konseptual antara negara dan masyarakat pun mulai semakin membeku. Sutan Sjahrir tampil di meja perundingan bukan sebagai seorang pemimpin bangsa, sebagaimana yang ingin ditekankan Belanda, tetapi sebagai Perdana Menteri/Ketua Delegasi dari sebuah negara yang sedang mempertahankan eksistensi dirinya. Ketika hasil perundingan itu harus diperdebatkan dan akhirnya disahkan KNIP ( sebagai parlemen sementara) batas konseptual itupun semakin mengental juga. Pemerintah yang menyetujui Sumatra, Jawa dan Madura secara *de facto* berada di bawah kekuasaan R.I. adalah wakil yang sah dari negara yang telah semakin meneguhkan eksistensi dirinya. Maka ketika Belanda melancarkan serangan ke wilayah yang telah diakui itu pada tahun 1947, Indonesia pun menyebutnya sebagai suatu tindakan agresi, sedangkan Belanda, mengatakan bahwa mereka melancarkan "aksi polisionil". Bukankah agresi hanya bisa dilakukan kepada sebuah negara yang mempunyai wilayah, rakyat dan pemerintahan, sedangkan "aksi polisionil" adalah tindakan kekerasan untuk menyelesaikan keributan yang terjadi di daerah tak bertuan atau di daerah yang berada di bawah kekuasaan sendiri? Dalam suasana ketika perbedaan yang tegas antara masyarakat dan negara semakin menaik ini, perlawanan yang mengingkarinya disebut "pemberontakan". Begitulah jadinya, ketika PKI-Muso melakukan gerakan pembangkangan di Madiun di pertengahan tahun 1948. Partai itu telah melakukan pemberontakan terhadap sebuah pemerintah yang sah. Di waktu Dewan Keamanan PBB membuat putusan untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, badan dunia ini telah melibatkan diri dalam konflik dua negara yang bersengketa.

Dalam situasi ketika negara yang sedang mempertahankan eksistensi dirinya harus memberi berbagai konsesi politik, dengan harapan bahwa nanti, ketika waktunya telah sampai, seluruh bangsa akan kembali bersatu di bawah naungan negara-bangsa yang berdaulat. Akan perundingan dengan pihak Belanda masih bisa dilanjutkan di bawah pengawasan PBB. Tetapi bagaimanakah perundingan harus bisa mencapai persetujuan jika Belanda sibuk menuntut agar TNI dibubarkan? Ketika harga mati telah dipatrikan maka dengan berbagai dalih Belanda pun secara tiba-tiba menghentikan proses perundingan dan secara sepihak mengatakan tak lagi terikat dengan segala perjanjian yang telah disetujui bersama. Dengan begitu saja kota-kota di wilayah Republik yang telah semakin menciut diserang dengan gaya *Blitzkrieg*. Yogyakarta diserang dan diduduki. Presiden, Wakil Presiden serta sebagian anggota kabinet ditangkap dan ditawan. "Republik Indonesia sudah

tidak ada lagi”, konon kata Jenderal Spoor, panglima tentara Belanda. Tetapi penyerangan dan pendudukan itu ternyata membuka babak baru dari sejarah revolusi dan perang kemerdekaan Indonesia.

## REVOLUSI DAN PERANG KEMERDEKAAN

Apakah dengan agresi yang cepat dan berhasil ini, eksistensi R.I. sebagai sebuah negara telah berakhir dan -- demi kemerdekaan -- perjuangan, seperti dulu di masa awal revolusi, harus dilanjutkan oleh semua unsur masyarakat secara spontan tanpa komando dari sebuah sistem kekuasaan yang diakui? Ternyata ini hanyalah pertanyaan kesejarahan belaka, bukan sesuatu yang dimasalahkan ketika peristiwa itu sedang dialami. Pertanyaan ini bahkan telah terjawab begitu saja tanpa ada yang mengajukannya. Sebab seketika beberapa orang menteri yang kebetulan sedang berada di luar kota Yogyakarta mengetahui bahwa Presiden dan Wakil Presiden/ Perdana Menteri telah tertawan, mereka menyadari bahwa kekosongan kekuasaan tidak bisa dibiarkan terjadi. Di saat itu juga mereka, di bawah pimpinan Sukiman, pada tanggal 20 Desember, mendirikan pemerintah darurat. Pada waktu yang hampir bersamaan, Kolonel Nasution sebagai Panglima Se-Jawa, membuat persiapan bagi pemerintahan darurat militer. Dan, Tan Malaka, yang sekian lama terasing dalam percaturan politik setelah ditahan beberapa lama, segera pula mengumumkan dirinya, di suatu tempat di Jawa Timur, sebagai Kepala Negara. Sah atau tidak sah kesemuanya memancarkan kesadaran bahwa negara yang telah diproklamirkan tidak bisa lagi dikembalikan ke dalam suasana revolusi kerakyatan tanpa berfungsinya suatu sistem kekuasaan.

Presiden dan Wakil Presiden ternyata juga sangat menyadari kemungkinan terjadinya kekosongan kekuasaan yang sah. Sebelum tentara Belanda memasuki Istana Negara mereka mengirim radiogram yang memberi mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi, untuk membentuk pemerintahan darurat, dan kepada Maramis dan Sudarsono di India untuk mendirikan *government-in-exile*, jika sekiranya Sjafruddin gagal. Tetapi Sjafruddin tidak mengetahui adanya radiogram ini. Meskipun agak ragu-ragu, karena menyadari implikasi hukum, jika kabar yang belum pasti ternyata tak benar, pada tanggal 22 Desember Sjafruddin dan kawan-kawan mendirikan PDRI di Halaban, di tempat pengungsian mereka yang pertama.

Pemerintah darurat yang manakah yang sah? Ternyata pula pertanyaan ini tak pernah diajukan karena seketika para menteri yang telah mendirikan pemerintah darurat di Jawa itu mengetahui bahwa Sjafruddin, yang sedang berada di Sumatra mendapat mandat dari Presiden. Mereka pun bergabung dengan PDRI. Adalah keputusan politik pusat pemerintahan untuk menjadikan mereka sebagai menteri dengan portfolio yang jelas dan kemudian (Maret, 1949) mengangkat mereka sebagai anggota komisariat PDRI di Jawa. Panglima Besar Sudirman pun segera

membenarkan pendapat Ketua PDRI bahwa keputusan politik tertinggi berada di tangan sang penerima mandat. Jadi jikapun sempat terjadi kekosongan kekuasaan, maka hal itu hanya terjadi selama beberapa jam saja -- selama peristiwa yang terjadi di Yogyakarta masih belum diketahui. Tetapi bagaimana jadinya dengan usaha pengisian kekosongan kekuasaan yang berada di luar PDRI? Tan Malaka pun harus dianggap makar kepada pemerintah yang sah. Maka begitulah, sebuah peristiwa lagi ditambahkan ke dalam daftar tragedi dari revolusi nasional -- seorang pejuang dan patriot besar harus tersingkir dari pentas sejarah yang aktual. Tan Malaka tak hendak keluar dari revolusi yang serba-spontan ketika keharusan akan keteraturan kekuasaan negara telah semakin kuat. Perbenturan pun terjadi dan ungkapan lama yang selalu menghantui para tokoh revolusioner pun secara tragis dikenakan pada dirinya -- "revolusi memakan anaknya sendiri".

Pada tahap ini saja telah kelihatan bahwa lahirnya PDRI dan diakuinya legitimasi kekuasaannya bukan saja membantah perkiraan Belanda, bahwa dengan jatuhnya Yogyakarta "Republik telah habis", tetapi juga dengan jelas menunjukkan bahwa R.I., yang telah kehilangan sebagian besar wilayahnya, lulus dengan gemilang dalam ujian tentang makna dan *significance* dari *statehood*. Tiada kekosongan kekuasaan yang sempat dibiarkan dan tidak pula spontanitas patriotik belaka yang dijadikan landasan perjuangan. Sikap dan pola perilaku yang segera tampil keluar ialah pantulan kesadaran akan keharusan berlakunya legitimasi yang konstitusional. Setelah keharusan yang esensial ini telah diteguhkan maka berbagai inovasi, bahkan improvisasi, politik yang sesuai dengan keharusan situasi pun telah bisa dijalankan. Dalam suasana pemikiran politik inilah sistem perang rakyat semesta, yang mengharapkan keterlibatan masyarakat secara total dalam perjuangan bisa diperkenalkan. Sistem *Werhkreise* yang memberi keleluasaan relatif bagi para panglima wilayah untuk mengambil segala macam corak inisiatif perjuangan dan menjalankan berbagai operasi corak militer pun bisa pula menjadi strategi dasar. Dalam konteks struktural seperti inilah penyerbuan 1 Maret ke Yogyakarta -- sebuah peristiwa sejarah yang sempat mengalami mitologisasi di masa Orde Baru -- dilancarkan dengan berhasil. Dalam pemerintahan, keragaman dalam penentuan kebijaksanaan bisa terjadi, sesuai dengan realitas situasi dan struktur lingkungan yang memang berbeda-beda. Maka di Sumatra bisa saja pejabat sipil diangkat sebagai penguasa militer dan menjadikan pejabat lama sebagai komisaris daerah, sedangkan di Jawa perwira diangkat sebagai penguasa militer, dengan menjadikan pejabat sipil yang lama sebagai wakilnya. Berbagai hal lain bisa dilakukan selama pemerintahan yang sah tetap utuh dan perjuangan mempertahankan negara dapat berjalan baik.

Apapun mungkin yang terjadi pada Yogya dan para pemimpin utama R.I. kehadiran PDRI serta merta membantah klaim Belanda tentang kehancuran negara yang dianggapnya tidak sah. Dengan berlanjutnya kehadiran negara yang dikatakan telah hancur itu dunia internasional pun dengan mudah dapat membuat

keputusan yang mengharuskan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melanjutkan perundingan. Dimensi internasional dari kehadiran PDRI ini ternyata memainkan peranan yang sangat menentukan dalam proses terwujudnya negara-bangsa yang berdaulat, tetapi aspek internal dari PDRI tidak kurang pentingnya dari sudut sosiologi dan sejarah.

Apakah yang terjadi ketika kota-kota Republik (kecuali Aceh), yang lebih dulu telah dipenuhi para pengungsi yang berdatangan dari daerah lain, ketika Belanda berhasil mendudukinya? Ke manakah para pejabat pemerintahan harus menghindari dari jebakan dan ancaman musuh dan dari mana pulakah para pejuang dan pemimpin bisa melanjutkan perjuangan melawan agresi Belanda? Jika saja kesadaran dan situasi masa kini, yang diwarnai oleh kecenderungan konflik yang tinggi, dipakai untuk meninjau masa lalu, maka suatu peristiwa sosial yang mengharuskan akan terhampar begitu saja. Sebab dalam episode PDRI inilah "orang kota" harus bersedia menjadi "orang desa" dan ketika ini pula tembok-tembok sosial yang memisah gaya hidup desa dan kota seakan-akan dibiarkan mencair. Di masa gerilya ini pula mereka yang "terpelajar" harus belajar hidup di tengah-tengah dan bahkan menggantungkan hidup kepada mereka yang dianggap belum terpelajar. Maka ungkapan apakah yang harus dipakai untuk menggambarkan situasi sosial, yang mungkin terasa agak diromantisir ini, kalau bukan pernyataan telah terjalannya solidaritas sosial? Ikatan solidaritas inilah yang berhasil mengatasi berbagai hambatan dalam tradisi dan formasi sosial yang telah berakar lama dan yang mencapai tingkat *sophistication*-nya zaman kolonial.

Kegetiran dan kesedihan adalah harga yang harus dibayar dalam setiap perjuangan yang keras, tetapi ketika kehadiran PDRI telah menjadi pengetahuan dunia internasional, maka aspek eksternal inipun ikut menentukan dinamika internal pemerintah darurat ini. Tetapi ketika ini pula ujian lain mesti dihadapi. Bagaimanakah harus ditanggapi perilaku sang pemberi mandat, yang berada di dalam tawanan musuh dan tidak pula mengetahui situasi lapangan, tetapi telah memutuskan hal-hal yang prinsipil tanpa konsultasi dengan sang penerima mandat yang sah? Bagaimanakah harus dihadapi kesediaan Sukarno-Hatta, yang telah mempercayakan pemerintahan kepada PDRI, meskipun karena keharusan darurat, untuk mengadakan perundingan dengan Belanda? Bukankah kesediaan berunding itu sekali gus mengingkari dua hal -- legitimasi PDRI dan situasi lapangan -- yang semakin menguntungkan Republik? Barulah setelah pernyataan Roem-van Royen diumumkan Bung Hatta berusaha mencari Sjafruddin, tetapi ke Aceh, bukan ke belantara di Sumatra bagian Tengah. Tetapi apa yang telah dilakukan tidak lagi bisa diingkari, maka apakah sikap yang harus diambil PDRI?

Kesadaran bahwa legitimasi historis dan moral dalam suasana perjuangan berada di atas legitimasi politik formal dan keyakinan bahwa persatuan yang terpelihara adalah kemestian mutlak dalam menghadapi saat-saat kritis perjuangan bangsa ternyata menjadi pijakan utama dalam memecahkan masalah yang dilematis

ini. Ketika “Yogya kembali” telah merupakan kenyataan dan Sukarno-Hatta serta para pemimpin lain telah pula dipulangkan, maka -- sebagaimana T.B.Simatupang menulis dalam kenang-kenangannya di masa gerilya -- “Sekarang Yogyakarta menantikan kedatangan Sjafruddin dan Sudirman”. Apapun mungkin corak kekesalan pribadi yang dirasakannya, Ketua PDRI sadar benar bahwa legitimasi yang sesungguhnya ada di tangan Sukarno-Hatta. Betapapun kegetiran merasa ditinggalkan menyesak dada Panglima Besar Sudirman yang sedang sakit. Sudirman sadar juga bahwa Sukarno adalah Panglima Tertinggi dan pemimpin bangsa. Maka dengan rasa keikhlasan yang murni mereka pun kembali juga ke Yogya. Ketika dalam sebuah sidang kabinet Sjafruddin menyerahkan mandatnya secara resmi (13 Juli 1949) iapun berkata, “ PDRI tidak mempunyai pendapat tentang pernyataan Roem-van Royen tetapi semua akibatnya kita tanggung bersama”. Setelah itu, Republik Indonesia pun mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi KMB. Tetapi sebelum peristiwa yang sangat menentukan ini terselenggara, Konferensi Inter-Indonesia, yang dihadiri oleh wakil-wakil R.I. dan BFO ( ikatan negara-negara federal yang disponsori Belanda) mulai merakit kembali persatuan bangsa yang telah dirobek-robek kolonialisme Belanda. Sejarah PDRI telah berakhir dan yang tertinggal hanyalah penggalan-penggalan kecil dari peristiwa dalam ingatan dan catatan. Mungkin juga, secerach pelajaran dan kearifan. Tetapi apa benar orang belajar dari sejarah?

## **PDRI: SEJARAH DAN KESADARAN**

Ada sebuah pepatah lama yang sekali-sekali tak ada salahnya kalau diulang juga. “ Belajar kepada yang sudah (terjadi), mengambil tuah kepada yang menang”. Atau kalau gaya bahasa yang biasa saja mau dipakai—“belajarlah dari sejarah”. Ini memang suatu kearifan lama yang bermanfaat juga kalau dijalankan, hanya saja apakah benar orang belajar dari sejarah? Kalau saja kisah dari berbagai konflik sosial- horizontal, dan juga politik-vertikal, yang pernah—dan bahkan masih—terjadi di sana sini di tanah air kita ini dipakai sebagai contoh, apalagi kalau ditinjau pula berbagai kasus bencana alam yang kini menghantui masyarakat, bagaimanakah ucapan sarkastik Voltaire akan bisa dipungkiri? “ Satu-satunya yang dapat dipelajari dari sejarah”, kata filosof Prancis di abad 18 ini,” ialah bahwa orang tidak pernah belajar dari sejarah”.

Sarkasme terhadap kegagalan dalam mendapatkan kearifan dari sejarah untuk menemukan jalan dalam mengatasi masalah kontemporer adalah yang lumrah. Sebuah peristiwa sejarah yang diketahui tidak akan dengan begitu saja dapat memberi pelajaran atau, bahkan mungkin juga, mensugestikan kearifan. Tetapi kalau dipikir-pikir perbandingan dari berbagai peristiwa sejarah sebenarnya dapat juga memberi petunjuk dalam membuat hipotesa, jika belum bisa dikatakan teori, tentang kecenderungan dan pola laku sosial. Setiap peristiwa pada dirinya unik, *eimmalig*, memang, tetapi dengan membanding-bandingkan, kecenderungan

umum tentang pola perilaku masyarakat mungkin juga bisa didapatkan. “Revolusi” dikatakan revolusi setelah beberapa kejadian dan peristiwa yang kelihatannya sama dibanding-bandingkan. Praduga hipotetis yang mengatakan bahwa ketimpangan antara harapan yang tinggi dengan kenyataan empirik yang pahit dapat menimbulkan kegelisahan sosial adalah hasil dari perbandingan sejarah. Dengan bersenjatakan pengetahuan hipotetis yang telah teruji ini pemerintah di manapun juga tentu akan berusaha menjaga jangan sampai ketimpangan itu terlalu besar dan menjadi destruktif. Dengan contoh sederhana ini maka arti dari ungkapan “belajar dari sejarah” tentu bisa juga dimaklumi.

Tetapi sejarah atau boleh juga, perbandingan sejarah, tidak hanya mempunyai kemungkinan untuk memberikan pelajaran atau kearifan. Dalam keunikannya pun peristiwa yang direkam dan direkonstruksi sejarah bukan saja mungkin memberi konfirmasi empirik terhadap praduga hipotesis yang mungkin telah dimiliki, tetapi juga memperkuat rasa identitas sebagai kelompok, memberi pantulan-pantulan kearifan dalam mengatasi masa kini, memperkaya wawasan, dan bahkan membuka jalan bagi pelarian emosional dari masa kini yang terasa sumpek. Pengetahuan sejarah tentu bisa juga memberi kenikmatan antiquariat, mengenai zaman yang ada “nun jauh di sana, di kelampauan”, serta memberi semacam *sense of continuity*, yang meniadakan rasa keterlepasan, *uprooted*, dalam peredaran zaman. Karena itu, walaupun terasa berlebih-lebihan, ucapan Freud bahwa “Hanya ia yang begajul yang tidak tertarik dengan masa lalunya” masuk akal juga. Tetapi apa hubungannya uraian singkat ini dengan sejarah PDRI ?

Sebagai bahan pelajaran, sekadar penambah pengetahuan, tentang masa lalu tentu saja mempelajari episode PDRI tidak ada masalah, seperti juga apa salahnya mempelajari sejarah Aztec dan Maya atau periode “*glory that was Greece, grandeur that was Rome*” atau, kalau ungkapan puitis kesejarahan ini dilanjutkan, “*wonder that was India*” atau tentang negeri dan zaman apa saja. Ada atau tidak tertangkap kearifan yang dipantulkannya yang jelas ialah kesemua ini bisa memperluas horizon pengetahuan. Dengan mempelajari sejarah ini tiba-tiba dunia ini seakan-akan dengan begitu saja terhampar sebagai sebuah panorama kesejarahan yang mempesona. Tetapi sebagai sebuah problematik kesejarahan bangsa maka pengetahuan akan sejarah PDRI harus dianggap sebagai suatu kemestian. Sebab dengan kajian tentang PDRI inilah sejarah revolusi nasional, sebagai suatu rangkaian peristiwa yang sangat menentukan dalam proses pembentukan bangsa dan Negara, tidak akan terhampar dalam bentuk yang terputus-putus, terpenggal-penggal. Apakah yang terjadi setelah Sukarno dan Hatta tertawan sehingga kemudian seakan-akan dengan tiba-tiba saja Dewan Keamanan PBB mengharuskan dimulainya kembali perundingan Indonesia-Belanda? Terlepas dari segala keharusan akademis ini, masalah kegunaan, atau lebih tepat, arti pengetahuan sejarah sesungguhnya ditentukan oleh keprihatinan masa kini, bukan oleh masa lalu yang menghasilkan ingatan atau kenangan sejarah itu.

Jika disadari bahwa pemilihan fokus dari usaha rekonstruksi sejarah sebenarnya bermula dari pertanyaan subjektif, yang tentu saja bersifat kontemporer, tentang “apa, bagaimana, serta mengapa” di masa lalu, yang tak bertepi dan tak berbentuk itu, mestikah diherankan kalau pencarian makna sejarah lebih keras ditentukan oleh keprihatinan hari kini? Sebagai hasil rekonstruksi dari peristiwa yang terjadi di lautan peristiwa yang disebut masa lalu itu, sejarah hanya bisa “berbicara” kalau yang mengingat atau mempelajarinya “mengajaknya untuk berbicara”. Pola dan corak dialog dengan sejarah ditentukan oleh sang penanya.

Kalau begitu halnya maka pertanyaan itu bertolak dari pemahaman tentang struktur keberadaan kita. Jadi kalau yang dipersoalkan makna dari sejarah PDRI, sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa, maka masalah yang pertama yang perlu disadari ialah situasi keberadaan bangsa saat ini. Memang benar jurang antara harapan atau hasrat normatif dengan realitas empirik tidak akan pernah bisa dijembatani, sebab keduanya bersifat diunamis, tetapi yang selalu jadi masalah ialah “apakah situasi yang kini dialami terasa bergerak mendekati hasrat normatif bernegara dan berbangsa itu?” Ketika pertanyaan ini telah diajukan maka seakan-akan dengan begitu saja kita berhadapan dengan sekian banyak pertanyaan dan pernyataan kritis.. “*What went wrong?*”, sebuah diskusi menamai tema sentralnya. “Mencari ‘Indonesia Baru’”, menurut judul diskusi yang lain dan bahkan ada yang mencoba “*Re-inventing Indonesia*”, sedangkan yang lain lagi mengadakan eksplorasi pemikiran tentang perlunya “revolusi karakter bangsa”. Dan entah apa lagi. Bahkan SBY, satu-satunya Presiden yang dipilih rakyat secara langsung dalam sejarah, menamakan kabinetnya “Indonesia Bersatu”. Bukankah situasi “bersatu” adalah sesuatu yang kini terasa seakan-akan telah hilang tetapi ingin ditemukan lagi? Sekian banyak jawaban pun telah diberikan pada berbagai pertanyaan yang menggugah kesadaran dan pemikiran itu. Tetapi kalau dipikir-pikir keprihatinan yang dirumuskan dengan beraneka ragam ungkapan ini hanya menyatakan satu hal, yaitu kekuatiran yang mendalam akan kemungkinan tergelincirnya Indonesia ke dalam kategori “*messy state*” atau bahkan, “*failed state*”.

Kalau begitu halnya adakah pesan yang terpancar dari PDRI, sebagai sebuah episode dalam sejarah kita, yang mungkin memberi jalan dari kemelut masa kini? Atau, kalau istilah Bung Karno ingin dipakai apakah “apinya sejarah” PDRI yang mungkin bisa menghangati situasi kekinian yang terasa sedemikian “dinginnya dalam kearifan”? Betapapun mungkin di suatu ketika dan dalam waktu yang agak panjang juga, PDRI pernah terkena “politik pelupaan” yang tampak-tampaknya disengaja, tetapi bukankah akhir kisah dari PDRI, sebagai bagian dari realitas empirik sejarah revolusi nasional, adalah terwujudnya cita-cita bangsa yang diperjuangkan? Sebuah negara-bangsa yang medeka dan berdaulat akhirnya menjadi kenyataan yang tak terpungkiri. Ketika hal itu telah tercapai, maka segala kegetiran, kepahitan, dan bahkan kesedihan yang mencekam selama periode itu hanya tinggal menjadi kenangan yang mengesankan. Jadi, pesan

apakah yang bisa dipantulkannya?

Tanpa harus mengulang kisah lagi, sebuah pertanyaan bisa diajukan, “Mengapakah para menteri dan panglima tentara di Jawa dengan begitu saja menerima kepemimpinan Sjafruddin yang sedang berada di Sumatra?”. Jawab yang sederhana hanya dua. Pertama, kesadaran dan penghargaan akan adanya legitimasi kekuasaan negara dan kedua, berfungsinya *trust*, kepercayaan, dalam hubungan antar-pemimpin serta masih kuatnya ikatan kepemimpinan dalam masyarakat-bangsa. Tanpa *mutual trust* di antara para pemimpin bangsa dan pejabat negara, tidak satu krisis pun yang akan bisa teratasi. Dan tanpa adanya penghargaan kepada legitimasi kekuasaan, yang sebelumnya telah disetujui bersama, tak satu pun kesatuan tindakan yang akan bisa dilaksanakan. Kini cobalah berkaca kembali kepada situasi kekinian—di manakah *trust* itu? Jatuhnya Orde Baru bukan saja berarti berhentinya Presiden Soeharto tetapi juga membongkar segala bibit krisis saling percaya di antara elite politik—yaitu mereka yang dulu masih disebut “para pemimpin”. Pada gilirannya *crisis of mutual trust* ini hanya menghasilkan krisis yang lain, yaitu *crisis of crisis management*. Maka baiklah kita bertanya pada diri sendiri apakah sudah mulai kelihatan tanda-tanda berakhirnya krisis yang saling berkaitan yang sempat menerjang tanah air kita.

Sjafruddin sadar benar, seperti juga komisariat di Jawa dan panglima Besar, bahwa legitimasi historis dan kepemimpinan sesungguhnya berada di tangan Sukarno- Hatta. Karena itulah ketika mereka merasakan *constitutional infringement* telah terjadi—mereka yang ditawan melakukan perundingan dengan Belanda, pada hal kekuasaan, meskipun buat sementara, telah dipercayakan kepada PDRI—kepercayaan akan kepemimpinan “dwitunggal” jugalah yang akhirnya mengatasi situasi dilematis itu. Adanya kepemimpinan yang berwibawa dan yang dipercaya bukan saja bisa memungkinkan terwujudnya kesatuan dalam perjuangan, tetapi juga menjadi landasan dalam penentuan pilihan ketika dilemma etis harus diselesaikan. Maka baiklah renungkan kembali situasi yang kini dihadapi. Bagaimanakah situasi kepemimpinan di negeri tercinta ini? Biarlah masing-masing memberi jawabnya

Di saat semangat otonomi daerah sedang menggebu-gebu dan Pilkada menjadi aktivitas politik yang dengan mudah memancing semangat primordialisme dan golongan, yang kadang-kadang sempit dan agresif, bagaimanakah harus diterangkan bahwa banyak sekali tokoh-tokoh sipil dan militer PDRI, baik di Sumatra ataupun di Jawa, memainkan peranan utama di luar daerah kelahiran mereka? Bagaimanakah pula harus dijelaskan bahwa kadang-kadang mereka juga berbeda agama dan mempunyai unsur pembeda yang lain dengan mayoritas masyarakat di wilayah mereka menalankan tugas perjuangan? Siapakah yang memberi makan dan tumpangan tempat tinggal mereka? Masa awal revolusi adalah saat ketika semangat “merdeka atau mati” mewarnai kehidupan para pemuda di kota-kota, tetapi di masa PDRI ketika negara telah merupakan suatu eksistensi

yang diakui, peristiwa sosial apakah namanya yang sedang terjadi kalau bukan terwujudnya *solidaritas nasional* yang tulus?

Dengan terpeliharanya *mutual trust*, adanya kepemimpinan berwibawa, serta dihargainya legitimasi yang syah maka bukan saja solidaritas nasional lebih mungkin terjalin, pengabdian kepada perjuangan pun terjaga. Jadi mestikah diherankan kalau pimpinan PDRI dan TNI sangat optimis bahwa sistem gerilya yang mereka lakukan, kemenangan akhir akan didapatkan, walaupun kota-kota telah diduduki Belanda? Maka paham pulalah kita kalau sekian puluh tahun setelah peristiwa itu berlalu, seorang penyair yang sempat mendengar kisah PDRI akhirnya menghela nafas panjang sambil berkata, “ inilah yang kurindukan: suatu zaman yang nyanyian bersamanya adalah nyanyian keikhlasan, suatu zaman di mana ide dan fikiran disenandungkan dengan nada berbeda-beda tanpa ditekan harus sama semua ukuran panjang, lebar dan warnanya, zaman ketika senyum yang nampak tidak dipasang pada topeng panggung, zaman di mana sikap bersahaja diperebutkan bersama” ( Taufiq Ismail, *Aku rindu pada zaman yang ikhlas dan bersahaja*)

## PENUTUP

Masa awal revolusi, ketika pilihan tindakan secara simbolik dijadikan sangat terbatas pada “merdeka atau mati”, adalah sesungguhnya *the high tide of nationalism*—pasang naik dari nasionalisme. Inilah saatnya ketika “*the state of mind*” ( Hans Kohn) yang disebut nasionalisme, yang bertolak dari keinginan menempatkan “bangsa”— suatu “*imagined community*” ( Anderson)— dalam sebuah negara —bangsa yang berdaulat, yang sesuai dengan cita-cita, dengan mudah dapat saja membagi masyarakat menjadi “kawan” dan “lawan” ( St.Sjahrir). Sedangkan periode PDRI yang hanya tujuh bulan (Desember, 1948 -Juli, 1949) ketika wilayah Republik Proklamasi telah dibagi-bagi atas sekian banyak negara yang langsung ataupun tidak langsung disponsori Belanda dan di saat wilayah R.I. hanya tinggal desa-desa dan hutan belantara ( kecuali Aceh), adalah masa ujian bagi kesadaran kenegaraan, ketika perjuangan tersalur dalam konteks kesadaran akan adanya negara yang harus dipertahankan. Masa awal revolusi adalah periode heroisme-romantik yang mengharukan, tetapi masa PDRI adalah saat ketika kesadaran politik akan kenegaraan harus ditempa oleh dedikasi pada perjuangan bangsa dan di waktu *the art of statesmanship* kemampuan kenegarawanan, harus dipertaruhkan. Kalau masa awal revolusi adalah masa tanpa kepastian kecuali keyakinan akan hasrat kemerdekaan yang tak bisa dibendung, maka periode PDRI, di saat posisi R.I. berada dalam titik nadir eksistensinya, memberi pelajaran tentang bagaimana *the art of survival* dari sebuah negara harus dijalankan.

Sejarah, sebagai hasil rekonstruksi dari dinamika sosial dalam suatu rentangan waktu, mungkin tidak selamanya dirasakan bisa memberikan kearifan

atau bahkan mungkin tidak pula sekadar peringatan saja dalam menghadapi berbagai kegelisahan masa kini dan tantangan masa depan. Meskipun demikian sejarah selalu bisa memberikan hayat kontinuitas, *the sense of continuity*. Sejarah bangsa bukan sekadar kisah tentang berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga sesungguhnya adalah suatu peta yang menempatkan anak bangsa dalam suatu konteks kesejarahan. Dengan begini sejarah menghindakan seseorang atau masyarakat dari perasaan keterasingan ketika berada dalam arus perjalanan waktu. Karena itu bisalah dipahami juga bahwa bahkan masyarakat yang belum mengenal tulis-baca sekalipun berusaha mengingat sejarahnya dalam berbagai bentuk pencampuran peristiwa yang teringat dengan keyakinan mitologis. Baik masyarakat modern ataupun yang masih berada dalam tahap pra-modern memerlukan rekonstruksi tentang masa lalu atau bahkan hanya gambaran mitologis tentang masa lalu karena dengan dukungan inilah masyarakat, bahkan juga anggota masyarakat sebagai pribadi, dapat menyadari akarnya. Bila perlu sejarah atau gambaran sejarah itu bisa pula dijadikan sebagai *reservoir* kearifan di saat menghadapi masalah kemasyarakatan yang pelik. Masyarakat memang tidak ubah dengan pribadi, yang kediriannya tak terlepas dari masa lalu.

Kalau memang sejarah PDRI terkait erat dengan proses pembentukan negara-bangsa, ketika nasionalisme Indonesia, bukan lagi seakadar impian terwujudnya persatuan trans-etnis yang anti-kolonial, di mana lagi tempatnya ketika globalisasi telah memasuki hampir setiap rongga kehidupan? Bukankah globalisasi adalah sesungguhnya pengengkar akan keberlakuan batas-batas negara, bahkan juga bangsa, hingga yang tinggal hanyalah formalitas belaka? Mungkin juga, tetapi globalisasi adalah sebuah proses tanpa ingatan tentang pengorbanan, seperti yang dimiliki bangsa. Kesatuan sosial dan politik yang disebut bangsa ini sesungguhnya terujud dalam mata rantai ingatan yang berjejer-jejer saling memperkuat. Karena itulah salah satu penunjang yang kuat bagi masa depan bangsa ialah keutuhan ingatan akan rentetan peristiwa yang telah membentuknya. Dan PDRI adalah salah satu mata rantai yang penting.

--ooOoo--

David Reeve:<sup>1)</sup>

## ONG HOK HAM - A HISTORIAN'S TASTES

### SEJARAWAN KITA

**O**ng Hok Ham was born on 1 May 1933 (world labour day) in Surabaya. He was born into a world that no longer exists, that of Indonesian Chinese (*peranakan*) who were a key part of the Dutch colonial machine (the *rijksburgerij*). On both side of his family, there were very strong Dutch identifications. His mother came from the proud Han and Tan families of Surabaya, who had contributed so much to the economic development of East Java. They were sugar lords, and also involved in the monopolies. These families produced the kapitan, mayor and letnan leaders in the *peranakan* community. They had a strong sense of history, of entitlement and prestige. They were the aristocrats of the Surabaya *peranakan* community. From the 1890s they had become very Dutch. They spoke Dutch at home.

The Ong side of the family was less distinguished. An early Ong was supposed to have been a school teacher in Madura and later in East Java. His children became a clerk in sugar factory, with a combination of Dutch language skills and financial acumen.

The two families finally met up, the Ongs rising and the Hans possibly sinking a little. What they had in common was Dutch culture and a strong sense of their place in the Dutch colonial machine. Their son Ong Hok Ham was a typical product of the *peranakan*-Dutch Indies hybrid synthesis. How interesting then, and how striking, that Ong Hong Ham could emerge as a fully 'Indonesian' historian with a fully Indonesian voice.

Ong then is one of a leading historian from the School of History at the University of Indonesia. He became well-known as a public intellectual in the 1980s and 1990s through his frequent contributions to *Prisma*, *Tempo* and *Kompas*. In these writings he was known for relating Indonesia's history to the present, in ways that had implications for the future.

---

1). David Reeve, Associate Professor, baru saja pensiun dari University of New South Wales, Sydney, New South Wales. Reeve menulis disertasinya tentang sejarah Golkar. Tahun 1985, terbit bukunya dengan judul '*Golkar. An Alternative to the Party System in Indonesia*' (Oxford University Press). Tahun 1984 - 1987, Reeve memberi kuliah Sejarah Australia pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Kini, di masa pensiunnya, Reeve tengah menyelesaikan biografi Dr. Ong Hok Ham. Tulisan di jurnal ini adalah sebagian dari riwayat hidup sejarawan Ong Hok Ham, yang kini hampir enam tahun menderita *stroke*.

He had started his role as a public intellectual much earlier, from 1958 in P. K. Oyong's *Star Weekly*, when he was 25 years old. From 1958 to *Star Weekly's* banning in 1961, Ong contributed some 30 articles, the most controversial of which focussed on the best role for the '*peranakan*' Chinese community in Indonesia. These led him into a polemic with Baperki, and into an active role in 'assimilationist' politics until about 1963. His *Star Weekly* articles on those themes were published in 2005 by *Komunitas Bambu*.

Within the School of History, Ong Hok Ham was loved and feared amongst students for his deep scholarship, his highly individual lifestyle, and as a 'killer lecturer'. Students wanted to have the 'Ong experience', but lived in fear of his outbursts of anger, when he would throw chalk, dusters and anything that came to hand at frightened students, calling out '*big babies!*' ('bayi besar'), 'piles of meat!' ('daging kiloan')!. Female students would scrub off their make-up before class, frightened that Ong would shout at them for spending more time on their look than on preparing for the class. Then they would put their make-up back on, after Ong's class.

After completing his doctorate at Yale University (1968-1975), Ong was particularly known as a historian of 19th century Java and Dutch colonialism. Many of essays on these fields can be found in the four books of his writings published since his stroke in 2001<sup>2</sup>). But rather than describe these main thrusts of his writing, in this article I would like to give some idea of his wider personal tastes, tastes that also sustained his scholarly writings.

The first of these is books. From his very Dutch-style childhood and education (HBS), he became a passionate book-lover and collector. This developed the depth and breadth of his knowledge. As a schoolboy he was already raiding second book stores for his collection. He loves his books, and always urges students to love books too, to make books their friends, to treat them as people, to ask them questions and to challenge them. When Ong was jailed from March to September 1966, in the confused period of the start of the New Order, one of the most upsetting things to him was the confiscation of much of his collection.

The second is architecture. Ong was deeply impressed by the colonial-style house where he was brought up in Surabaya. It had a magic and evocative charm for him. Some of his essays in *Star Weekly* featured Indonesian cities, 'then and now'. He was always pleased to get the chance to go and look at the old homes of Lasem, or the lines of the roofs in Indramayu. In the early 1980s, the cheap housing scheme of Minister Cosmas Batubara offered Ong the chance of having

2). '*Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara*'; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002. '*Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang*'; Jakarta: Tempo, 2003. '*The Thugs, the Curtain Thief, and the Sugar Lord*'; Jakarta, *Metafor*, 2003. '*Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*'; Jakarta: Komunitas Bambu, 2005.

his own house. His calculations showed that he could have one of his own design even more cheaply. The result was his famous 'pre-post-modern' house of four separate pavilions. He had it designed by the architect son of Selo Soemardjan, who was inspired by a house built in Bali by leading architect Hindro Soemardjan. All students should visit it, and its owner and his library.

The third is Ong's taste for 'wandering'. Ong never had a car ('a professor in a bus!'), but he was always on the move. All around Jakarta: university, newspaper offices, bookshops, restaurants, films and theatre, embassy dinners and receptions, friends - he never stopped. This came partly from the feeling of being confined, in his highly protected, almost claustrophobic childhood and youth. Once he got out of the family home in 1953, going to highschool in Bandung, he felt a great liberation. He never went back to stay, and he kept on moving. This was of great importance for his career as a public intellectual, as the visits kept him on top of the gossip and the issues, the news not printed, and in touch with a wide range of intellectuals interested in Indonesia's politics and its future.

First Ong collected books, and after that paintings and masks. He loved a bright Dutch painting of cows and fields in his childhood home, though he later realised it was kitsch. A friend gave him some Balinese paintings in the 1950s, a taste stimulated by his first visits to Bali, with researcher Bill Skinner in 1958, and then in the early 1960s for the funeral of the father of Anak Agung Gede Agung. It became his habit to visit painters and get to know them and their histories. Thus developed a taste and an expertise. He has written a number of pieces on Indonesian art.

In the first half of the 1960s, visiting Java on his own, or with American scholars like Benedict Anderson and Ruth McVey, Ong became a 'Java junky', falling in love with Javanese culture, in its priyayi and abangan versions. One aspect was his developing taste for masks. He found a rich tradition of them in Malang, close to a branch of his extended family. One of his early major scholarly writings was on masks in the Cornell university journal *Indonesia*. He loved much else, for example wayang and wayang beber, but masks were a favourite.

The final taste is cooking. Ong is famous for his cooking, though he once lost in a cooking contest to designer Peter Sie. Ong's comment: 'He cheated'. Ong inherited a love of food from his voluble gregarious mother. As a beloved child, he would often choose the main dish for the evening meal, around which the rest of the meal would be constructed. It was mostly Indies Javanese cooking, with occasional Dutch-style meals. When Ong was an UI student from 1955 to 1968, meals had to be fitted into a tiny student budget, but there were occasional special meals at the *Trio*, or the *Arts and Curios*, and occasionally at the 'Three Tablecloths' in Glodok. This restaurant specialised in duck, and was popularly

called the '*Van Mook*' restaurant, after a former customer.

Ong's talents developed from eating to cooking in America, where he cooked a lot of experimental dishes. He learned Italian and Chinese cooking from room-mates. Trips to Europe from the 1960s developed his love of English, Italian and French cooking, and for French wines and Scottish single-malt whiskies. Arriving back in Indonesia in 1975 he said: "I come back with two skills: a phd and cooking. And cooking is the more important!".

From then on in Indonesia his reputation developed as a cook, a host, a hedonist, a bon vivant and a connoisseur. Some of his favourite dishes are bandeng bakar, babi hong, and sambal gandaria.

This taste went into his historical work too. He has written on meals, and their ingredients and their histories. He has written some fine articles on the *rijstafel*, and its political and social implications. Another good example, I think, of how a historian's broad tastes can enrich his scholarly writings. The killer lecturer could also be a killer at the table and the writing desk.

--ooOoo--

**Putra Agung:<sup>1)</sup>**

## NEGARA INDONESIA TIMUR 1946 – 1950

### PENDAHULUAN

Setelah proklamasi kemerdekaan, situasi di beberapa daerah di Indonesia mengalami pergolakan politik. Pertama, karena tentara Jepang yang telah takluk kepada Sekutu masih menganggap dirinya berkuasa, sehingga di beberapa daerah sering terjadi perebutan kekuasaan antara tentara Jepang dan laskar Indonesia. Kedua, tentara Sekutu yang mempunyai tugas untuk membebaskan tawanan perang dan pemulangan tentara Jepang secepat mungkin ke negerinya, ternyata juga ikut campur dalam urusan politik antara Indonesia – Belanda. Ketiga, pihak kolonial Belanda berusaha untuk menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia dengan membentuk negara federal.

Tiga masalah besar inilah yang menjadi latar belakang lahirnya negara federal di Indonesia, yaitu Negara Indonesia Timur (NIT). Ikut campurnya Tentara Sekutu dalam pergolakan politik di Indonesia berpangkal pada suatu persetujuan yang disepakati pada 24 Agustus 1945 antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda yang terkenal dengan sebutan *Civil Affairs Agreement* yang isinya antara lain: 1. mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia dan 2. tentara Inggris secepat mungkin harus menyerahkan tanggung-jawab pemerintahan sipil kepada Belanda (*“Uittreksel uit de Civil Affairs Agreement Tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk”* dalam Van Mook, 1949:236-237).

Sejak Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 sampai dengan situasi setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, seluruh perhatian ditujukan pada semangat kemerdekaan dari pusat kota sampai ke desa-desa. Pekik perjuangan ‘Merdeka’ sebagai salam nasional mulai diberlakukan pada tanggal 1 September 1945. Pekik ‘Merdeka’ ini membangkitkan semangat para pemuda untuk siap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Situasi semakin memanas ketika pada tanggal 10 September 1945 Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan bahwa pemerintahan transisi akan diserahkan kepada Sekutu dan tidak kepada pihak Indonesia.

Hal ini telah menimbulkan rasa kekecewaan dan memanas suasana. Di beberapa tempat di Jawa terjadi perlawanan terhadap tentara Jepang. Di Banyumas, kesatuan PETA di bawah Daidanco Soedirman pada awal September

1). Putra Agung adalah guru besar Sejarah pada Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Agung memperoleh gelar Ph.D. dalam Sejarah pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kini dia mengajar mahasiswa S2 dan S3, serta mengetuai Program Kajian Budaya.

berhasil melucuti seluruh senjata tentara Jepang tanpa melalui pertempuran. Di daerah lain seperti di Surabaya (2 Oktober 1945) dan di Yogyakarta (7 Oktober 1945) terjadi pula pertempuran sengit melawan tentara Jepang (Sekretariat Negara R.I. 1986:36).

Demikian halnya beberapa daerah di luar pulau Jawa. Bali (8 Desember 1945) telah diadakan pertemuan di kota Singaraja antara TKR Sunda Kecil yang bermarkas di Denpasar dengan PRI dan Pesindo untuk melucuti senjata tentara Jepang. Pertemuan itu dilanjutkan di Denpasar dan telah diputuskan untuk mengadakan penyerbuan terhadap semua *daedan* (tangsi) Jepang yang ada di Bali yaitu di Negara, Kediri (Tabanan), Denpasar dan Banyumala di Singaraja, pada tanggal 13 Desember 1945.

Pada tanggal 29 September 1945 rombongan pertama pasukan Sekutu yang terdiri dari pasukan India tiba di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philips Christison, Panglima Tertinggi Pasukan Inggris di Jawa dan Sumatra. Berkaitan dengan konflik hubungan politik antara pemerintah Kolonial Belanda dan pemerintah Indonesia, Christison mendesak pemimpin Indonesia di pulau Jawa dan pemerintah Belanda di Den Haag di Belanda untuk mengadakan pertemuan guna membicarakan masa depan Indonesia. Sementara itu wakil pemerintah Belanda untuk Indonesia -- yang waktu itu Belanda masih menyebut '*Nederlands Indie*' -- Letnan Jenderal Dr. H.J. van Mook yang berada di Brisbane, Australia, sangat keberatan atas sikap Christison yang dianggapnya mengakui secara de facto terhadap pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Kecaman van Mook terhadap Christison ini membuat pimpinan *South East Asia Command* (SEAC) Laksamana Lord Louis Mountbatten yang bermarkas di Singapura mengundang van Mook untuk datang ke Singapura. Dalam perundingannya itu Mountbatten (Inggris) mendesak van Mook untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia.

Apa yang diharapkan Mountbatten akhirnya dapat terlaksana. Christison berhasil mempertemukan antara van Mook dan pihak Indonesia sebanyak dua kali, 23 dan 31 Oktober, 1945. Pihak pemerintah Indonesia dihadiri oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Soebardjo. Pertemuan tersebut tidak membuahkan persetujuan, bahkan menimbulkan pandangan pro dan kontra, baik di pihak Belanda maupun di pihak Indonesia. Di pihak pemerintah Belanda, pertemuan Soekarno-Hatta dengan van Mook mendapat kecaman keras karena van Mook dianggap melanggar perintah Den Haag. Sedangkan di pihak Indonesia, terutama di kalangan pemuda yang dipengaruhi oleh pemikiran Tan Malaka yang menginginkan Indonesia tetap merdeka dan harus dipertahankan dengan senjata, bukan melalui jalan diplomasi (Gde Agung, 1985:12).

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Soekarno membentuk kabinet yang bersifat presidential, sesuai dengan UUD 1945. Kemudian mengangkat Moh. Hatta sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan diantara anggota KNIP dibentuk suatu panitia yang dinamakan Badan Pekerja. Perlu dijelaskan bahwa KNIP ini semata-mata membantu Presiden sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung terbentuk (Joeniarto, 1984:49).

Rupanya, pihak Indonesia cenderung mengikuti saran-saran Sekutu. Presiden Soekarno kemudian mengangkat Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri (9 November 1945) dan minggu berikutnya susunan kabinet yang tadinya kabinet presidential menjadi kabinet parlementer. Jalan menuju ke perundingan semakin terbuka dan Van Mook gembira, karena dia mengira jalan menuju ke pembentukan negara federal semakin mudah. Harapan van Mook sia-sia, karena tidaklah mudah dia memecah belah pulau Jawa dan Sumatra dengan pulau-pulau di bagian timur. Perhatiannya pun beralih ke Kalimantan dan Timur Besar (waktu itu disebut *Borneo en de Groote Oost*).

Dalam *Civil Affair Agreement* antara pemerintah Inggris dan Belanda ada disebutkan tentang pengakuan penuh terhadap kedaulatan Indonesia. Karena itu, Inggris kemudian menyerahkan tanggungjawab pemerintahan sipil kepada Belanda pada tanggal 1 Juli 1946. H. J. van Mook yang menerima wilayah *Borneo en Groote Oost* segera menyusun suatu pemerintahan sipil dan memprakarsai pertemuan dengan para pemimpin daerah dari Borneo dan Timur Besar.

Tetapi setelah Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda, tertinggallah tentara Nica (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang ternyata turut 'membonceng' bersama Inggris. Alasan Belanda dengan sertanya tentara Nica ialah untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Tetapi dibelakang hari, keberadaan Nica di Indonesia ini bahkan turut mempersulit dan memperuncing perlawanan Indonesia terhadap Belanda.

Demikian pula dalih adanya Nica di wilayah *Borneo en de Groote Oost*, meskipun Brigadir Jendral Dougherty dari Australia yang memimpin pendudukan tersebut. Wilayah ini yang terdiri dari beberapa kota berhasil dikuasai kembali oleh pasukan Sekutu. Kupang telah dikuasai (11 September), demikian pula Banjarmasin (17 September), Makasar (21 September) dan Ambon (22 September, 1945). Bulan berikutnya di tahun yang sama, Sekutu (baca: Nica) menduduki Manado (2 Oktober) dan Pontianak (16 Oktober) (Gde Agung, 1985:36).

Pada 29 Oktober 1945, Panglima Tentara Australia di Makasar, F.O. Chilton, --dengan alasan demi keamanan dan memudahkan terbentuknya pemerintahan sipil --, mengeluarkan larangan penggunaan senjata api dalam jenis apapun, penduduk dilarang memakai pakaian militer dan larangan latihan militer. Adanya

berbagai larangan tersebut telah mempersulit para pemuda bergerak untuk mendukung terbentuknya Republik Indonesia yang ada di Jawa dan Sumatra. Dr. GSSJ Ratulangi bagaikan gubernur boneka, karena kegiatannya diambil alih oleh tokoh-tokoh Nica.

Demikian pula suasana di Bali. Mr. I Gusti Ketut Pudja yang diangkat menjadi Gubernur Sunda Kecil dan Ida Bagus Putra Manuaba sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Sunda Kecil yang diangkat pada tanggal 23 Agustus 1945. Keduanya harus bekerja sama dengan Dewan Raja (gabungan raja-raja kecil se-Bali) dan Paruman Agung (paruman dibentuk di setiap swapraja) (S.L. van der Wal, 1976:584).

### **MALINO, PANGKAL PINANG, DENPASAR**

Tanggal 8 Juli 1946, dibentuklah Komisaris Pemerintahan Umum yang dipimpin oleh Dr. W. Hoven. Tugasnya antara lain, 1. mempelajari dan mempersiapkan pembangunan ketatanegaraan di *Borneo en de Grootte Oost*, 2. membantu Gubernur Jenderal dalam melaksanakan wewenang pemerintahan di wilayah ini, 3. menjalankan wewenang dan melimpahkannya dari Gubernur Jendral kepada Residen (W.A. van Goudoever, 1946:55-56).

Tanggal 16 Juli 1946, Gubernur Jendral van Mook mengundang semua unsur wakil dari pemuka masyarakat, pemuka berbagai suku dan agama, kepala swapraja, himpunan masyarakat adat dan para kooperator lainnya dari daerah Bangka, Belitung, Kalimantan dan Timur Besar untuk mengadakan konperensi Malino, di Sulawesi Selatan.

Untuk memudahkan jalannya konperensi beberapa orang telah diangkat sebagai komisariat (Cokorda Gde Raka Sukawati - Bali, Najamudin Daeng Malewa - Sulawesi Selatan, E.D. Dengah - Minahasa, Kapten Tahiya - Maluku Selatan, Ibrahim Sedar - Kalimantan Selatan, Uray Saleh - Kalimantan Barat, dan Dr. Liem Cu Le - Bangka (*Conclusies en Resoluties der Conferentie te Malino, Uitgave van het Algemeen Regerings Commissariaat voor Borneo en de Grootte Oost* dan Gde Agung 1985:115).

Konperensi Malino berlangsung sampai 25 Juli, 1946. Mosi dan keputusan yang telah diambil ialah membangun kembali ketatanegaraan di wilayah Hindia Belanda dengan nama *de Vereenigde Staten van Indonesie* (NIS, Negara Indonesia Serikat). NIS terdiri dari bagian-bagian, dengan daerah kekuasaan yang lebih besar dan wewenang memerintah seluas mungkin. Dalam negara bagian tersebut, dibentuk desentralisasi pemerintahan dalam bentuk daerah otonomi, sesuai dengan keinginan kelompok, suku dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan dan perekonomiannya. Keputusan Konperensi Malino ini ditandatangani oleh Cokorda Gde Raka Sukawati, Najamudin Daeng Malewa, R.J. Mathekohy, A. Asikin Noor dan Sultan Hamid II. (Gde Agung, 1985:39-121).

Setelah Malino, kemudian ada pula Konperensi Pangkal Pinang bagi golongan minoritas. Sesuai dengan Hindia Belanda dulu, yaitu golongan Belanda, Indo- Belanda, golongan Cina, Indo-Cina, Arab, dan Indo-Arab. Konperensi Pangkal Pinang menghasikan resolusi yang mendukung hasil Konperensi Malino (D.J.van Wijnen, 1946:31).

Malino dan Pangkal Pinang boleh dianggap sukses. Tetapi situasi keamanan di Sulawesi Selatan tak pernah bisa dicapai. Para pemuda dan lasykar rakyat sering melakukan penghadangan terhadap pasukan Belanda. Karena tak sanggup memberhentikan penghadangan ini, Panglima Teritorial Tentara Belanda untuk *Borneo en de Grootte Oost*, Kolonel H.J. de Vries menulis surat kepada Gubernur Jendral van Mook dan Letnan Jendral S. Spoor sebagai Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia, untuk meminta bantuan. Kemudian dikirimlah Kapten Raymond Pierre Westerling yang tiba di Makasar 5 Desember 1946. Seminggu kemudian, Jendral S. Spoor menyatakan kawasan Sulawesi Selatan berada dalam keadaan darurat perang (*Staat van Oorlog en Beleg*, SOB). Ternyata Westerling dan pasukan khususnya membantai penduduk. Pembunuhan yang tak berperi kemanusiaan ini dimulai sejak 11 Desember, 1946 dan berakhir 22 Mei, 1947. Kejahatan Westerling ini kemudian disebut sebagai “40.000 korban tindakan biadab Westerling.” Westerling sendiri kemudian ditarik ke Jakarta dan kemudian kembali ke negerinya di Belanda.

Belanda tetap tidak bisa tenang untuk menguasai Indonesia kembali setelah Jepang menyerah. Meski Bali menjadi salah satu bagian dari *de Grootte Oost*, keamanan pada dasarnya sulit dicapai. Panglima Tentara Belanda di Bali, Overste Ter Meulen sering kuwalahan melawan taktik gerilya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Misalnya pada 9 Juli 1946, pertempuran di Tanah Aron di lereng Gunung Agung telah tewas 82 orang tentara Nica dan tak seorangpun dari pihak pasukan Ngurah Rai yang gugur. Lima bulan kemudian (18 November) terjadi penyerbuan tangsi polisi di kota Tabanan dan merampas semua senjata yang ada di gudang senjata. Kekalahan ini dibalas oleh Ter Meulen dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. Dibantu dengan persenjataan yang lebih lengkap, pasukan I Gusti Ngurai Rai dihabisi. Hari itu, 20 November 1946, terjadi perlawanan pasukan Ngurah Rai sampai terjadi titik darah yang penghabisan, *Puputan*. Hingga kini, peristiwa *puputan* tetap diperingati dan patung I Gusti Ngurah Rai tegak berdiri dengan gagahnya di dekat bandara Bali, seakan mengucapkan ‘Selamat Datang’ bagi setiap orang yang mengunjungi Bali.

Belanda mengira bahwa setelah peristiwa *puputan*, Bali aman. Karena itulah Van Mook berniat untuk mengadakan konperensi NIS setelah konperensi Pangkal Pinang. Konperensi berikut, Denpasar. Persiapan pelaksana konperensi, Dr. W. Hoeven dan stafnya telah berhasil menyusun rancangan ketatanegaraan baru untuk *de Grootte Oost* berikut pembagian wilayahnya. Sesuai dengan *Staatblad van Nederlands Indie*, 1946 no. 143, *de Grootte Oost* dibagi menjadi 13 daerah

bagian. Ini berarti ada 13 utusan, ditambah dengan golongan minoritas (Belanda, Cina dan Timur Asing) ada 15 orang dan beberapa tokoh masyarakat yang lain, Konperensi Denpasar berjumlah 70 orang.

Konperensi dibuka oleh Gubernur Jendral van Mook pada tanggal 18 Desember 1946. Inti pidato van Mook menekankan bahwa pemerintah Belanda senantiasa berusaha secara hukum untuk membawa bersama-sama semua bagian Indonesia, atas jaminan untuk mempertahankan karakternya masing-masing dalam suatu negara (*Penyuluh Bali*, 20 Desember 1946). Sebanyak 36 dari 70 utusan yang hadir menyatakan sepakat untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur (NIT). Sedangkan yang lainnya, terang-terangan ada yang mendukung negara Republik Indonesia. Antara lain adalah Ajuba Wartabone dan Tom Ollie (Sulawesi Utara), J. Tatengkeng (Sangihe Talaud), Inchi Muhammad Dachlan (Sulawesi Tengah), E.U. Pupella (Maluku Selatan), I Gusti Bagus Oka (Bali), dan Lalu Serinata (Lombok) (Gde Agung, 1985: 140-150).

## **LAHIRNYA NEGARA INDONESIA TIMUR**

Pihak pemerintah Belanda selalu gemar melakukan berbagai pertemuan, konperensi atau perundingan, dengan harapan bisa melemahkan berdirinya Republik Indonesia. Misalnya tentang Perjanjian Linggarjati<sup>2[1]</sup> yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir dari pihak Indonesia dan Prof. Dr. Ir. Schermerhorn dari pihak Belanda. Linggarjati telah menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Karena hal ini, van Mook seminggu terlambat datang pada Konperensi Denpasar.

Sejak awal, 'Negara Timur Besar' yang sudah diganti namanya menjadi Negara Indonesia Timur (NIT) dengan van Mook sebagai arsiteknya. Proses pembuatan Rencana Peraturan Pembentukan NIT berasal dari rumusan hasil karya pegawai pamongpraja Hindia Belanda. Persamaan korps *binnenlands bestuur* (BB) ini telah menimbulkan kecurigaan bahwa korps BB ini tujuannya hanya untuk melindungi kepentingan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Perdebatan pun semakin seru, yaitu mereka yang tetap menginginkan Negara Republik Indonesia melawan Negara Federal.

Tetapi perdebatan ini diabaikan dan konperensi tetap melanjutkan ke agenda pemilihan kepala negara dan penetapan sumpah kepala negara. Diajukan tiga orang calon kepala negara: Cokorda Gde Raka Sukawati dari Bali, Tajuddin Noor dari Sulawesi Selatan dan Najamuddin Daeng Malewa dari Sulawesi Selatan.

---

2[1] Linggarjati kota kecil di bawah gunung Ceremai, dekat Cirebon, Jawa Barat. Pokok rencana Persetujuan Linggarjati a.l. 1. pemerintah Belanda mengakui secara de facto pemerintahan Indonesia atas pulau Jawa, Madura dan Sumatra. 2. pemerintah Belanda bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan berdirinya Negara Indonesia Serikat. 3. Adapun yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat meliputi Republik Indonesia, Borneo dan de Groote Oost (Gde Agung, 1995).

Pada pemilihan Kepala Negara Indonesia Timur tanggal 24 desember, 1946, telah terpilih Cokorda Gde Raka Sukawati dan Nadjamoedin Daeng Malewa yang menjadi Perdana Manteri merangkap Menteri Perekonomian (W.A. van Goudoever, 1947:62-64, *Penyuluh Bali*, 10 Januari 1947).

Daeng Malewa membentuk kabinetnya dalam 9 kementerian saja (Perekonomian, Urusan Dalam Negeri, Kehakiman, Keuangan, Pendidikan, Penerangan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sosial). Dalam menjalankan fungsinya, kabinet mendapat hambatan pada sistem kekuasaan yang dualistis, yaitu kekuasaan pemerintah Hindia Belanda secara *de facto* dan *de jure* terhadap NIT. Seperti telah diputuskan dalam Konperensi Denpasar, pembagian wilayah sama seperti pemerintah Hindia Belanda dulu. NIT dibagi dalam lima karesidenan (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Bali dan Lombok). Tiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen berstatus sebagai korps BB, dibagi menjadi *afdeling* (daerah bagian) yang dikepalai oleh asisten residen, kemudian *onderafdeling* (daerah sub bagian) yang dikepalai oleh seorang kontrolir. Kesulitan lain ialah bagaimana sulitnya mencari orang untuk jabatan teras tinggi. Tak banyak tokoh professional di kawasan *Borneo en Groote Oost*, kecuali di pulau Jawa atau Sumatra.

NIT berusaha untuk mengadakan demokratisasi dalam pemerintahan, sesuai dengan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Misalnya di Bali, pemerintah swapraja bertanggungjawab pada Dewan Swapraja sebagai pencerminan aspirasi rakyat. Pembaruan ini tampak terjadi di Bali yaitu 8 swapraja yang menggabungkan diri menjadi Dewan Raja-Raja memilih Ketua Dewan Raja yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sedangkan dewan legislative dipilih oleh rakyat yang kemudian disebut Paruman Agung. Tugas Paruman Agung ialah membuat undang-undang serta menjalankan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Di Sulawesi Selatan sejak dulu adalah daerah swapraja. *Hadat Tinggi* bertindak sebagai Badan Pemerintahan Harian yang diketuai oleh seorang raja. Raja Bone dianggap sebagai raja terkemuka di Sulawesi Selatan. Penjaga tata tertib dan keamanan adalah polisi. Tanggungjawabnya kepada Menteri Urusan Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman (Gde Agung, 1985:218-222).

Sejak semula, NIT lahir dari gagasan Konperensi Malino dan Persetujuan Linggarjati yang menghendaki terbentuknya NIS yang merdeka dan berdaulat berdasarkan demokrasi dan federal. Dalam sistem federasi, meski NIT adalah satu negara bagian dari NIS, tetap mendapat kebebasan penuh untuk mengembangkan daerahnya. Yaitu menggali semua sumber alam dan kekayaan daerah untuk pembangunan daerahnya. NIT memiliki potensi yang cukup untuk membiayai rumahtangganya sendiri.

Tetapi pergolakan politik dan intervensi pemerintah Belanda telah merusak

citra persatuan dari NIT. Hal ini tampak dalam sidang-sidang BPS (Badan Perwakilan Sementara) dengan tiga aliran yang berbeda. Ada Fraksi Progresif yang pro republik dan disebut sebagai kelompok oposisi, ada kelompok yang menamakan dirinya sebagai Fraksi Pembangunan dan kelompok ketiga yang dianggap netral. Kelompok oposisi akhirnya berhasil membubarkan kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa yang baru berjalan enam bulan lamanya (13 Januari 1947 – 2 Juni 1947). Ketua BPS Tadjoeeddin Noor dianggap lemah.

Jabatan Ketua BPS yang banyak diinginkan oleh beberapa calon -- Sondang Daeng Mattajang, H. Wenas dan Mohamad Kaharoeddin -- akhirnya berhasil direbut oleh Kaharoeddin. Fraksi Profresif tidak setuju dan melapor kepada van Mook dan Komisaris Mahkota Kerajaan Belanda, Dr. M. Brouwer. Ricuh politik ini tetap berlanjut dan dibentuklah kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa yang kedua (2 Juni 1947 – 11 Oktober 1947). Jumlah kementerian menjadi 10 ditambah dengan 3 orang menteri negara.

Karena penandatanganan Perjanjian Linggarjati (antara Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Komisaris Jenderal W. Schermerhorn) mempunyai arti penting bagi terbentuknya NIT, Perdana Menteri Nadjamoedin Daeng Malewa menganggap penting untuk mengangkat seorang Kepala Perwakilan NIT untuk Jakarta (M. Pellaupesy). Tetapi Kepala Perwakilan NIT dianggap kurang aktif kerjanya, misalnya sedikit sekali mengirim laporan tentang situasi politik di Jakarta, terutama tentang perundingan-perundingan antara Indonesia – Belanda.

Padahal, pada pertengahan Juli 1947, perundingan Indonesia – Belanda berada dalam situasi sangat kritis. Oleh partai-partai politik di Yogya, Syahrir dianggap terlalu banyak memberi konsesi politik. Syahrir jatuh dan dia digantikan oleh Amir Syarifuddin. Dalam perundingan dengan Belanda, Amir mengalami jalan buntu dan gagal. Ketidak-berhasilan ini menyebabkan pihak Belanda melakukan aksi militer yang pertama (20/21 Juli 1947). Angkatan Perang Belanda menduduki sebagian daerah di Jawa Timur dan daerah ekonomi di Sumatra (Sumatra Selatan, Deli, Palembang dan Jambi).

Tindakan agresi militer Belanda ini sangat mengejutkan bagi pimpinan NIT. Perdana Menteri Nadjamoedin Daeng Malewa berangkat dari Makasar ke Jakarta untuk menemui van Mook. Sekembali dari Jakarta, Malewa melapor kepada Presiden Sukawati. Keesokan harinya, mereka -- Sukawati dan Malewa -- mengeluarkan pengumuman yang kontroversial. Bahwa pemeritnah NIT menyetujui serangan Belanda tersebut. Juga menentang keras turut campur tangan pihak luar, baik Dewan Keamanan PBB dan pihak asing lainnya.

Deledasi Presiden Sukawati kemudian berangkat ke Lake Success di California. Tetapi kehadiran mereka ditolak oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan bahkan mengeluarkan seruan untuk menghentikan aksi militernya. Sekembalinya Sukawati ke Makasar, kota tersebut sedang heboh tentang skandal tekstil. Perdana

Manteri Malewa sedianya membeli 55.000 yards tekstil untuk Idul Fitri. Tetapi umat Islam hanya boleh membeli 1000 yards dan sisanya dijual ke pasar gelap. Perdana Menteri yang merangkap Menteri Perekonomian, dianggap melakukan KKN dan jatuhlah Malewa.

Kabinet baru ialah Kabinet Warrow yang hanya tiga bulan usianya. Tak banyak beda dalam hubungannya dengan pemerintah Belanda, Perdana Menteri Warouw dan Menteri Kehakiman R.S. Soumokil tidak tegas mengutuk aksi militer Belanda dan skandal tekstil. Tentu saja hal ini menimbulkan banyak kritik. Warouw pun jatuh.

Kemudian dibentuk kabinet Ida Anak Agung Gde Agung. Kabinet koalisi ini cukup panjang usianya (15 Desember 1947 – 27 Desember 1949), karena mewakili hampir semua fraksi yang ada di BPS. Tujuan utamanya ialah:

1. Sebelum 1 Januari 1949, NIS diupayakan secepatnya terbentuk.
2. NIT merupakan salah satu bagian dari NIS yang merdeka dan berdaulat.
3. NIT menganggap sistem federal yang paling cocok dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menjamin kehidupan politik, kebudayaan dan sosial di masing-masing daerah.
4. Dalam proses pembentukan NIS, NIT ingin berperan secara aktif bekerja sama dengan pemerintah RI (Gde Agungm 1985:354-357).

Kerjasama yang baik antara Pemerintah NIT dan BPS, membuahkan usul agar BPS mengirim satu misi persaudaraan resmi ke daerah RI dengan tujuan untuk mengetahui situasi politik di Yogyakarta. Perdana Menteri NIT Ida Anak Agung Gde Agung dan Perdana Menteri RI Mr. Amir Syarifuddin bertemu di Jakarta pada Januari 1948. Agar pertemuan ini dapat ditingkatkan pada taraf resmi, diharapkan pula pengakuan resmi dari kedua belah pihak. Dua minggu kemudian, datang dari pihak Pemerintah RI yang mengutus Mr. Hermani dan Mr. Latoeharhary untuk menyerahkan surat pengakuan resmi Pemerintah RI terhadap Pemerintah NIT kepada Perdana Menteri Ida Anak Agung Gde Agung yang masih berada di Jakarta. Pemerintah NIT segera membentuk Misi Parlemerter atau Misi Persaudaraan NIT yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh BPS (Ketua A. Mononutu, Dr. H. Bergema, Pastor A. Conterius, Andi Gappa, Andi Massarappi, Anak Agung Nyoman Pandji Tisna, A. Wartabine, Tjan Tjoen Tek). Misi berkunjung ke Yogyakarta pada bulan Februari 1948 dan Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta mengirim surat kepada Presiden NIT tentang keberhasilan Misi Parlemen NIT dan mempermaklumkan akan mengadakan kunjungan balasan. Misi Parlemen RI tiba di bulan Desember di Makasar.

Bersamaan dengan itu, di Kaliurang, Yogyakarta, tengah berlangsung perundingan antara Pemerintah RI yang diketuai oleh Moh. Hatta dan Delegasi Tingkat Menteri Belanda, Menteri Urusan Daerah Seberang E.W.J.A. Sassen,

Menlu D.U. Stikker dan Menteri Negara Neher. Pemerintah Belanda mengalami kegagalan dalam perundingan tentang pembentukan Pemerintah Federal Sementara karena:

1. RI menolak usulan Belanda tentang masalah Angkatan Perang Belanda (APB) yang ada di Indonesia. Pihak Belanda berpendapat APB sebaiknya bisa dipergunakan dalam keadaan darurat.
2. RI menolak permintaan Belanda agar TNI dibubarkan dan diganti dengan APF (Angkatan Perang Federal).

Atas kegagalan tersebut, anggota Komisi Tiga Negara (KTN) Merle H. Cochran sangat kecewa dan mendesak agar Bung Hatta mau berunding di Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia. Perundingan lagi-lagi mengalami kegagalan.

Gagalnya perundingan tersebut membawa pengaruh politik di kalangan anggota BPS NIT dan mengusulkan hendaknya pembentukan Pemerintah Federal Sementara ditinjau kembali. Kemudian Fraksi Progresif dan Fraksi Nasional mengadakan rapat gabungan dan memutuskan agar NIT tidak ikut dalam pembentukan Pemerintah Federal Sementara (Gde Agung, 1985:446-447).

Akhirnya, Belanda sekali lagi mengadakan serangan militer ke Yogya (19 Desember, 1949). Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa tokoh lainnya ditahan Belanda dan diasingkan ke Bangka. Setelah itu, Belanda sesumbar bahwa Pemerintah RI tidak ada.

Perdana Menteri Ida Anak Agung Gde Agung mengundang anggota kabinetnya untuk berapat Dewan Menteri. Dikatakannya bahwa penyelesaian masalah Indonesia secara damai mustahil dapat dilaksanakan. Mengingat keadaan Indonesia yang sulit, Perdana Menteri Gde Agung menyatakan pengunduran diri.

Tetapi setelah berkonsultasi antara Presiden NIT Cokorda Gde Raka Sukawati dan para pemimpin fraksi dan aliran dalam BPS, pertemuan tanggal 31 Desember 1948, menunjuk kembali Ida Anak Agung Gde Agung untuk membentuk kabinet kembali (12 Januari 1949). Atas undangan Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr.L.J.M. Beel, pada sore harinya, Perdana Menteri Gde Agung berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat *Bijeenkomst Federaal Overleg* (BFO atau PMF - Pertemuan Musyawarah Federal). PMF juga dihadiri oleh Perdana Menteri Drees. Rapat dihadiri oleh semua kepala pemerintah negara-negara bagian dan daerah.

Dalam rapat itu, berkembang dua pendapat yang saling bertentangan. Pihak pertama berpendapat bahwa setiap usaha yang tidak disertai perundingan terlebih dahulu dengan wakil-wakil Pemerintah RI, tidak akan didukung oleh pemerintah NIT. Pendapat ini dicetuskan oleh Perdana Menteri NIT Gde Agung. Pihak kedua yang cenderung untuk mengikuti pikiran Wakil Tinggi Mahkota Belanda Beel, yaitu hendaknya dibentuk dahulu Negara Federal Sementara (NFS)

tanpa turut sertanya Pemerintah RI. Mereka yang cenderung setuju pada pendapat pihak kedua ialah Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat Sultan Hamid II, Wakil Negara Sumatra Timur Dr. Mansur, Wakil Negara Jawa Timur Achmad Kusumonegoro dan Wakil Sumatra Selatan Malik. Setelah melalui perdebatan panjang, usul pihak pertamalah yang menang.

Pada 7 Februari 1949, delegasi NIT yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gde Agung berangkat ke Bangka, untuk menemui para pemimpin RI yang sedang diasingkan. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Haji Agus Salim dan Leimena. Dalam pertemuan itu, beberapa kesepakatan telah dicapai:

1. Dalam menyelesaikan masalah Indonesia, Pemerintah RI meminta ikut sertanya Komisi PBB.
2. PMF harus mengakui status Pemimpin Indonesia yang diasingkan Belanda sebagai Pemerintah RI yang sah, dan bukan sebagai tokoh-tokoh pribadi.
3. Delegasi PMF akan melanjutkan hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin RI dimasa depan (Gde Agung, 1985:494).

Pergolakan politik tetap berlangsung antara pemerintah RI dan pemerintah Belanda dalam usaha pembentukan Negara Indonesia Serikat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Belanda antara lain mengutus Direktur Kabinet Dr. P.J. Koets ke Bangka menemui Soekarno dan Hatta untuk menjelaskan tentang konsepsi Belanda mengenai penyerahan kedaulatan yang dipercepat dan undangan untuk menghadiri Konperensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Pertemuan itu juga menemukan jalan buntu, masing-masing saling kukuh akan pendiriannya. Demikian pula undangan untuk NIT, Perdana Menteri Gde Agung bersedia datang asal Pemerintah Belanda mau mengikutsertakan wakil-wakil Pemerintah RI. Akhirnya, pada pertemuan PMF diputuskan untuk membentuk misi PMF ke Bangka. Misi tersebut terdiri dari Sultan Hamid II (Ketua), Ida Anak Agung Gde Agung (Wakil Ketua), Mr. Djumhana (Pasundan), Dr. Ateng (Jawa Timur), Kaliamsyah Sinaga (Sumatra Timur) dan Abdul Rivai (Banjar). Dari pihak RI hadir Ketua KNIP Mr. Assaat, Dr. Leimena, Haji Agus Salim, Mr. Roem, Prof. Mr. Dr. Soepomo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo dan Mr. Soejono.

Perdana Menteri NIT Gde Agung melaporkan di depan anggota BPS tentang pertemuan dan pembicaraannya dengan para pemimpin RI dan Misi PMF. Diusulkan bahwa sebelum Konperensi Meja Bundar, harus ada Konperensi Antar Indonesia di Yogyakarta.

### **KMB, RIS, PENYERAHAN KEDAULATAN**

Persetujuan Roem - Royen membuka jalan terlaksananya Konperensi Meja Bundar. Belanda setuju untuk menghentikan operasi militer, membebaskan semua tahanan politik dan dari pihak Indonesia setuju untuk menghentikan perang

gerilya dan bersedia bekerja sama untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban. Dengan dikembalikannya pemimpin RI yang ditahan di Bangka, pulih kembalilah martabat politik internasional Indonesia.

Sekembalinya dari Konperensi Antar Indonesia, Perdana Menteri NIT Gde Agung menyiapkan delegasi NIT ke Konperensi Meja Bundar (KMB). Mereka adalah Perdana Menteri Ida Anak Agung Gde Agung (Ketua), Menteri Pendidikan J.E. Tatengkeng (Wakil Ketua), Menteri Keuangan M. Hamelink (anggota), Ketua Fraksi Progresif A. Mononutu (anggota), Ketua Fraksi Nasional Andi Massarappi (anggota), Fraksi Progresif yang mewakili golongan swapraja Ngurah Ketut Djelantik dan Baoesat, Fraksi Progresif dari golongan minoritas Cina, Mr. Teng Tjing Leng, Fraksi Demokrat dan Fraksi Indo-Europees Verbond, R.C. Claproth dan Kepala Perwakilan Politik NIT di Jakarta, J. Tahya.

KMB dimulai sejak 23 Agustus sampai 2 November, 1949. Karena Perdana Menteri Anak Agung Gde Agung menjadi Ketua Delegasi, sebelum berangkat, Presiden NIT Sukawati menunjuk Menteri Kehakiman Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil sebagai Pejabat Perdana Menteri dan Menteri Pekerjaan Umum & Perhubungan Ir. D.O. Diapari sebagai Pejabat Menteri Urusan Dalam Negeri. Konperensi dibuka resmi oleh Perdana Menteri Belanda, Dr. W. Drees selaku Ketua Umum KMB.

KMB selesai pada tanggal 2 November 1949 dan menghasilkan tiga pokok persetujuan:

1. Piagam penyerahan Kedaulatan
2. Piagam Uni Indonesia-Belanda beserta lampiran-lampiran yang menyangkut masalah kerja-sama antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Belanda.
3. Persetujuan Peralihan yang memuat peraturan-peraturan yang bertalian dengan penyerahan kedaulatan.

Sekembalinya semua delegasi RI dan NIT dari negeri Belanda, atas permufakatan Pemerintah RI dan PMF dibentuklah panitia persiapan Penyerahan Kedaulatan yang disepakati akan berlangsung tanggal 27 Desember, 1949. Ketua panitia adalah Mr. Moh. Roem dan wakilnya Perdana Menteri NIT Anak Agung Gde Agung.

Persiapan yang paling mendesak adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 1949. Di hadapan semua undangan yaitu semua wakil-wakil dari RI dan NIT, rapat secara aklamasi memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS dan Drs. Mohamad Hatta sebagai Wakil Presiden RIS. Hari berikutnya, Ir. Soekarno menunjuk 4 orang untuk menyusun kabinet: Moh. Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX, Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II.

Tanggal 20 Desember telah terbentuk Kabinet RIS yang pertama. Terdiri dari 14 kementerian. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri (Moh. Hatta), Urusan Dalam Negeri (Anak Agung Gde Agung), Pertahanan (Sultan Hamengku Buwono IX), Keuangan (Mr. Syafrudin Prawiranegara), Kemakmuran (Ir. Djuanda), Perhubungan dan Pekerjaan Umum (Ir. H. Laoh), Kehakiman (Prof. Mr. Dr. Soepomo), Pendidikan (Dr. Abu Hanifah), Kesehatan (Dr. J. Leimena), Perburuhan (Mr. Wilopo), Sosial (Mr. Kosasih Purwanegara), Agama (K.H. Wahid Hasjim), Penerangan (A. Mononutu), Menteri Negara (Sultan Hamid II, Mr. Moh. Roem dan Dr. Soeparmo).

Pada tanggal 27 Desember 1949, dinegeri Belanda berlangsung upacara Penyerahan Kedaulatan. Dari pihak RIS diwakili oleh Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta dan dari pihak Belanda diwakili oleh Perdana Menteri Dr. W. Drees. Di Jakarta, di *Koningsplein Paleis* (Istana Gambir, kini Istana Merdeka) dilakukan upacara yang sama. Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil dari RIS dan Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, Dr. A.H.J. Lovink. Tanggal 30 Desember, 1949, RIS diterima sebagai anggota ke-60 PBB (Gde Agung, 1985:681-687).

## **MATINYA NEGARA INDONESIA TIMUR**

Bertepatan dengan hari ulang tahun ketiga NIT, Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri Urusan Dalam Negeri Anak Agung Gde Agung dan rombongan berkunjung ke Makasar. Pada kesempatan itu, Anak Agung Gde Agung menyatakan pengunduran diri kepada Presiden NIT Sukawati karena telah diangkat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri di RIS.

Presiden NIT Sukawati kemudian mengangkat Menteri Pendidikan J.E. Tatengkeng menjadi Perdana Menteri dengan membentuk kabinet baru. Kabinet dengan 9 orang menteri telah terbentuk. Gejolak politik muncul sebagai akibat Penyerahan Kedaulatan. Yaitu dengan dibebaskannya tahanan para pejuang kemerdekaan yang ditawan oleh Nica di tahun 1946. Muncul masalah pro dan kontra penjajahan, yang berarti juga pro dan kontra pembentukan NIT.

Meski untuk menjaga keamanan telah dibentuk Komisi Militer Teritorial yang dipimpin oleh Ir. J. Putuhena dan dibantu perwira-perwira APRIS seperti Letkol. Mokoginta, tidaklah mudah untuk mengendalikan para pejuang yang jiwa mereka sangat kontra penjajahan.

Pada tanggal 2 Maret 1950, Presiden Sukawati mengambil sumpah Ketua dan Wakil Ketua Badan Perwakilan Rakyat (BPR), hasil pemilihan umum. Tetapi corak dan susunan BPR hasil pemilu terakhir berbeda dengan pemilu sebelumnya. Karena banyak anggota baru yang cenderung menganut paham pro republik dan menginginkan terbentuknya negara kesatuan. Jadi pertikaian antara golongan unitaris dan golongan federalis semakin seru. Karena itu, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di NIT, kabinet J. Tatengkeng (27 Desember 1949 – 14

Maret 1950) demisioner.

Kabinet-kabinet berikutnya juga hanya bisa bertahan beberapa bulan saja. Ir. D.P. Diapari yang semula Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan, ditunjuk Presiden NIT Sukawati untuk membentuk kabinet baru. Diapari kebetulan adalah pendukung azas federalis. Tentu saja hal ini tidaklah mudah baginya untuk membentuk kabinet koalisi. Misalnya, salah satu fraksi yang cukup kuat, Fraksi Kesatuan Nasional, menghendaki agar kabinet secara mutlak harus mempunyai program mutlak yaitu pembubaran NIT! Tentu saja Presiden Sukawati menolak hal ini.

Diapari kemudian membentuk kabinet dari tiga fraksi saja. Fraksi Nasional Progresif, Fraksi Kerakyatan dan Fraksi Sosialis. Kabinet hanya terdiri dalam 8 kementerian saja. Sementara itu, pertentangan antara unitaris (golongan yang menginginkan agar NIT bubar) dan golongan federalis (golongan yang menghendaki agar NIT tetap eksis dan menjadi negara bagian RI) semakin meruncing. Sulawesi Selatan semakin kacau. Kabinet Diapari hanya bertahan dua bulan saja.

Keadaan kacau ini dipertajam setelah Presiden RIS Ir. Soekarno pada tanggal 8 Maret 1950 menunjuk pada Undang-Undang Darurat yang baru disahkan, membubarkan negara-negara Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura dan Pasundan. Mereka menyatakan untuk bergabung kepada Negara Republik Indonesia. Pada awal April, kembali Presiden RIS Ir. Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa negara Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Barat, daerah-daerah Banjar, Dayak Besar, Bangka, Riau dan Belitung dibubarkan dan semuanya menyatakan bergabung dengan Negara Republik Indonesia.

Perkembangan politik seperti ini sangat mendorong golongan unitaris untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Yaitu membubarkan Negara NIT dan membentuk Negara Kesatuan RI. Ketegangan politik memuncal ketika meletus peristiwa Andi Aziz pada tanggal 5 April, 1950. Peristiwa ini telah membuat kabinet Diapari jatuh.

Dalam situasi yang gawat itu, 13 April 1950 Presiden NIT Sukawati memanggil rapat para Menteri, Ketua Parlemen, Kapten Andi Aziz. Dalam rapat tersebut hadir pula Kepala Badan Pengawas Keuangan Matekohy dan Jaksa Agung Soumokil. "Plan Matekohy" menyatakan bahwa sebaiknya NIT melepaskan diri dari RIS, kemudian membentuk sebuah negara baru yang merdeka. Kebetulan ada pula seorang Gijberts, Kepala Staf Komandan Teritorial Pasukan Belanda untuk Indonesia Timur. Gijberts tahu kalau "Plan Matekohy" gagal dan pergilah dia ke Manado. Tetapi di Manado, Gijberts konflik dengan pasukan KNIL. Pergilah Gijberts ke Ambon. Karena Soumokil sedang berada di Ambon, Gijberts merencanakan bantuan pasukan KNIL untuk Republik Maluku Selatan (RMS). Malam hari pada tanggal 24 April 1950, J. Manuhutu sebagai Presiden dan

Mr. Dr. Ch. R. S. Soumokil sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri memproklamasikan RMS

Sementara itu, situasi di Makasar mengalami perubahan drastis. Pasukan Andi Aziz pada 19 April 1950 menyerah secara resmi kepada Komandan APRIS. Ketika Batalyon Worang mendarat di Makasar, tak ada perlawanan dari pasukan Andi Aziz.

Tetapi ketika timbul peristiwa RMS, di kota Makasar situasi semakin memanas. Karena bekas tentara KNIL yang anggotanya kebanyakan dari suku Ambon, konflik dengan para pemuda yang dibantu oleh APRIS. Konflik semakin menjadi-jadi di Makasar dan ketika situasi tak dapat lagi dikendalikan, Perdana Menteri NIT Diapari mengundurkan diri. Presiden NIT Sukawati menunjuk Poepella untuk membentuk kabinet. Tapi Poepella tak berhasil. Sukawati akhirnya menunjuk Ir. J. Putuhena. Sementara Presiden NIT Sukawati berada di Jakarta (dan konon tak pernah kembali lagi ke Makasar), jabatan Presiden NIT dipegang oleh Ketua BPR NIT, Hoesain Poeang Lamboro.

Putuhena dengan jumlah menteri yang semakin sedikit (enam orang) sama sekali tidak bisa melaksanakan tugasnya. Sampai Mei 1950, persetujuan antara laskar pemuda vs. suku Ambon bekas tentara KNIL semakin menjadi-jadi. Sejak 5 – 8 Agustus terjadi pertempuran hebat dan banyak memakan korban sehingga hal itu disebut “peristiwa Makasar.”

Tanggal 6 Agustus, pesawat pembom AU-RIS yang berpangkalan di Mandai (dekat Makasar) membom tangsi-tangsi ex KNIL. Pihak Belanda membalas. Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda Dr. Hirchefeld memberi perintah untuk segera mengirim kapal perang ‘*Kontenair*’ ke Makasar untuk melindungi warga negara Belanda di wilayah itu. Tanggal 8 Agustus 1950 kapal perang berlabuh di pelabuhan Makasar. Pemerintah RIS mengeluarkan protes keras atas kehadiran kapal perang tersebut. Hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan KMB.

Sementara itu pada pertengahan Juli, panitia penyusun UUD Sementara Negara Kesatuan -- yaitu peleburan antara pemerintah RIS di Jakarta dan pemerintah RI di Yogyakarta -- telah selesai. Tanggal 20 Juli hasil karya mereka diserahkan kepada Perdana Menteri Dr. A. Halim di Jakarta dan Perdana Menteri Moh. Hatta di Yogyakarta. Baik Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Senat di Jakarta maupun Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia di Yogyakarta, telah menyetujui dan mensahkan Rencana UUD Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 15 Agustus 1950, dihadapan sidang DPRS dan Senat di Jakarta, Presiden Soekarno memproklamasikan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sore harinya, Presiden Soekarno pergi ke Yogyakarta untuk

membubarkan Republik Indonesia (RI). Bersamaan dengan itu, Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta menyatakan pengunduran diri dan bubarkan Kabinet Hatta.

Tanggal 16 Agustus 1950, Perdana Menteri NIT Ir. J. Putuhena dan seluruh kabinetnya di Makasar meletakkan jabatan. Demikian pula Badan Perwakilan Rakyat (BPR) NIT menyatakan pembubaran. Secara otomatis, apa yang namanya Negara Indonesia Timur (NIT) masuk menjadi bagian dari NKRI.

## KESIMPULAN

Setelah Jepang kalah dan menyerah, datanglah pasukan Sekutu ke Indonesia. Tugas mereka adalah melucuti senjata bala tentara Jepang, dan secepatnya tentara Sekutu harus memulangkan mereka ke Jepang. Tetapi apa yang tentara Sekutu dapati ialah bahwa Hindia Belanda yang kini berganti nama menjadi Indonesia telah diproklamirkan kemerdekaannya.

Pasukan Sekutu saat itu mendapatkan bahwa:

1. Indonesia belum memiliki Angkatan Perang yang kuat.
2. Sistem pemerintahan pada masa kolonial masih melekat pada golongan elite birokrasi tradisional, misalnya system pemerintahan kerajaan, dan hal ini mempermudah Belanda (dalam hal ini van Mook) untuk memecah-belah Indonesia dalam bentuk negara federal.
3. Alat 'politik adu domba' (*divide et impera*) digunakan dengan dalih berbagai konperensi dan diplomasi.
4. Situasi dan kondisi Indonesia waktu itu dijadikan alasan. Misalnya dari faktor geografis (letak pulau-pulau besar dan kecil) yang tersebar luas dan faktor kebudayaan yang beragam (adat istiadat, bahasa, agama, etnik) telah menjadikan alasan Belanda mengapa Indonesia sebaiknya menjadi negara yang bercorak federalistis.

Untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat, Indonesia harus memperkuat diri di bidang militer dan di bidang pendidikan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing di era kesejagatan dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ida Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indoensia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Persetujuan Linggarjati: Prolog & Epilog*. Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara & Sebelas Maret University Press, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Conclusies en Resoluties der Conferentie te Malino*. Uitgave van het Algemeen Regeeringscommisariaat voor Borneo en de Grote, (tanpa tahun).
- Day, Clive, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*. London, Oxford University Press, 1966.
- Goudoever, W.A. van, *Denpasar, Bouwt een Huis*. Batavia, Regeerings voorlichtings Dienst, 1947.
- Joeniarto SH, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta, PT Bina Aksara, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Naar de Nieuwe Rechtsorde in Indonesie: Bouwstoffen voor de Federatie*.  
Deel 1, Algemeen Overzicht. Samengesteld ten Behoeve van de Federale Conferentie te Bandung, 1948.
- Mook, H.J. van, *Indonesie Nederland en de Wereld. Amsterdam, de Bezige Bij, 1949*.
- Putra Agung, Anak Agung Gde, *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2001.

dan sekitar sembilan buku peraturan pemerintah Indonesia dan Belanda serta harian *Penoeloh* Bali dari tahun 1948 –1947.

## BUKU

### PEPERA DI IRIAN JAYA VERSI BELANDA

Beberapa orang Belanda semula mempunyai rencana untuk memisahkan West Nieuw Guinea dari Indonesia. Alasan Belanda (yang tersembunyi) ialah kawasan ini mempunyai prospek pertambangan yang dari segi ekonomi akan sangat menguntungkan.

*Een Daad van Vrije Keuze. De Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht*

Penulis: P. J. Drooglever

Penerbit: Institute voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag dan Amsterdam, Boon, 2005.

Tebal : 807 hlm, gambar dan peta

Peresensi : Adrian B. Lopian<sup>1)</sup>

Sebagai sejarawan yang paling menguasai sumber arsip Belanda tentang hubungan politik antara kedua negara ini – termasuk periode 1950-1963 yang menyangkut masalah Irian Barat/Jaya – pemerintah Belanda menugaskan Dr. Drooglever untuk mengadakan penelitian tentang proses sejarah seputar ‘Act of Free Choice’ tahun 1969. Penugasannya berawal dari permintaan beberapa anggota Parlemen Belanda pada bulan Desember 1999 kepada Menteri Luar Negeri agar diadakan studi ilmiah tentang masalah ini, sebuah studi independen yang tidak memihak. Menteri bersangkutan segera mengambil tindakan dan meminta kepada *Instituut voor Nederlandse Geschiedenis* (Lembaga Sejarah Belanda) untuk melaksanakan penelitian tersebut, yang kemudian dipercayakan kepada penulis buku yang sedang dibicarakan sekarang.

Kepadanya diberi kebebasan penuh untuk menggunakan semua arsip Kementerian Luar Negeri Belanda. Kementerian ini juga membantunya dalam upayanya untuk mengakses arsip-arsip lain di dalam mau pun di luar negeri sehingga arsip Amerika Serikat, Australia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memperkaya informasi tentang topik bersangkutan. Telah diusahakan untuk mempelajari arsip Indonesia, namun pada tahun 2002 permohonannya ditolak pemerintah kita. Dengan demikian informasi tentang seluk beluk internal Indonesia terbatas pada studi laporan-laporan para dutabesar Australia dan Amerika Serikat yang bertugas di Jakarta pada waktu itu yang mereka kirim ke Canberra dan Washington, D.C. Di samping itu digunakan pula penerbitan resmi

---

1) Sejarawan, Profesor emeritus Universitas Indonesia dan kini bermukim di Manado, Sulawesi Utara.

Departemen Luar Negeri RI yang berjudul *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa* yang terdiri dari lima jilid (1996). Dalam jilid 2 dipaparkan permasalahan sekitar sengketa Irian Barat. Juga dilengkapi dengan sumber lain, misalnya penerbitan memoir Subandrio yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri luar negeri, lagi pula memanfaatkan sumber sejarah lisan (*oral history*), baik yang diperolehnya sendiri mau pun yang pernah dilakukan pewawancara lain terdahulu. Perlu ditambahkan bahwa sejak awal dinyatakan bahwa Menteri yang menugaskannya tidak akan bertanggungjawab atas karya yang dihasilkan agar sifat ilmiahnya bisa terjamin.

Bermodalkan begitu banyak sumber primer, Prof. Drooglever telah menghasilkan sebuah buku tebal sebanyak 807 halaman. Mengenai masalah inti seperti yang disebut pada judul buku dipaparkan dalam dua bab terakhir (bab 13 dan 14), terdiri dari 82 halaman, sekitar 11.5 % dari seluruh teks. Lebih dari 80 % menyangkut masa sebelumnya sehingga karya ini sesungguhnya merupakan sebuah buku sejarah Papua sejak penduduknya berhubungan dengan pendatang dari Eropa Barat pada abad ke-16.

Bagi generasi yang berusia sekitar 70-an tahun yang mengalami masa 1950-1963 sebagai sejarah yang dilewati sendiri (*histoire vécue*), hasil penelitian yang dimuat dalam buku ini banyak menjelaskan persoalan yang dulu kurang dipahami serta memberi data baru yang dulu tidak diketahui. Tambahan detail juga memberi nuansa baru terhadap bentuk citra yang lama. Misalnya, perkembangan perdebatan dalam Parlemen Belanda, perimbangan dan pergeseran kekuatan partai-partai politiknya, bahkan juga pertentangan pendapat internal dalam partai politik itu sendiri. Berhubung kekurangan sumber Indonesia, perdebatan politik di Indonesia sendiri kurang disoroti. Ada sedikit disebut tentang perbedaan pendapat antara Bung Hatta dan Bung Karno, dan di masa menjelang 1969 buku ini memaparkan perbedaan pendekatan antara Adam Malik dan Sudjarwo Tjondronegoro terhadap penyelenggaraan *Act of Free Choice* ini.

## **DARI SABANG SAMPAI MERAUKE**

Kesatuan Indonesia yang pada abad ke-19 pernah dinyatakan oleh Multatuli dengan ungkapan 'untaian zamrud' (*gordel van smaragd*) dan yang kemudian di sekolah-sekolah ciptaan Hindia-Belanda diajarkan sebagai sebuah wilayah 'dari Sabang sampai Merauke', dalam proses dekolonisasi dipereteli dengan mengajukan pelbagai macam pertimbangan. Dr Lijphart dalam bukunya yang terkenal mengenai 'trauma dekolonisasi' mengajukan beberapa faktor 'subyektif dan irasional' yang pada waktu itu mewarnai sikap Belanda, pendapat yang juga diakui oleh penulis buku (hlm. 147), yakni (kami terjemahkan bebas) 'chauvinisme [Belanda] yang dilanda frustrasi, keyakinan bahwa dirinyalah yang benar, dan keengganan untuk menerima situasi baru di Indonesia' – faktor-faktor yang ketika itu sering mempengaruhi pendapat dan tindakan (pemerintah) Belanda.

Di Malino (Juli 1946) tempat Belanda mengadakan muktamar sebagai langkah pertama ke pembentukan negara-negara federal, Papua masih dianggapnya sebagai bagian Indonesia. Mewakili Papua adalah Frans Kaisiepo dan Dr. Victor de Bruijn, seorang pegawai pemerintah Hindia-Belanda. Pada kesempatan ini Kaisiepo telah mengintrodusir nama 'Irian', suatu tindakan yang oleh Van Eechoud (kepala pemerintah West New Guinea) dianggap telah melampaui kompetensi wakil Papua tersebut. Maka pada konperensi berikutnya di Pangkal Pinang (Oktober 1946) dan Denpasar (Desember 1946) tak ada wakil dari daerah ini. Alasan yang diberikan pemerintah bahwa tidak ada orang yang 'pantas' untuk dikirim (hlm. 123). Dapat dipahami bahwa utusan dari sebuah organisasi seperti *Komite Indonesia Merdeka* (KIM) yang muncul dalam bulan November 1946 tentu saja tidak bisa dipertimbangkan untuk ikut serta walau pun mereka ingin hadir di Denpasar ketika Negara Indonesia Timur dibentuk (hlm. 98). Perlu dicatat bahwa terpisahnya Papua dari NIT telah mendapat kritik keras pada konperensi tersebut (hlm. 131).

Di waktu itu beberapa kalangan Belanda memang sudah mempunyai rencana untuk memisahkan daerah ini. Kenyataan bahwa akhirnya nanti Belanda harus keluar dari Indonesia, maka West New Guinea hendak disediakan sebagai daerah transmigrasi bagi kaum Indo-Belanda di Jawa yang tidak mau berada di bawah pemerintah RI tapi juga tidak akan betah di negeri Belanda. Ada pula pertimbangan politik militer, mengingat posisi pulau ini yang strategis di Samudra Pasifik tempat Belanda mungkin masih bisa berperan. Namun alasan yang paling banyak dikemukakan adalah bahwa penduduk Papua 'belum matang untuk menentukan nasibnya sendiri' (hlm. 170). Pertimbangan-pertimbangan ini melatarbelakangi pendirian Belanda pada Konperensi Meja Bundar (1949) sehingga Irian Barat dikecualikan dari keputusan KMB. Sebagaimana diketahui, yang paling ngotot ketika itu adalah menteri J.H. van Maarseveen. Pada hlm. 148-152 dapat kita baca bahwa Van Maarseveen masih mempunyai alasan lain yang 'tersembunyi': ada berita rahasia dari Hollandia bahwa prospek pertambangan nikel dan kromium di daerah ini menjanjikan ekonomi yang menguntungkan!

Sering juga diberi alasan bahwa secara fisik orang Papua tidak sama dengan orang Indonesia, sebab itu patut dipisahkan dari RI. Pendapat demikian rupanya menganggap bangsa Indonesia terbatas pada satu bentuk fisik saja, bukan suatu bangsa yang multirasial. Di belahan timur Nusantara, bentuk fisik orang Indonesia bermacam-macam, termasuk yang fisik serupa dengan Papua. Ada indikasi bahwa percampuran ras di kawasan ini sudah terjalin berabad-abad lamanya, jauh sebelum kedatangan orang Eropa, malahan juga sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Ternate dan Tidore. Sebuah legende yang dicatat António Galvão (1544), gubernur Portugis di Ternate, bercerita tentang empat telur yang melahirkan tiga laki-laki dan satu perempuan, masing-masing kemudian menjadi raja – yang laki-laki menjadi raja Bacan, Papua, dan Butun-Banggai, sedangkan sang puteri

menjadi raja Loloda (Halmahera). Juga sebuah kronikel Bacan yang dicatat oleh Dr. W.Ph. Coolhaas (1923) menyinggung adanya hubungan dengan Papua pada masa sebelum Ternate dan Tidore muncul dalam sejarah. Kesan yang menarik dari kisah-kisah tradisional tersebut adalah bahwa hubungan dengan Papua sifatnya setara, sama tinggi dan sama rendah, tidak seperti di masa kesultanan Tidore yang sewaktu-waktu mengadakan *honggi* ke tanah Papua untuk menarik upeti.

## PERAN INTEL

Kita meloncat ke tahun 1955. Pertemuan Indonesia-Belanda di Maison de la Presse, Jenewa, yang dimulai bulan Desember 1955 dan berakhir Januari 1956. Sesudah beberapa tahun masuk peti-es, masalah Irian Barat kembali dibicarakan atas usul Indonesia. Kita tahu kesudahannya – gagal total dan Uni Indonesia-Belanda yang dibentuk oleh KMB yang sesungguhnya tidak berfungsi, dibatalkan Indonesia secara unilateral. Hubungan diplomatik antara kedua negara diputuskan. Dalam sebuah wawancara dengan *Vrij Nederland* A.A. Gde Agung (Menlu dan pemimpin delegasi Indonesia pada perundingan itu) mengisahkan suasana konperensi. Betapa angkuh dan meremehkan sikap Menteri Luns, pemimpin delegasi Belanda, terhadap utusan Indonesia.

Yang tidak diketahui, dan yang baru terungkap dalam buku ini, adalah peran badan intelijen Belanda yang bukan saja memberi informasi yang tepat, tapi berhasil membaca semua telegram yang dikirim antara perutusan Indonesia di Jenewa dan pemerintah di Jakarta. Seperti kata pepatah Inggris, *knowledge is power*, maka pihak Belanda berada dalam kedudukan yang lebih kuat. Luns bersama kelompoknya mengetahui betul kelemahan delegasi Indonesia yang diutus oleh pemerintah di bawah Burhanuddin Harahap yang sedang goyah posisinya dan yang tak lama lagi akan diganti. Mereka tahu bahwa keputusan apa pun yang akan diambil oleh perundingan Jenewa tidak akan begitu mengikat dalam suasana politik Indonesia yang berubah-ubah (hlm. 224).

Bagaimana dengan kegiatan intel Indonesia? Mungkin sekali kita tak pernah akan memperoleh akses terhadap arsip-arsipnya, meski pun peristiwanya sudah separuh abad yang lalu. Ada buku Ken Conboy yang berjudul *Intel – Inside Indonesia's Intelligence Service* (2004), tapi sumber arsipnya tidak jelas. Prinsip politik keterbukaan sebagaimana berlaku di Amerika Serikat yang sewaktu-waktu mengungkapkan 'skandal CIA' seperti yang belum berapa lama berselang terjadi, bukan atau belum merupakan bagian dari budaya politik kita. Di masa Trikora ada kesan bahwa Intel kita kurang berfungsi. Paling tidak, pasukan relawan yang didrop di Irian Barat tidak diberi informasi tepat tentang situasi dan kondisi lapangan: di tempat mana saja mereka bisa mendapat dukungan masyarakat setempat, dan di mana akan menghadapi perlawanan. Ternyata hanya di beberapa tempat saja mereka dibantu masyarakat lokal. Sebagian besar pasukan ini tertangkap.

Caranya mudah, menurut arsip yang digunakan Drooglever. Di tiap pemukiman disediakan dua balok besar yang dicat putih. Jika penduduk melihat ada orang pendatang yang tidak dikenal, mereka menempatkan dua balok itu dalam posisi silang sehingga bisa diketahui pesawat udara yang berpatroli. Jadi Belanda segera dapat mengirim pasukan untuk menangkap para pendatang yang dicurigai (hlm. 353).

## PEPERA

Fokus buku adalah *Een Daad van Vrije Keuze* (Sebuah Tindakan Pilihan Bebas), dalam bahasa Inggris 'An Act of Free Choice' atau yang lebih dikenal di sini sebagai PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Tekanan diberi kepada kata pertama – *sebuah* – dengan kata lain, menurut penulis ada alternatif tindakan lain untuk menentukan pilihan bebas itu, misalnya yang lazim diadakan di negara Barat. Sebagaimana maklum, penentuan pendapat dicapai secara musyawarah lewat Dewan Musyawarah PEPERA (DMP), sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ada laporan tentang intimidasi, terutama dari pihak tentara. Namun dunia internasional umumnya lewat PBB -- kecuali beberapa negara Afrika yang mendukung aksi Nicolaas Jouwe -- menerima kenyataan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia (keputusan 19 November 1969).

Dalam dua bab terakhir kita membaca betapa kecewanya Ortiz Sanz, utusan istimewa PBB yang ditugaskan untuk menyaksikan pelaksanaan penentuan pendapat tersebut.. Kekecewaan ini diungkapkannya di Jakarta kepada para diplomat di kedutaan Amerika Serikat dan Belanda (a.l. halaman 679). Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan H. Amirmahmud dalam bukunya *Prajurit Pejuang (Otobiografi)*, Jakarta, PT Rora Karya Offset, 1987. Mungkin sekali Sanz sebagai diplomat menunjukkan sikap yang berbeda bila berhadapan dengan pejabat Indonesia, Belanda, dan Amerika. Dan Dr Drooglever rupanya hanya mempelajari aspek-aspek hubungan internasional sehingga tidak menggunakan memoar Amirmahmud yang sebagai menteri dalam negeri sangat berperan dalam PEPERA. Buku yang terbit pada tahun 1987 ini tentu saja sudah masuk dalam koleksi berbagai perpustakaan mancanegara.

Dalam otobiografi Amirmahmud tersebut secara lantang dikatakan (halaman 334-335) bahwa Presiden Suharto berpesan ketika melantiknya "...dan yang kemudian diulanginya beberapa kali" bahwa PEPERA adalah salah satu kewajiban internasional RI, namun "Presiden juga berpesan bahwa PEPERA jangan sampai gagal". Dalam melaksanakan pesan Presiden ini beliau berbeda pendapat dengan Sudjarwo Tjondronegoro SH yang waktu itu adalah Dutabesar RI di PBB dan yang "kurang menyetujui langkah-langkah persiapan yang saya ambil" yang menurut Sudjarwo "agak kurang sesuai dengan hukum Internasional". Tetapi wewenang terakhir ada di tangan Menteri Dalam Negeri yang berpendapat bahwa "masalah

PEPERA bukan saja menyangkut masalah hukum tetapi juga masalah perjuangan Bangsa. Kalau Pak Djarwo melihat bahwa masalah ini sebagai ahli hukum, maka saya melihatnya sebagai pejuang.... Saya berpendapat bahwa kita harus terang-terangan saja dalam masalah ini. Nampaknya Ortis Sans (*sic*) juga mempunyai pendirian yang moderat. Ia tidak ingin menimbulkan persoalan baru. Sikap Wakil PBB itu ternyata sangat membantu pelaksanaan PEPERA.” Sekian perbedaan presentasi tentang sikap utusan PBB tersebut. Drooglever mengutip dari dokumen tertulis, sedangkan Amirmahmud menarik kesimpulan dari sikap dan tindakan Sanz menurut pengamatannya.

Ada kesan bahwa pelaksanaan penerbitan buku ini agak tergesa-gesa. Kecermatan yang biasa kita kenal dari karya penulis sebelumnya – terutama penerbitan sumber arsip – tidak ditemukan sekarang, khususnya dalam hal editing. Beberapa kesalahan perlu disebut: pada hlm. 114 harusnya Negara Sumatera Timur, bukan ‘Sumatera Barat’! Terjemahan bahasa Belanda ‘Tri Komando Rakyat’ atau Trikora bukan *Drie Bevelen aan het Volk*, tapi *van het Volk* (hlm. 421), atau dalam bahasa Inggris, *The People’s Threefold Command*. Nama diplomat Indonesia adalah Umarjadi, bukan Umarjaid (hlm. 531, 539, index), dan jumlah jenderal yang dibunuh oleh Gerakan-30-September, adalah *enam* (ditambah seorang letnan), bukan delapan (hlm. 620)!

Sejak tahun 2000 nama Irian Jaya resmi menjadi Papua – suatu langkah yang bukan sekadar menyangkut perubahan nama saja, melainkan membuka banyak kemungkinan perkembangan baru. Dalam sebuah wawancara dengan *Newsweek* awal Maret 2006, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa kita harus mengubah paradigma sekuriti internal dan menempuh metode baru untuk menyelesaikan konflik dalam negeri, termasuk permasalahan di Papua Barat. Buku yang sedang dibicarakan ini mengandung banyak informasi tentang keadaan lokal, sejarah politik dan perkembangan masyarakat Papua. Dilengkapi dengan studi-studi ilmiah lainnya dalam bidang antropologi, misalnya, dan berdasarkan pengalaman kontak intensif sejak 1962, niscaya ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak, khususnya bagi kepentingan akar rumput masyarakat Papua sendiri.

Andrik Purwasito:<sup>1</sup>

## MENGGUGAT HISTORIOGRAFI INDONESIA

### PERSPEKTIF

**P**erjalanan menyusuri Tanah Air tercinta Indonesia, dari Jayapura di Papua sampai Nangro Aceh Darussalam memberi kesan amat mendalam di hati penulis. Decak kekaguman akan kebesaran Illahi yang telah memberikan kekayaan dan keindahan alam serta kebudayaan bagi bangsa Indonesia selalu menggigit kalbu. Namun bersamaan dengan kesan yang sangat luar biasa itu, di sisi lain muncul berbagai gejala pertanyaan yang tak pernah berhenti. Satu di antaranya adalah kenyataan ironis bagi bangsaku ini. Di satu pihak saya amat kagum di pihak lain saya prihatin dan kecewa sekali.

Mungkin anda juga memikirkan hal yang sama. Perang batin antara kenyataan dan cita-cita memang tak harus selalu sama. Tetapi kenyataan ini menyakitkan dan bahkan keterlaluhan. Cobalah kita renungkan, mengapa dengan kekayaan kita yang melimpah ruah itu justru kita menjadi bangsa yang banyak hutang?. Bagaimana mungkin dengan kekayaan dan keindahan alam itu kita masih tertimpa kelaparan? Sedih dan malu kita bahkan disebut-sebut orang asing sebagai bangsa yang terkorup di dunia. Apalagi mereka juga menyebut kita sebagai bangsa yang rendah daya saingnya, yang lemah secara politik dan ekonomi, bangsa yang barangkali hampir-hampir kehilangan *dignity*.

Lalu, apa yang sudah kita lakukan selama kita sudah merdeka lebih setengah abad? Apakah kita hanya berbangga telah berhasil mengusir penjajah? Atau kita hanya membanggakan kehebatan nenek moyang kita di masa lalu saja tanpa kita harus berbuat yang lebih baik? Apakah sekarang kita hanya bisa membuat tempe dan tahu saja, sementara teknologi telah maju demikian pesat, sumber daya manusia, sumber daya alam dan kekuatan kebudayaan yang dikenal sejak dahulu kala lalu menjadi potensi yang mati. Borobudur, Prambanan, Puncak Jaya Wijaya, Sriwijaya, Kutai, Serambi Mekah, hanyalah monumen yang bisu tanpa

#### <sup>1</sup> Pengantar redaksi

Andrik Purwasito adalah penyair dan sarjana hubungan internasional UGM yang pernah memperoleh pendidikan doktor di EHESS, Paris. Sepulang dari Perancis ia mengajar ilmu komunikasi di UNS Surakarta dan menjadi anggota KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Tulisan ini dimuat untuk menentang pandangan akademisi yang menganggap dirinya bukan sejarawan terhadap historiografi Indonesia dan himbauan agar sejarawan memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi bangsa. Andrik mengeritik istilah "pemberontakan" dalam sejarah Indonesia. Di sini katanya, "barangsiapa bertanya dianggap memprotes, barangsiapa memprotes dianggap pemberontak, barangsiapa pemberontak dianggap separatis". Siapa itu ?

kita mampu mencontohnya. Bikin pesawat terbang tidak berhasil, mau bikin mobil murah macet, mau bikin apalagi? Kita tidak boleh hanya mengengang dan membanggakan peradaban masa lalu dari nenek moyang kita yang terbukti mampu bersaing dengan pedagang asing di Goa, India sampai ke Rotterdam, Belanda.

Keprihatinan makin menjadi-jadi ketika mulai memikirkan kondisi perpolitikan dan kondisi ekonomi kita. Apalagi keadaan sosial kemasyarakatan yang terancam akan konflik horisontal dan konflik vertikal seperti dalam pilkada. Inikah yang disebut Soekarno sebagai revolusi belum selesai? Agaknya tidak sedikit dari kita yang mulai tak percaya diri menapak masa depan yang penuh tantangan itu. Tetapi tidak sedikit juga di antara kita yang masih optimis dan punya harapan akan masa depan yang dapat diwujudkan, meskipun di sana-sini kita masih mendengar adanya kelaparan, masih adanya ketidakmerdekaan, konflik sosial-keagamaan, kekerasan, penindasan, pelecehan dan penodaan demokrasi. Pertanyaan yang sering diajukan orang sangat klasik, adakah yang salah dari cara kita mengelola negeri ini?. Kalau ya, harus darimana memulai memperbaikinya?

### **KESALAHAN ?**

Mari dimulai dari sini, masyarakat sejarawan bergerak. Darimana lagi kita harus berangkat? Dari *notion de l'histoire* yang telah kita maknai dan perlu didefinisikan kembali. Kalau boleh menyebut tentang “kesalahan” atau “salah urus” mengelola bangsa ini, maka kita harus kembali kepada cara kita memaknai sejarah dan *evenements*. Mengapa memulai dari sejarah dan sejarawan. Saya kira sejarah dan masyarakat sejarawan juga sebagai faktor penyumbang akan kelemahan bangsa ini.

Masyarakat sejarawan sebagai masyarakat intelektual agaknya sudah tidak lagi kritis dalam memandang dunianya sendiri. Tidak lagi sejarah memberi arah ke masa depan. Sejarah hanya dilihat sebagai kajian masa lalu yang seolah-olah tak berkontribusi apa-apa pada negara. Lihat di televisi kita, apakah di situ muncul kontribusi sejarah? Kalau ya, mengapa yang tampil tiap hari di hadapan kita hanya gosip, mistik, pornografi, lagu ngak-ngik-ngok (term Soekarno), kekerasan, kekejaman. Sudah sedemikiankah wajah kebangsaan ini?

Maka jangan heran apabila yang tercatat dan yang mengendap di lubuk hati generasi sekarang ini, termasuk kaum ahli sejarah kita, hanyalah *l'histoire immediate*. Hanya kesementaraan yang ada. Kita merasa tidak selesai-selesai dengan simbol-simbol baru yang muncul, terutama dalam cara kita memandang masa lalu dan masa depan kita sendiri. Lihatlah betapa kebingungan generasi kita dalam orientasi kehidupannya. Mereka takut menengok ke belakang, yakni masa lalu yang penuh dengan intrik dan konflik, yang berisi perjalanan sejarah panjang yang “berdarah.” Sedangkan mereka juga enggan belajar dari masa sekarang karena penghargaiannya yang rendah terhadap kecerdasan dan ijasah. Sekarang

mereka juga merasa tidak mempunyai negeri ini, karena memang generasi muda tidak dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ekonomi. Lalu yang terjadi adalah apatisme terhadap masa depan yang tidak jelas. Mau di bawa ke mana bangsa ini tanpa peta masa depan?

Apa cara pandang kita terhadap sejarah salah, sehingga mengakibatkan kita juga keliru dalam memahami masa sekarang dan masa akan datang. Kalau dirunut ke belakang, masa depan yang dulu pernah diimpikan para nasionalis kita, antara lain menumbuhkan cinta Tanah Air yang berkobar-kobar dengan cara membanggakan Negara dan Bangsa ini sebagai negeri yang Kuat dan Megah. Sekarang apakah ini masih relevan, saya kira tak lagi bisa kita dengar gaungnya. Pendidikan sejarah juga cuma memberikan nilai A, B atau C saja, tetapi tidak mengupas substansinya.

Yang dirasakan generasi kekinian agaknya kurang lebih sama seperti apa yang kita lihat dan kita dengar dari televisi kita. Cara pandang yang salah tersebut boleh dikata datang dari adanya antusiasme untuk membangun negara dan bangsa ini tanpa huru hara. Solidaritas, integrasi dan harmonitas harus dijaga agar tercapai kedamaian. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, dalam sejarah konflik kita, penyelesaian damai tanpa pertumpahan darah sulit ditemukan. Senjata, tentara, senjata adalah cara yang dilakukan negara dan sangat baik terekam dalam sejarah kita. Telah banyak ditulis juga oleh sejarawan kita tentang sejarah berdarah itu dengan cara pandang yang klasik. Misalnya penggunaan istilah “pemberontakan.” Istilah ini demikian kuatnya, sehingga sikap kita dalam memaknai *evenement* dalam istilah itu sering melibatkan unsur kekerasan di sana.

Bagaimana kalau istilah itu kita ubah. Menurut penghematan penulis, justru pemaknaan gerakan protes dan gerakan perlawanan sebagai “pemberontakan” adalah tidak tepat. Apakah bangsa sendiri yang protes karena ketidakadilan lalu disebut sebagai pembangkang? Ataukah yang membangkang karena diperlakukan sewenang-wenang oleh Pemerintah lalu disebut pemberontak? Dan apakah bagi mereka yang berseberangan pendapat dengan pemerintah dalam mengambil kebijakan lalu disebut makar? Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kemenangan ada di pihak kekuasaan. Maka prinsip demokrasi kehilangan satu pilarnya, yakni matinya kebebasan berbicara. Barangsiapa yang bertanya dianggap protes, barangsiapa protes dianggap pemberontak, barangsiapa pemberontak dianggap separatis.

Cara pandang sejarah beginilah yang menurut hemat penulis menambah runyam keadaan bangsa sekarang ini. Sekarang ini telah terakumulasi ketidakpuasan dan apatisme itu, tumbuh dari proses panjang yang terus menerus saling memaknai situasi konkrit sehari-hari. Maka tidak mengherankan jika tanpa organisasi dan perintah, tanpa ideologi dan indoktrinasi, proses akumulasi ketidakpuasan dan apatisme akan mampu melahirkan sebuah revolusi. Jadi, kesalahan kita dalam

memaknai peristiwa politik kiranya juga pemberi sumbangan yang besar terhadap kehancuran memori bangsa. Hal itu sudah kita rasakan tidak saja kehancuran jiwa patriotis tetapi juga cara pandang yang salah terhadap keindahan, kekaguman dan seni-budaya kita. Jadi jangan salahkan siapa-siapa bila kita juga berada diambang kejatuhan jati diri. Jika suatu hari nanti anak cucu kita tidak dapat memaknai sejarah bangsa dengan tepat jangan pernah salahkan mereka. Generasi kita adalah produk masa lalu yang telah kehilangan jati diri. Sebuah generasi yang diwarisi budaya penuh darah dan kebencian, diwarisi oleh represi dan penindasan. Sebuah memori kegelapan yang mengancam.

## **NEOLOGISME**

Sejarah adalah memori kesadaran yang mampu membentuk watak dan jati diri bangsa. Sejarah yang salah (dalam memaknai *evenement*) akan membentuk watak dan jati diri yang menyimpang juga. Demikian saya katakan, bahwa sejarah adalah ibu kandung dari sejatinya kehidupan rohani bangsa. Artinya sejarah yang benar akan membawa kita ke dalam situasi yang penuh persaudaraan, kebebasan tanpa kecurigaan, dan kesederajatan yang tidak memandang suku, ras, agama, golongan, partai atau kekayaan. Sebuah situasi sebagaimana diimpikan dalam sila-sila Pancasila itu. Tetapi mohon dengan hormat jangan pernah menyebut sejarah yang pancasilais. Sejarah ya sejarah.

Kini sejarah kita lebih banyak membelenggu generasi bangsa. Sejarah menjadi bagian monumen, karena tidak mampu memaknai *tous les evenements Indonesiens* kekinian secara cerdas. Justru setiap hari generasi kita hidup di bawah ketidaksadaran sejarah. Sungguh prihatin dan memilukan apabila memori jiwa bangsa yang patriotik secara perlahan-lahan akan musnah dari kalbu kita, hanya karena sejarah tidak memberinya gizi. Sebuah kehancuran bangsa Indonesia telah dimulai di sini.

Sejarah telah mencatat dan juga dicatat oleh Muhammad Yamin, Sanusi Pane, Soekarno, Hatta, Sjahrir, Ibu Kita Kartini, Dr. Soetomo, Ki Hajar, yang berhasil membangun sejarah Indonesia dengan pandangan Nusantara Raya yang Megah Perkasa, seperti diabadikan dalam lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Saya kira kaum nasionalis itu sadar bahwa konsekuensi dari ke Indonesiaan yang megah itu membutuhkan kearifan dalam persatuan dan kesatuan jiwa, seperti Renan berkata *vivre d'etre ensemble*. Dahulu kita angkat senjata melawan Belanda, tetapi sekarang dalam sejarah kita, kita mengangkat senjata untuk melawan bangsa kita sendiri. Ini sebuah ironisme sekaligus tragedi yang terus berlangsung sampai hari ini.

Apabia kaum nasionalis menggunakan istilah pemberontakan itu agaknya disebabkan pula oleh neologisme yang mereka pakai untuk menentukan posisinya dalam berhadapan dengan negara baru bernama Indonesia itu. Negara yang

masih bayi dengan gigi susunya yang belum kuat mengunyah mengharuskan mereka mencari solusi yang lebih cepat. Maka senjata mereka gunakan sebagai cara mengakhiri pergolakan di daerah-daerah. Meskipun saya tidak setuju terhadap cara-cara seperti itu, dan juga bukan membela kaum nasionalis itu, kenyataan memang negara haruslah mengambil tindakan. Seperti ilmu sosiologi mengajarkan, apabila tidak bisa preventif dan tunduk, patuh maka diambil jalan represif, termasuk kekerasan, *coercion*.

Perlawanan dari kaum intelektual juga terjadi dalam sejarah kita. Ketika Hamka sangat marah dan mengejek Muhammad Yamin, ketika kebanggaan Emperium Majapahit Raya dipromosikan oleh Yamin sebagai model Indonesia Baru. "Majapahit adalah ekspansionis," teriak Hamka. Orang-orang kemudian banyak yang tidak menyetujuinya dan ikut mengejek Yamin sebagai nasionalis yang chauvistik. Sekali lagi, sejarah mungkin telah menghakimi *evenement* dengan cara yang salah pula.

Akhirnya memang tidak ada yang membela Yamin termasuk Soekarno. Dan ia tersingkir dari dunia sejarah dan sejarawan. Namun, Yamin adalah icon Gadjahmada perkasa yang berhasil memberi makna sejarah dengan caranya yang unik. Dia tidak luluh lantaran dituduh melakukan legitimasi sejarah demi politik. Ada juga yang berpendapat bahwa Muhammad Yamin dengan caranya telah memaksakan kehendaknya agar Majapahitlah sebuah model Negara kebangsaan dengan segala kemegahan dan kejayaanya. "Memang apa model lain selain Majapahit?" tanya Soepomo. Barangkali benar jawaban Sutan Takdir Alisyahbana, jawabnya adalah Barat. Semua itu tinggal kenangan dan perdebatan itu tidak pernah selesai sampai hari ini.

Alisyahbana menganggap tidak terlalu penting model itu, karena proses keIndonesiaan sebenarnya terjadi dalam proses ke Barat itu. Bukan proses Indonesianisasi seperti yang diimpikan kaum sejarawan kita. Proses Indonesianisasi itu tidak ada. Yang ada adalah Westernisasi. Indonesianisasi itu hanyalah sebuah impian kita ketika kita menolak proses Hindunisasi atau Indianisasi seperti yang ditulis Denys Lombard itu.

Ini persoalan sejarah yang nasionalistik. Tidak ubahnya sejarah yang pancasilais disebut di muka, kita hanya berkulat pada bungkus dan bukan isi. Inilah yang saya sebut sebagai **neologisme**. Konsekuensi dari penolakan terhadap model Yamin, adalah mirip dengan penolakan Daerah atas kebijakan Pusat. Masalah Pusat dan Daerah telah melahirkan Otonomi Daerah, Otonomi Khusus, Otonomi Istimewa dll. Dahulu kala barangsiapa yang tidak setuju dengan model yang ditawarkan oleh Pusat maka mereka (sebut saja kelompok-kelompok berseberangan) itu dianggap kelompok perlawanan atau sering disebut sebagai pemberontak.

Pemaknaan itu diambil alih saja oleh rezim Orde Baru untuk mengatasi

perlawanan di daerah. Hanya rakyat Kedungombo yang minta keadilan dan menagih janji atas tanahnya yang hilang, oleh Soeharto dianggap kaum *mbalelo*, yaitu kaum pemberontak itu. Kata “mbalelo” merupakan euphemisme yang artinya kurang lebih sama. Gerakan Pengacau Keamanan sempat digunakan menggantikan Gerakan Separatisme. Ungkapan-ungkapan seperti itu sering digunakan berganti-ganti sesuai situasi politik yang ada. Sehingga, sebetulnya apakah menggunakan sebutan *mbalelo* atau menggunakan istilah pemberontak dan sejenisnya, pada dasarnya adalah sama. Karena ujung-ujungnya cara-cara mengatasinya menggunakan senjata dan kekerasan juga.

Uraian di atas hanyalah satu cara saya untuk menyebut masyarakat sejarawan kita, dengan meng-amin-i *notion* “pemberontakan” itu, yang dalam banyak aspek saya kira sejarawan itu tidak menyadarinya, melukai sejarah kita itu. Bahkan, sejarawan yang mampu mengungkap pemberontakan, seperti pemberontakan petani mendapat acungan jempol bahkan dianggap sebagai tulisan yang hebat. Memang saya mengakui kehebatan sejarawan pemberontakan itu, yang memang secara intelektual saya akui sangat luar biasa. Hanya saja, bagi saya tulisan semacam itu belum cukup membantu memecahkan masalah bangsa ini. Kalau boleh saya bilang, mungkin saya salah, sejarah semacam itu harus diberi nilai kontributif yang secara praktis mampu menumbuhkan inspirasi dalam pembangunan dan karakter bangsa.

Cara pandang yang melihat penjajahan Belanda dan Inggris di Indonesia sebagai zaman kegelapan adalah tipe khas sejarawan nasionalis. Pada hal banyak hal positif dari penjajahan itu karena kita menjadi *civilisée* (yang beradab). Kita tidak pernah mau mengakui sebagai kenyataan sejarah. Pada hal itu adalah pintu untuk menerima Barat secara wajar. Maka kita perlu memperbaiki nasionalisme kita yang penuh semangat mencintai Tanah Airnya, tetapi janganlah kecintaan yang membabi buta, sehingga kita memandang hal baik dari Barat sebagai sesuatu yang buruk.

Neologisme mungkin lebih tepat untuk menggambarkan cara-cara *fondeur* bangsa ini dalam memaknai konsep dari luar. Dengan kata lain, sebetulnya kaum nasionalis hanya mengambil bungkusnya saja dari Luar (Barat apa Timur) tetapi tidak sungguh-sungguh menggali substansinya. Agaknya ini lebih banyak karena faktor spirit nasionalisme yang berlebihan itu. Konsep dari Barat itu kemudian diisi dan dimaknai dengan cara (menurut Soekarno dan Yamin) “menggali dari bumi sendiri.” Pada hal dalam kenyataannya produk penggalian dari bangsa sendiri itu tidak pernah klop dengan bungkusnya. Antara bungkus dan isi tidak dapat memberi bentuk malah sebaliknya kehilangan bentuk.

Yang terjadi adalah kekacauan istilah atau *les fraudes de notions*. Kesimpulannya, kita tidak pernah membangun konsep kenegaraan secara final. Sampai hari ini konsep politik, hukum, budaya dan ekonomi kita belum pernah

selesai. Buktinya, demokrasi dari Barat menjadi demokrasi Pancasila, dan kita kembalikan lagi menjadi demokrasi saja, tetapi juga sulit dipraktekkan. Malahan menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Swadeshi dari India oleh Soekarno diubah menjadi swadeshi yang progresif, pendidikan yang berbasis intelektual ditangkap oleh Ki Hadjar sebagai pendidikan yang berbasis moral, dan kini pendidikan berbasis kurikulum gaya Amerika Serikat diubah lagi menjadi pendidikan berbasis kompetensi. Alhasil, kita memang masih benar-benar menjadi “negara koma” (artinya belum pernah sampai titik dalam konsep). Akibatnya banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal bukan karena faktor pendukungnya tetapi konsepnya saja belum selesai.

Artinya apa? Tulisan ini ingin menyampaikan pikiran bahwa belum tuntasnya konsep kenegaraan kita, justru faktor utama mengapa kita menjadi negeri yang ragu-ragu. Masalahnya terletak pada belum tuntasnya kita membangun sebuah konsep atau sistem kenegaraan kita. Ini berbeda dengan memperbaiki sistem yang disesuaikan dengan kondisi dan semangat jamannya. Apa yang terjadi dengan kondisi tersebut tidak lain adalah kerancuan. Contohnya, perebutan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara yang lain, antara pendidikan swasta dengan pendidikan negeri, antara Komisi Negara yang satu dengan Komisi Negara yang lain. Dalam bidang hukum juga terjadi misalnya, perbenturan dan kontroversi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, tumpang tindihnya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, tidak sejalanannya peraturan pusat dengan peraturan daerah dan masih banyak yang lain lagi.

Dampak nyata dari semua kekacauan itu adalah apa yang kita lihat dan kita alami seperti sekarang ini. Kita lihat konflik masih membara di berbagai area lokal tetapi juga terjadi konflik dalam tubuh penyelenggara sendiri, seperti KPI dengan Depkominfo, antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, dll. Apabila sekarang terjadi kerancuan, kekacauan dan kesimpangsiuran di mana-mana, itu sangatlah wajar.

## MUNGKIN MULTIKULTURAL

Apa solusinya? Dalam tulisan ini saya tidak terlalu ambisius menawarkan sebuah pendekatan. Mungkin saja sudah banyak orang membuat sebuah *blue print* untuk mengatasi kemelut Indonesia kini. Yang jelas keadaan rakyat kita yang berada di bawah makin susah, mereka yang secara ekonomi juga lemah, kurang punya keahlian, tiadanya akses, lapangan kerja yang kecil, pasar global yang merampas lahan mereka, tetapi hidup harus terus berjalan dan bangsa ini harus bangkit untuk bertahan hidup.

Solusi untuk persoalan yang multidimensional begitu tidaklah mudah. Bagaimana mungkin hidup bisa tenang dan nyaman kalau kehidupan yang

sebenarnya seperti apa yang tergambar dalam berita di televisi dan radio, koran dan internet. Contohnya, kekerasan dan kriminalitas agaknya sudah dianggap sesuatu yang lumrah. Pada hal itu adalah tindakan dan peristiwa keji serta mengerikan. Dalam hal ini, kita agaknya sudah luput dari kepedulian dan perhatian kita. Pemberitaan mengenai pembunuhan, pemerkosaan, kriminal sampai acara jin *setan peri*, *reality show* yang seronok, sinetron yang mengeksploitasi kekerasan dalam rumah tangga sampai religius mistik yang mengeksploitasi dunia lain serta konflik-konflik berdarah, menggambarkan betapa kehidupan kita jauh dari cita-cita adil makmur *gemah ripah loh jinawi kerta tur raharja* (sejahtera lahir dan batin).

Televisi, sebagai kaum sejarawan adalah bagian dari cara pemaknaan tentang peristiwa di seputar kita. Pendek kata, cara pandang kita dalam memaknai realitas kehidupan itulah yang menentukan terhadap efek kejiwaan dan tindakan kita.

Demikian pula, cara pandang sejarawan kita, sangat mungkin mengarah pada pendekatan yang lebih humanistik. Dengan kata lain, sejarawan haruslah secara terus menerus memaknai sejarahnya sendiri secara kritis. Ini dibutuhkan agar sejarah haruslah bisa menjelaskan kekinian. Sejarah bukanlah belajar tentang masa lalu, tetapi belajar sejarah untuk masa kini.

Keberpihakan sejarah dan sejarawan itu memang sulit dilepaskan dari politik. Maka tak mengherankan bahwa sejarah nasional Indonesia itu juga sangat sarat dengan nuansa politis. Jangan sampai sejarah ditulis hanya untuk melanggengkan kekuasaan politik. Dengan begitu, sejarah akan kehilangan konteks dan etos kerjanya sebagaimana dikatakan oleh Fernand Braudel *le passé explique le present* (sejarah itu menjelaskan masa kekinian). Artinya, sejarah harus memberi arah kepada bangsa ini, bukan dengan cara menyajikan sejarah untuk menguatkan versi rezim yang berkuasa, seperti film “Pengkhianatan G30S/ PKI”. Kembali pada *notion* “pemberontakan” dan istilah sejenisnya jelas tidak relevan dipandang dari sudut pendekatan *le present* karena tidak menjelaskan kekinian. Agaknya *notion* tersebut justru telah menjadi pemecahbelah jiwa kebangsaan dan patriotisme kita. Jangan sampai sekarang ini kita menggunakan kata-kata seperti tersebut di atas, selain karena konotasinya adalah senjata, tentara dan meriam, juga istilah tersebut kemudian justru digunakan sebagai alat legitimasi oleh pihak penguasa untuk menindas dan membunuh potensi bangsa.

Dengan istilah itu memang sepertinya kita menjadi benar. Karena kita telah mampu menggunakan alat senjata canggih, modern dan mengatasi masalah. Pada hal kenyataan tidak seperti itu. Senjata dan meriam adalah cara sistematis untuk memusnahkan peradaban. Solusi yang menimbulkan masalah. Ini harus kita cegah.

Untuk itulah saya tawarkan pendekatan yang mungkin lebih fleksibel yaitu multikultural. Apa yang saya maksud dengan pendekatan multikultural sebenarnya

lebih bersifat cara pandang yang humanistik. Kerangkanya lebih bersifat kultural. Artinya melihat dari sudut pandang yang holistik dari sebuah *evenement*. Itu gambaran mudahnya. Sehingga memunculkan suatu interpretasi yang lebih luas terhadap simbol-simbol yang dibangun dalam proses penulisan sejarah. Saya kira contoh yang paling cocok pendekatan ini digunakan oleh Denys Lombard dalam *Nusa Jawa*. Mungkin juga karena ia Guru saya, sehingga banyak terpengaruh darinya, setidaknya simbol-simbol dalam proses kebangsaan itu dimaknai secara kritis dan cerdas. Hasilnya *notion de la nation* bangsa ini akan lebih lengkap. Dibutuhkan sedikit kerja keras karena makna yang terkandung dalam sebuah kebudayaan sangatlah kompleks.

Oleh sebab itu, semiologi sebagai ilmu tanda, baik yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure maupun oleh para suksesornya adalah menjadi pisau analisis yang lebih luas. Tidak sekedar menggelar peristiwa (*explication des evenements*) tetapi memaknai peristiwa. Kalau dimuka sejarah kita penuh nuansa politis mungkin ungkapan itu sangat tepat baik untuk kepentingan nasional maupun untuk mengarah ke masa depan. Tetapi perlu diingat bahwa pendekatan politik seperti itu tidak selamanya dapat menyelesaikan masalah dan harga mati. Kemajuan cara berpikir bangsa juga kemajuan bangsa dalam memaknai masa depan dan masa lalu haruslah dilihat sebagai faktor yang dapat mengubah paradigma kita tentang sejarah Indonesia.

Dengan bahasa saya, bahwa pendekatan sejarah semacam itu sebetulnya lebih menitikberatkan pada aspek kearifan. Kearifan lokal kita jadikan alat untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanan sejarah panjang kita. Kearifan adalah salah satu kekayaan kita yang akan kita kubur sendiri karena kita mencari kearifan dari luar (pendekatan sejarah asing).

Barangkali buku-buku yang hebat tentang pemberontakan bahkan dipuji-puji di forum-forum kaum sejarawan, seperti "Pemberontakan Petani di Banten, di Jawa, di Madura," atau pemberontakan Madiun, pemberontakan di luar Jawa seperti pemberontakan PRRI/Permesta adalah contoh kecil yang dapat dikaji ulang dengan pendekatan yang berbeda.

Sehingga, cara pandang kita terhadap sejarah bangsa janganlah hanya sepihak. Lombard memilih pendekatan sejarah global. Kurang lebihnya pendekatan yang saya tawarkan seperti itu. Perbedaanya adalah cara pandang dalam memaknai peristiwa yang membedakannya dengan pemaknaan Lombard.

Kita harus ubah cara pandang selama ini yang menganggap potensi dan kekuatan moral dan mental juga keberanian suatu kelompok masyarakat dengan mudah dicap sebagai pemberontak. Dengan serta merta mereka dihancurkan hanya karena kehendak itu tidak sama dengan kehendak kekuasaan Pusat. Apabila kita menyimak, kalau tak salah simak, bahwa para fondateur bangsa ini menganggap bahwa frame Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah warisan leluhur,

sebagai sesuatu yang *given*. Lalu lahir Pancasila dan lahir banyak konsep tentang Keindonesiaan yang diambil dari “warisan leluhur itu,” di atas disebutkan diambil dari Luar, yang isinya sarat akan sumber dari tradisi hindu-budha, kemudian para indonesianis menganggap Indonesia terhindunisasi. Meskipun semua “sumber” yang diambil dari fondateur kita itu hanya sekedar neologisme belaka (baca disertasi Andrik Purwasito, *Imajeri India*, 2001):

Dari sisi multikultural, perdebatan istilah Hindunisasi dan Indianisasi atau Indonesianisasi tidak menjadi penting dan relevan ketika kita punya pandangan sendiri yang lebih baik. Dengan sendirinya, kita harusnya memandang pendekatan indianisasi harus dilihat sebagai cara pandang saja. Substansinya sama.

Dengan pendekatan multikultural, perbedaan atau kebhinekaan itu hanyalah sebuah mosaik yang menjadi bagian dari sebuah kesatuan. Sangat tepat semboyan Bhineka Tunggal Ika. Sejarawan kita harusnya menggali potensi kekuatan “mengapa bangsa Indonesia bersatu padu dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah yang disebut Negara Indonesia. Faktor apa saja yang menghubungkan mereka hidup dalam satu kesatuan bahasa yang disebut bahasa Indonesia, dalam satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Indonesia?”

Dengan kata lain bahwa pendekatan multikultural adalah cara pandang kita terhadap masa depan dengan cara melihat sejarah, latar atau setting budaya kita sendiri. Mungkin pendekatan ini akan membawa kita pada solusi atas persoalan yang diungkapkan di depan. Melihat perspektif masa depan dengan cara yang lain. Pendekatan ini akan mengungkapkan lebih banyak tentang kekuatan dan Ibu Kandung Sejarah kita itu. Masih saja ada sesuatu yang rahasia di balik persatuan dan kesatuan bangsa ini.

## **TAWARAN KAJIAN**

Arah pendekatan multikultural akhirnya berpulang pada kekuatan persatuan bangsa. Di sini rahasia kekuatan bangsa harulah menjadi titik tumpu atau fokus problematikanya. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana sesungguhnya bangsa ini mampu menyerap dan menyatukan spirit kebangsaan menjadi bangsa Indonesia. Apabila kita dapat menggali dan mengungkapkan rahasia tersebut, kiranya akan lebih jelas menjawab persoalan bangsa sekarang ini.

Saya menulis buku kecil *Komunikasi Multikultural*, yang lebih banyak berbicara tentang aspek komunikasi dan kebudayaan sebagai sebuah pendekatan keindonesiaan. Meskipun pada buku ini tidak banyak menyangkut tentang sejarah setidaknya pengaruh globalisasi telah mampu mengarahkan pola gaya hidup, tidak saja gaya hidup keluarga, remaja tetapi juga gaya hidup kenegaraan kita.

Saya mendengar banyak keluhan dari tokoh masyarakat dan juga pernyataan politikus maupun ilmuwan yang mempertanyakan tentang lemahnya semangat

nasionalisme, lunturnya identitas bangsa, dan ancaman terhadap kesatuan bangsa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah selama ini tidak ada upaya atau program kearah nasionalisme itu karena kita fokus pada pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu? Seberapa besar sumbangan kaum ilmuwan, khususnya sejarawan dalam upaya menumbuhkan cinta Tanah Air, memperkokoh identitas bangsa dan konflik perpecahan bangsa ini?

Semua ini merupakan wilayah kajian yang saya tawarkan dengan pendekatan yang juga telah saya berikan kata pendahuluannya. Selanjutnya, anda sendiri yang meneruskan studi ini.

Solo, 1 Oktober 2006

### Rujukan

Andrik Purwasito, *Imajeri India*, Pustaka Cakra dan Ford Fondation, Surakarta, 2001

Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, UMS, Press, Surakarta, 2001

Denys Lombard, *Nusa Jawa*, PT Gramedia, Jakarta, 1996

*Gusti Asnan:<sup>1</sup>*

## PRRI, PENULISAN SEJARAH DAN KEKERASAN

### PENDAHULUAN

**T**ampa mengabaikan arti penting peristiwa-peristiwa serupa lainnya, PRRI dapat dikatakan sebuah gerakan daerah yang sangat menarik dalam sejarah Indonesia kontemporer. Peristiwa itu telah melahirkan sebuah fenomena sejarah bagi Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Secara politis, PRRI punya andil bagi berakhirnya era partai-partai politik dan era demokrasi liberal di Indonesia. Secara pemerintahan, PRRI semakin mempercepat realisasi pembentukan Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, semakin memperkuat sentralisasi pemerintahan, serta menjadi awal terlibatnya militer secara intensif dalam pemerintahan daerah. Secara militer, PRRI menjadi bukti bahwa pemerintah lebih memilih penggunaan cara-cara militer dalam menyelesaikan gerakan “separatis” daripada cara diplomasi. Secara sosial dan psikologis, PRRI telah menyebabkan terjadinya eksodus besar-besaran orang Sumatera Barat (Minangkabau) ke luar daerahnya, dan telah menyebabkan hilangnya harga diri orang daerah itu karena perlakuan sewenang-wenang tentara pusat, serta ketidakadilan para penguasa.

Sebagai sebuah peristiwa, PRRI ternyata menjadi objek penelitian yang menarik bagi sejumlah besar ilmuwan dan pengamat sosial-kemasyarakatan. Karena itu, sampai saat sekarang, sudah banyak penelitian yang menjadikan peristiwa itu sebagai objek kajiannya dan telah banyak tulisan, baik dalam bentuk buku atau artikel yang ditulis mengenai PRRI tersebut. Para peneliti atau penulisnya memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian besar dari mereka adalah ilmuwan politik, namun banyak juga yang memiliki latar belakang sejarah dan ilmu hukum. Di samping itu terdapat juga penulis dari kalangan TNI dan orang-orang PRRI, kalangan yang menjadi aktor utama peristiwa itu.

Tulisan ini mencoba mendiskusikan berbagai karya yang ditulis dan dipublikasikan tentang PRRI selama ini pada umumnya, dan yang membicarakan kekerasan yang terjadi selama peristiwa itu berlangsung pada khususnya. Dengan kata lain, tulisan ini adalah sebuah kajian historiografis tentang sejarah PRRI. Ada dua alasan yang melatarbelakangi munculnya tulisan ini; Pertama, sampai saat sekarang, belum ada satu pun karya yang mencoba melakukan tinjauan historiografis terhadap sejarah PRRI atau tindak kekerasan yang terjadi selama

<sup>1</sup> Gusti Asnan adalah dosen Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, Sumatra Barat. Gelar Ph.D. dalam Sejarah didapatnya dari Universitas Bremen, Jerman.

PRRI berlangsung. Padahal tidak diragukan lagi, PRRI yang diproklamkan oleh Ahmad Husein serta sikap represif pemerintah pusat terhadapnya tidak bisa dipisahkan dari darah dan tindak kekerasan. Kedua, munculnya sikap kritis ilmuwan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap hasil-hasil karya sejarah yang dibuat selama ini, terutama pada masa Orde Baru yang cenderung menghindarkan atau bahkan menabukan pembahasan tentang tindak kekerasan dalam karya sejarah.

Secara umum, karya-karya yang dibahas dalam kajian ini adalah hampir semua tulisan yang pernah dibuat mengenai PRRI. Secara khusus, karya-karya yang menjadi fokus utama kajian ini adalah beberapa buku atau artikel yang ditulis dan diterbitkan oleh pihak TNI dan orang-orang PRRI dan beberapa tulisan yang dibuat oleh penulis-penulis yang berpihak kepada salah satu aktor utama peristiwa itu, baik kepada TNI atau PRRI. Pemberian fokus kajian kepada tiga kelompok penulis ini didasarkan oleh kenyataan bahwa pada karya-karya merekalah yang hingga kini – dalam kadar pengungkapan yang berbeda - ditemukan deskripsi tentang tindak kekerasan yang terjadi selama peristiwa PRRI. Sehubungan dengan realitas tersebut, maka dua pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam tulisan ini: Bagaimana para penulis melukiskan tindak kekerasan yang terjadi selama era PRRI dalam karya-karya mereka? Mengapa mereka menulis seperti itu?

Namun sebelum menjawab pertanyaan utama di atas, pada bagian berikut ini akan dibahas terlebih dahulu – secara umum - karya-karya sejarah yang pernah dibuat mengenai PRRI.

## **HISTORIOGRAFI PRRI: SEBUAH TINJAUAN UMUM**

Ada beberapa kategori yang bisa diberikan kepada karya-karya sejarah yang telah dibuat mengenai PRRI. Kategori yang pertama adalah para penulis, kedua kapan karya itu diterbitkan, ketiga tujuan penerbitan dari masing-masing tulisan. Dalam kategori pertama, setidaknya ada empat **kelompok penulis**: 1). Para pelaku atau aktor sejarah. Ke dalam kelompok yang pertama ini ada pihak tentara/pemerintah, dan orang-orang PRRI. Sebagian dari mereka menulis atas nama pribadi yang kebetulan terlibat dalam kejadian itu, sebagian lagi menulis atas nama lembaga atau kelompok. Beberapa di antara penulis yang berada pada pihak tentara/pemerintah adalah Rudy Pirngadi, Darmosugondo, A. H. Nasution, Raden Pranoto Reksosomodra, Staf Umum Angkatan Darat (SUAD), Penerangan Angkatan Darat (Penad), Komando Daerah Militer (Kodam III/17 Agustus, Sendam III/17 Agustus, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad), Dinas Sejarah (Disjarah) TNI-AD, dan Kementerian Penerangan (Kempen). Penulis yang berada pada pihak PRRI antara lain St. Moh. Rasyid, Sebastian Tanamas, dan A.A. Navis. Dari keterangan di atas terlihat bahwa penulis pelaku atau aktor sejarah yang mewakili tentara/pemerintah memiliki jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang memihak kepada PRRI; 2). Penulis yang berpihak kepada

salah satu aktor/pelaku sejarah. Para penulis yang berpihak kepada pemerintah (tentara) terdiri dari penulis-penulis yang bekerja untuk pemerintah (tentara). Pada umumnya mereka adalah sejarawan profesional yang bekerja pada atau untuk lembaga-lembaga penelitian dan penerbitan pemerintah (militer). Dua contoh penulis yang termasuk kelompok ini adalah Onghokham dan Makmum Salim. Di samping itu, ke dalam kelompok ini ada juga penulis yang berasal dari anggota PKI atau simpatisan PKI. Tiga penulis yang termasuk kelompok ini adalah Soeripto Putra Djaja, B.D. Tjahjono, dan Nursuhud. Berbeda dengan para "sejarawan istana", maka penulis yang memiliki ideologi komunis ini adalah sejarawan amatir. Para penulis yang berpihak kepada orang-orang PRRI juga terdiri dari sejarawan profesional dan amatir. Karya-karya mereka tentang PRRI lahir setelah mendapat "proyek" dari orang-orang PRRI atau simpatisan PRRI. Mereka umumnya adalah sejarawan profesional (dan amatir) yang berusia muda. Dua di antara sejumlah penulis yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Payung Bangun dan Mestika Zed; 3). Penulis yang termasuk kelompok ilmuwan. Mereka menulis tentang PRRI sebagai bagian dari karya ilmiah (terutama untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan tingkat magister dan doktor), dengan kata lain mereka meneliti dan menulis untuk ilmu dan demi ilmu pengetahuan. Bila penulis kelompok pertama dan kedua di atas merupakan orang Indonesia, maka pada kelompok yang ketiga ini, di samping terdiri dari orang Indonesia juga ada penulis asing. Sebagian dari penulis yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Herbert Feith, James Mossman, Daniel S. Lev, Daniel F. Doelpers, Audrey Kahin, A. Yahya Muhaimin, Ichlasul Amal, R.Z. Leirizza, Saafroeddin Bahar, dan Nopriyasman.

Kategori kedua adalah **waktu terbit**. Sebagian besar karya yang ditulis oleh pihak tentara/pemerintah, dan penulis-penulis yang berpihak kepadanya diterbitkan pada saat PRRI masih berlangsung hingga dekade 1970-an. Pada masa itu, militer khususnya dan pemerintah pada umumnya begitu dominan dalam penulisan sejarah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa separatis, seperti PRRI. Pusat Penerangan ABRI, Staf Umum masing-masing Angkatan Perang (AD, AL, AU), dan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI (sekarang Pusjarah TNI) serta Kementerian Penerangan menulis dan menerbitkan berbagai karya tentang peristiwa itu. Hal ini dapat dipahami, bahwa untuk konsumsi masyarakat luas mengenai PRRI khususnya dan berbagai peristiwa lain yang melibatkan pihak militer pada umumnya, hanya informasi dan karya-karya yang dihasilkan pihak militer atau Departemen Peneranganlah yang diizinkan oleh pemerintah. Di samping itu, pada masa itu pulalah sesungguhnya penulis-penulis yang memiliki ideologi komunis diizinkan menulis, khususnya tentang PRRI dan gerakan daerah. Suasana dan semangat zaman pada masa itu memang ditandai dengan aksi-aksi penghujatan dan pengecaman terhadap PRRI khususnya, dan gerakan-gerakan yang dianggap pemerintah bernuansakan separatisme pada umumnya. Beberapa contoh di antaranya Penad (1958), Rudy Pirngadi (1958); Kementerian Penerang-

an (1958), Soeripto Putra Djaja (1958); Darmosugondo (1958), Nursuhud (1958), Kementerian Penerangan (1958), SUAD (1960), B.D. Tjahyono (1964), Peperda Sumatera Barat, (ca. 1963); Onghokham (1965), Sendam III/17Agustus (1963), Kodam III/17Agustus (1970), Makmum Salim (1971), SESKOAD (1971), (1978), dan (1979).

Karya-karya yang ditulis dan diterbitkan oleh orang-orang PRRI serta penulis-penulis yang berpihak kepadanya umumnya diterbitkan pada tahun 1980-an ke atas. Hal ini bisa terjadi, karena pada masa itulah orang-orang PRRI atau simpatisannya baru diizinkan tampil ke panggung sejarah, dalam arti mulai dibolehkan berbicara dan menulis tentang PRRI. Dibandingkan dengan karya yang ditulis oleh TNI dan penulis-penulis yang berpihak kepadanya, maka karya orang-orang PRRI dan simpatisannya ini relatif sedikit. Misalnya S.M. Rasjid (1981), Payung Bangun (1996), Abrar Yusra dan Syafruddin Al. (1998), Mestika Zed, Hasril Chaniago (2001), Ajip Rosidi (1986), Hendra Esmara dkk. (2000). Satu-satunya karya orang PRRI yang diterbitkan pada saat peristiwa itu berlangsung adalah St. Moh. Rasjid (1958). Buku ini bisa terbit pada saat itu karena ditulis dan diterbitkan di luar negeri.

Karya-karya yang ditulis oleh ilmuwan untuk kepentingan akademis diterbitkan sejak peristiwa PRRI itu berlangsung sampai saat sekarang ini. Bila diperbandingkan, maka karya-karya untuk kepentingan akademis yang pertama diterbitkan adalah buah karya ilmuwan asing dan karya itu telah terbit beberapa saat setelah peristiwa itu meletus. Hal ini bisa dipahami, karena ilmuwan asing memiliki kesempatan dan akses yang lebih luas serta atmosfer yang lebih melegakan untuk meneliti dan mempublikasikan karya-karya mereka, terutama bila dibandingkan dengan ilmuwan Indonesia. Misalnya James Mossman (1961), Herbert Feith (1962), Daniel S. Lev (1966), Daniel F. Doepfers (1972), Deshpande Jayashri (1981), Audrey R. & George McT. Kahin, (1995), Audrey Kahin (1999). Karya-karya ilmuwan Indonesia tentang PRRI baru mulai muncul sejak tahun-tahun pertama 1980-an, antara lain karya A. Yahya Muhaimin (1982), R.Z. Leirissa (1992); Ichlasul Amal (1992), Nopriyasan, (1988), Joni Patria (1991), Fachry Ali (1994), Saafroeddin Bahar (1996); Asvi Warman Adam (2000).

Kategori ketiga adalah **tujuan penulisan**. Kategori ini bisa lagi dibagi ke dalam tiga kelompok; 1). Untuk memberikan gambaran bahwa PRRI adalah sebuah gerakan disintegratif yang merongrong keutuhan NKRI; 2). Melegitimasi tindakan represif TNI khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya. Secara umum, tujuan penulisan kelompok satu dan dua ini adalah menyuarakan suara tentara atau pemerintah, karya-karya mereka ditujukan untuk membela tindakan tentara dan demi kepentingan pemerintah, termasuk untuk kepentingan indokrinasi ideologi dalam lapangan pendidikan. Tujuan yang terakhir ini dapat dilihat dari buku-buku teks pelajaran di berbagai tingkatan sekolah; 3). Legitimasi dan justifikasi orang-orang PRRI terhadap gerakan mereka atau orang-orang yang

mendukung PRRI terhadap dukungan yang mereka berikan, dengan kata lain tujuan penulisan dan penerbitan buku ini adalah pembelaan oleh orang-orang PRRI atau simpatisan PRRI terhadap aksi mereka; 4). Memberikan tinjauan kritis terhadap aksi orang-orang PRRI, TNI, pemerintah atau pihak-pihak lain yang terlibat. Tujuan penulisan dan penerbitan seperti ini lebih berdasarkan kepentingan ilmu pengetahuan.

Dari tinjauan umum di atas dapat dikatakan, bahwa terdapat perkembangan yang sangat menarik dari penelitian dan penulisan tentang PRRI. Tanpa mengabaikan apa yang terjadi dalam tataran internasional, pada tingkat nasional terlihat perubahan kecenderungan studi yang sangat signifikan pada tahun 1980-an. Perubahan itu dapat dilihat dari tema pengkajian dan para penelitiannya. Pada era sebelum tahun 1980-an, penelitian dan penulisan mengenai PRRI lebih cenderung mengaitkannya dengan persoalan persatuan dan kesatuan bangsa, persoalan penegakkan kedaulatan RI, legitimasi terhadap tindakan represif tentara, pujian terhadap keberhasilan tentara menghancurkan PRRI dan cercaan terhadap PRRI sebagai gerakan separatis dan pemberontakan. Hampir semua peneliti dan penulis adalah tokoh-tokoh tentara atau orang serta lembaga yang menyuarakan kepentingan tentara/pemerintah. Sejak tahun 1980-an tema penelitian telah mulai berubah dan bervariasi. PRRI mulai dilihat dengan perspektif yang berbeda dan beragam. Pada mulanya (hingga tahun 1998) telah mulai terbit hasil penelitian yang melihat PRRI dari adanya persoalan kepemimpinan di tubuh TNI seperti yang dilakukan oleh A. Yahya Muhaimin (1982). Selanjutnya karya yang mengaitkan PRRI dengan gerakan pembangunan nasional, dalam artian persoalan ekonomi antara pusat dan daerah (kesimbangan keuangan) seperti yang dilakukan oleh R.Z.Leirissa (1991). Seiring dengan karya Leirissa lahir pula sebuah karya lain yang menghubungkan PRRI dengan tuntutan otonomi dan sentralisasi seperti yang dilakukan oleh Ichlasul Amal (1992) serta karya Saafroeddin Bahar yang mengaitkan persoalan PRRI dengan dinamika elit sipil dan militer (1996). Dalam kurun waktu yang sama juga mulai terbit autobiografi dan biografi tokoh-tokoh terlibat dalam PRRI seperti St. Moh. Rasyid (1981), Syafruddin Prawiranegara (1986), Hasyim Ning (1986) dan Mauluddin Simbolon (1996). Jadi, dalam era 1980-an hingga 1998 telah terbit karya-karya tentang PRRI yang ditulis oleh ilmuwan dari kalangan perguruan tinggi (untuk kepentingan akademis) serta telah mulai terbit autobiografi dan biografi tokoh-tokoh yang terlibat dalam PRRI.

Memasuki tahun-tahun terakhir 1990-an penelitian dan publikasi mengenai PRRI atau tokoh-tokoh yang terlibat PRRI semakin banyak dan beragam. Pada era ini PRRI bahkan telah dikaitkan dengan munculnya "perpecahan" di tubuh militer, politik sentralisasi Jakarta, persoalan HAM, semangat regionalisme di Riau, keterlibatan pihak asing (Amerika Serikat), serta juga berbagai persoalan yang terjadi di tingkat daerah (persaingan antar elit di daerah). Sejalan dengan

itu, autobiografi dan biografi tokoh-tokoh PRRI juga terbit dalam jumlah yang mengesankan. Tidak itu saja, pada era ini dilakukan sebuah seminar nasional tentang PRRI (2000) yang menampilkan sejumlah pemakalah dengan sejumlah makalah yang menawarkan pandangan baru terhadap PRRI. Sesuatu yang sangat menarik, pada tahun 2002 terbit sebuah buku yang menginformasikan betapa sadisnya TNI (Pranoto 2002).

Walau pun telah banyak penelitian dan publikasi yang dilakukan, bagaikan sebuah mata air, PRRI ternyata masih tetap menjadi sumber bagi munculnya topik kajian baru. Salah satu persoalan yang selama ini relatif terabaikan adalah mengenai kekerasan yang terjadi pada saat PRRI berlangsung dan ketika PRRI dikisahkan. Persoalan ini menjadi sangat menarik karena tindak kekerasan dipastikan terjadi dalam tingkat yang mengawatir pada masa itu dan ini adalah sebuah pengalaman yang tidak boleh dilupakan, namun hampir tidak pernah dikemukakan selama ini.

### **KEKERASAN DALAM HISTORIOGRAFI PRRI**

Kekerasan adalah aksi yang bercirikan kebrutalan, kebingasan, kekejaman, penganiayaan dan penghancuran seseorang atau sekelompok orang oleh seseorang atau suatu kelompok orang lain. Kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja yang merasa benar sendiri, maksudnya mereka yang merasa bahwa ide, prinsip dan ideologi merekalah yang benar. Pelaku kekerasan sangat beragam wujudnya, mulai dari negara, para pejabat (sipil dan militer) yang mempunyai kekuasaan, pengusaha, pemberontak, pengikut fanatik suatu kelompok kepercayaan hingga bandit, perampok dan pencoleng. Kekerasan setidaknya memiliki empat ciri utama, pertama paksaan atau upaya paksa yang memiliki sasaran akhir melawan kehendak orang lain; kedua beraksi secara berlebihan (ekstrem); ketiga dilakukan dengan tiba-tiba (tanpa peringatan terlebih dahulu); keempat menciptakan atau menghadirkan suasana ketakutan terhadap korban. Selama ini orang lebih melihat bahwa kekerasan lebih diwujudkan dalam aksi-aksi yang menggunakan "media" penghancur/perusak berupa materi atau tindakan seperti bom, senjata api, senjata tajam, gas beracun, alat-alat penyiksa, pembantaian, pemerkosaan, pembakaran, pemukulan, pengeroyokan, dan pengusiran (Henk Schulte Nordholt 2002: 2; Robert Cribb 2005: 54-57). Dalam makalah ini saya ingin menambahkan bahwa tindak kekerasan juga bisa dilakukan dalam wujud tulisan dan salah satu di antaranya dilakukan dalam penulisan sejarah. Berhubungan dengan itu, maka pada bagian berikut makalah ini akan ditampilkan dua pokok pembahasan mengenai lukisan kekerasan dalam karya-karya yang ditulis mengenai PRRI, yakni lukisan tindakan kekerasan yang terjadi selama PRRI serta kekerasan yang dilakukan oleh penulis sejarah PRRI itu sendiri.

## DESKRIPSI TENTANG KEKERASAN

Lukisan kekerasan dalam penulisan sejarah PRRI khususnya telah melahirkan sebuah fenomena baru dalam historiografi Indonesia. Fenomena baru yang dimaksud adalah hadirnya pola deskripsi belah bambu. Deskripsi pola belah bambu adalah sebuah bentuk penulisan sejarah yang penuh personal bias dan group prejudice yang mencoba memberikan kesan baik pada suatu pihak (pihak yang didukung penulis) dan memberi kesan negatif kepada pihak lain. Tujuan penulisan seperti ini adalah melegitimasi berbagai tindak kekerasan dan represif yang dilakukan pihak yang dikesani baik dan menghancurkan serta merusak pihak yang dikesani negatif. Pola penulisan ini terjadi karena penulis sejarah adalah pelaku sejarah itu sendiri atau penulis tersebut simpatisan dari masing-masing kelompok atau penulis tersebut yang “disponsori” oleh masing-masing pelaku.

Dari sekian banyak karya sejarah tentang PRRI, maka lukisan tentang tindak kekerasan pada umumnya hanya ditemukan dalam buku-buku yang ditulis atau diterbitkan oleh pihak tentara/pemerintah serta penulis-penulis yang memihak kepada mereka. Tampilnya para penulis ini tentu berhubungan erat dengan dominasi tentara/pemerintah dalam penulisan buku tentang PRRI pada masa itu. Seperti yang telah disebut pada bagian terdahulu, hingga tahun 1970-an hanya pihak tentara dan pemerintahlah yang diberi wewenang memberikan keterangan atau deskripsi tentang PRRI. Beberapa buku yang menulis tentang tindak kekerasan itu antara lain Darמושugondo (1958), Nursuhud (1958), B.D. Tjahyono (1964) dan Makmum Salim (1970). Karena yang melukiskan/menginformasikan tentang tindak kekerasan itu adalah orang-orang TNI/pemerintah, maka lukisan tentang tindak kekerasan yang terjadi selama masa PRRI hanya terbatas pada yang dilakukan pihak PRRI. Kalau ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak TNI, maka hal itu terjadi karena kesalahan orang-orang PRRI.

Pola pelukisan tindak kekerasan yang dilakukan oleh penulis pro tentara/pemerintah ini dapat dibagi dua. Pertama, memberikan gambaran tentang tindak kekerasan, namun tanpa menyertai pernyataan itu dengan rujukan sumber. Ciri lain dari pola pendeskripsian ini adalah mengungkapkan tindak kekerasan atau jumlah korban tindak kekerasan dengan pola “kualitatif”, misalnya dengan penyebutan “*penangkapan dan penahanan sewenang-wenang*”, “*penyiksaan sadis*”, “*jumlah tahanan yang banyak sekali*”, dan “*korban berjatuh dalam jumlah yang banyak*”. Sebuah contoh yang menarik dari pola pendeskripsian seperti ini ditemukan dalam buku Nursuhud.

*.....rapat2 organisasi Rakjat dilarang dan diawasi dengan keras. Lebih dari zaman PID-Belanda dulu, orang2 DPKN dikerahkan ke-kampung2 untuk mengadakan penjelidikan2. Sementara itu intimidasi meradjalela. Orang2 dipanggil oleh polisi atau CPM dan diperiksa setjara tidak semestinya. Organisasi2 Rakjat dipaksa untuk melaporkan djumlah dan nama2 anggotanja.*

.....djuga telah mendjadi kenjataan bahwa orang2 tahanan disiksa setjara kedjam supaja mau mengaku jang bukan2. Praktek2 fasis Djepang jang terkutuk, sekarang terulang lagi. Orang-orang tahanan dipukuli, dibakar dengan rokok, dilistrik dan sebagainya. Tindakan2 kedjam jang tidak mengenal prikemanusiaan ini tidak hanja terbatas pada orang2 tahanan laki2, tetapi djuga terhadap wanita.

.....hak2 azasi manusia sama sekali tidak terdjamin lagi. Kantor2 organisasi2 Rakjat diserobot dengan se-wenang2,perampasan2 harta benda penduduk ketika dilakukannya penggeledahan2 sudah mendjadi lumrah. Surat2 dan lebih2 surat2 organisasi Rakjat disensur dengan keras.

.....kemerdekaan pers dihapuskan. Suratkarbar2 yang tidak membawa suara fihak jang berkuasa dilarang beredar, jang diperbolehkan hanja suratkarbar2 jang mendjadi terompet fihak jang berkuasa (Nursuhud, 1958:22ff).

Atau pada bagian lain dari bukunya, penulis yang pada tahun 1960 ini diangkat menjadi anggota DPRDGR Sumatera Barat sebagai wakil PKI menulis:

..... takut kepada demonstrasi2 dan aksi2 Rakjat ini, takut kepada kebangkitan gerakan demokratis daripada Rakjat, maka "Dewan Banteng" segera membalasnja dengan teror jang kedjam. Pemimpin2 demonstrasi ditangkapi, penangkapan2 dilakukan di mana2, pedjabat penting jang ditjurigai bersimpati kepada demonstrasi2 dan aksi2 ini dipanggil dan diantjam, pendjagaan dan pemeriksaan lalu-lintas sangat diperkeras dan tentara serta polisi dikerahkan untuk mengadakan patroli ke setiap pelosok. Djuga karena sangat takut kepada kemungkinan terulangnja demonstrasi2 dan aksi2 Rakjat lagi disekitar tanggal 10 dan 12 November, tidak kurang 15 hari lamanja "Dewan Banteng" mengerahkan alat2nja untuk berdjaga-djaga.

Pola pendeskripsian yang sama juga ditemukan dalam karya Damo-sugondo (1958: 31ff) yang antara lain menulis:

.....keadaan jang sangat menjedihkan di saat-saat menduduki daerah itu adalah orang-orang penting atau pemimpin-pemimpin partai, pegawai-pegawai negeri jang telah ditahan lama di penjara di mana ada jang tak berketentuan nasibnja.

....mereka ditawan karena menentang pemberontakan PRRI, mereka ini banjak mendapat siksaan, dipukul, diminumi air kentjing dan rambutnja semua digunduli.

.....suatu jang telah memperkosa wanita-wanita Djawa jang berada di Sumatera Barat jang masuk keadaan lagi jang menjedihkan ialah

*keganasan pemberontak dalam pengawasannya, setjara perklompokkan berganti-ganti, sehingga sipenderita itu mengalami kepajahan, karena di luar perikemanusiaan pendjahat-pendjahat itu sambil memperkosa sambil mengatakan anak andjing Soekarno jang tidak mengenal terima kasih telah diberi tanah dan bisa hidup senang, djuga terhadap wanita-wanita jang bunting perutnya dipukul dengan popor sendjata, karena tidak mau diperkosa.*

*..... suatu kedjadian yang ngeri lagi, bahwa sesudah Pajakumbuh kita duduki di antara daerah Suliki terdapat tahanan jang dibakar dan diledakkan oleh PRRI.*

Kedua, memberi deskripsi tentang beberapa tindak kekerasan yang mencantumkan unsur tempat, waktu serta pelaku/aktor sejarah. Deskripsi bentuk ini juga telah memilah-milahkan bentuk kekerasan yang dilakukan pihak PRRI. Tindak kekerasan yang dikemukakan dalam deskripsi ini antara lain pembunuhan yang sadistis serta penahanan tanpa proses pengadilan. Walau pun demikian, rujukan sumber masih belum dijumpai. Pola pendeskripsian seperti ini ditemukan dalam karya B.D. Tjahjono (1964: 95ff) yang mengatakan antara lain:

*.....di Sawahlunto ada lebih kurang 2.000 orang tawanan PRRI jang dikumpulkan dalam beberapa buah rumah. Kemudian rumah2 tersebut disiram dengan minyak tanah atau bensin lalu dibakar. Tahanan2 jang kebetulan dapat meloloskan diri dari bahaya itu tidak diberi ampun lagi oleh Husein/kaki tangannya atau pesuruhnja, ditembak sadja.*

*.....di Ladang Lawas, suatu tempat dilereng Gunung Ophir jang dikitari ngarai2 dan bukit2, terdapat sebuah konsentrasi kamp tawanan. Di tempat ini di tawan orang-orang politik, pedjuang2 RI kesatuan, dan orang2 dengan demokrat jang menentang pemberontak. Pendjagaan kamp ini sangat kuat dan di antara pemimpin2 pendjagaan sangat bernafsu untuk menembaki tawanan itu kalau tentara kita datang untuk membebaskan. Pada waktu itu ditaksir tawanan itu ada berdjumlah 3.000 orang jang belum diketahui nasibnja. Komandan konsentrasi kamp PRRI itu dibantu oleh 60 orang militer, 30 orang anggota polisi dan 13 orang pegawai sipil. Tenaga2 tawanan itu hampir tiap hari dipergunakan oleh kaum pemberontak, sedangkan wanita rambutnja digunting sampai menjerupai laki2. Ditaksir perempuan jang ditawan waktu itu lebih dari 13 orang, antara lain Halimah, Nadiar dan Manisar jang mereka itu adalah anggota2 pemimpin pahlawan wanita demonstrasi Bukittinggi di samping pemimpin gerilja rakjat NUSA PUTERA.*

*.....di Suliki, sebelah utara Pajakumbuh (Guntuang) pada tgl. 4 Djuli 1958 telah dibunuh 175 orang tawanan mereka (PRRI). Adapun*

*djumlah ini adalah sebagian dari djumlah jang ditawan di Guntuang. Sebelum pembunuhan dilakukan, 230 orang itu telah dikerahkan katanja untuk menggali tebat ikan di kampung Simun (3 km dari Guntuang). Kemudian keesokkan harinja dipisahkan jang 177 orang lalu tangan mereka diikat erat ke belakang dengan tali belati dan dibiarkan begitu sampai subuh. Djam 7.00 pagi tawananj jang berdjumlah 177 orang itu digiring dan diterdjang masuk ke dalam tebat jang digali tadi itu. Dua orang di antaranja jaitu Bahar Saleh asal Batusangkar dan Amir asal Air Tabit dapat meloloskan diri dalam remang2 kabut subuh. Beberapa saat antaranja merekapun telah mendengar letusan2 dan ledakan2 granat, jaitu sendjata2 jang dipergunakan untuk membunuh kawan2nja jang 175 orang itu.*

Dalam berbagai karya ini dapat dilihat dengan jelas bahwa tindak kekerasan hanya dilakukan oleh pihak PRRI. Pihak PRRI melakukan berbagai macam tindak kekerasan yang umumnya sadistis dan sasarannya hampir merata kepada semua kelompok masyarakat yang ada di daerah ini. Pihak TNI hampir tidak pernah melakukan tindak kekerasan. Kalau ada kekerasan yang dilakukannya, maka itu dikatakan sebagai sebuah kekeliruan atau keterpaksaan. Mereka terpaksa melakukan tindakan kekerasan, terutama pembunuhan disebabkan oleh karena mereka harus membela diri dari serangan nekad musuh. Jadi kekerasan itu dilakukan sebagai reaksi dari sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang PRRI. dan berbeda dengan orang-orang PRRI, tindakan kekerasan yang dilakukan TNI hanya terbatas pada segelintir "gerombolan" PRRI, yakni pada pemuda. Contoh yang paling nyata dari pola pendeskripsian seperti ini ditemui dalam karya Darmosugondo (1958: 32).

*..... yang sangat fanatik mengadakan perlawanan itu adalah para peladjar mahasiswa dan peladjar-peladjar menengah atas jang dalam hal ini dapat kita maklumi bahwa mereka sebenarnya masih besih, kemudian diratjuni, dihasut untuk mendjadi pahlawan daerah, dan dibajangkan mati sahid, sehingga meluap semangatnja untuk melawan. Tetapi melawan TNI jang sudah berpengalaman itu tidak mungkin, sehingga korban jang banjak dari peladjar itu.*

Apa yang dilukiskan dalam dalam buku-buku di atas sesungguhnya bisa dipahami, karena buku tersebut ditulis untuk kepentingan pihak militer/pemerintah. Adalah suatu keniscayaan bila para penulis menulis dengan jujur dan seimbang tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua aktor sejarah. Bagaimana pun, TNI haruslah ditempatkan pada posisi yang baik dan sebaliknya PRRI harus dihitamkan.

Pola penulisan yang tidak memenuhi kriteria dan kaidah metode penelitian/penulisan sejarah bisa dicarikan jawabnya pada masing-masing penulis itu.

Hampir kesemua penulis adalah sejarawan amatir. Darmosugondo, lengkapnya Overste Darmosugondo misalnya adalah Staf Harian Penguasa Perang Daerah. Nursuhud salah seorang ketua PKI Sumatera Barat, Rudi Pirngadi adalah Kepala Penerangan Angkatan Darat dan B.D. Tjahjono adalah seorang wartawan yang bersimpati kepada PKI.

Sampai pertengahan tahun 1990-an, apa yang ditulis oleh penulis-penulis TNI/pemerintah di atas hampir tidak pernah dibantah atau direspon oleh penulis lain, terutama yang bersimpati kepada PRRI. Dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, warga masyarakat umumnya dan warga yang bersimpati pada PRRI mengamini saja apa yang dikatakan buku-buku itu. Reaksi atau respon mulai muncul pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Orde Baru. A.A. Navis adalah salah seorang tokoh yang pertama kali mencoba memberikan informasi baru mengenai tindak kekerasan yang dilakukan TNI selama periode PRRI. Dalam otobiografinya, sastrawan yang mengatakan tidak aktif dalam PRRI namun diangkat menjadi Wakil Ketua Koordinator Pimpinan Pemuda Pejuang Daerah itu menulis:

*.....yang memilukan dan teramat memprihatinkan saya adalah kenyataan bahwa ketakutan penduduk itu bertambah hebat dan mencekam karena gaya dan tingkah laku anggota-anggota militer yang berlebihan.*

*Sikap pamer kekuasaan demikian dirasakan orang amat menekan dan memualkan terutama dari unsur-unsur yang kemudian dikenal sebagai unsur-unsur komunis di dalam jajaran Batalyon B. Meski pun bukan seluruh anggota Batalyon B adalah komunis, namun sikap dan tingkah laku oknum-oknum unsur komunis yang tidak mengindahkan nilai-nilai adat setempat – seperti melakukan perkosaan terhadap wanita-wanita, atau penyiksaan berat misalnya menghukum penduduk yang tertidur di rumah ronda dengan berendam dikolam dan bersabun sebatang sabun cuci cap Sunlight – sungguh menciptakan citra buruk keseluruhan jajaran Batalyon B (A.A. Navis, 1994: 99).*

Dengan informasi yang diberikan Navis di atas jelaslah bahwa tindak kekerasan juga dilakukan oleh TNI. Namun, deskripsi mengenai tindak kekerasan yang dilakukan TNI tersebut belum sepenuhnya terungkap karena jiwa zaman yang belum memungkinkannya. Navis sendiri masih belum sepenuhnya sungguh-sungguh mengungkapkan tindak kekerasan yang dilakukan TNI. Navis masih membatasi bahwa tindak kekerasan berupa perkosaan dan penyiksaan hanya dilakukan oleh oknum-oknum unsur komunis yang ada dalam TNI (Batalyon B). Bukankah deskripsi ini masih menyimpan sebuah pertanyaan besar lainnya, apakah para serdadu TNI yang bukan dari unsur komunis tidak melakukan tindak kekerasan, tidak pernah memperkosa atau menyiksa orang-orang PRRI khususnya dan warga masyarakat pada umumnya atau – setidaknya - tidak pernah melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sadis?

2002 terbit buku Memoar Raden Pranoto Reksosomodra Pertanyaan seperti di atas, secara perlahan mulai terjawab. Pada tahun. Dalam buku ini, penulis yang pernah menjadi Panglima Komando Operasi 17 Agustus itu – setidaknya - mengungkapkan salah satu bentuk kekejaman (atau kesadisan) TNI.

*.....dia menutup kedua mata dan telinga, agar tidak dapat mendengar dan mendengarkan suara mayat-mayat yang berbunyi "klethos-klethos. Klethuk-klethuk. Kreak-kreak" akibat terlindas kendaraan perang kami.*

*....itulah suara pecahnya kepala yang sekaligus memuncratkan otaknya keluar, atau suara tulang rusuk yang berpatahan, demikian pula tulang paha atau tulang kering dan tulang pinggangnya. Memang sungguh ngeri mendengar suara itu. Akan tetapi, apa boleh buat, dalam keadaan perang segala hal itu sudah terlupakan dari perikemanusiaan... (Raden Pranoto Reksosomodra, 2002: 182).*

Berdasarkan deskripsi di atas terlihat adanya sebuah pola historiografi yang menarik dari sejarah PRRI. Pada hari-hari pertama pengungkapannya, gambaran mengenai tindak kekerasan hanya tertuju pada PRRI. Namun seiring dengan perjalanan waktu, tindak kekerasan yang dilakukan TNI juga mulai terkuak. Di samping itu, pola pendeskripsian tindak kekerasan itu juga memiliki kekhasan tertentu. Masing-masing penulis mempergunakan kata-kata tertentu yang memberi kesan "kejam" dan "sadis" di dalam buku mereka.

Dalam kasus PRRI, keahlian mempergunakan kata-kata tidak hanya dilakukan oleh penulis untuk melukiskan kekerasan yang terjadi selama peristiwa itu berlangsung, tetapi kata-kata juga bagian dari tindak kekerasan. Penggunaan kata-kata ternyata bisa menaikkan citra sebuah kelompok dan menghancurkan atau setidaknya menciptakan suasana ketakutan pada pihak lain. Bagian berikut di bawah ini akan mengungkapkan bagaimana kata-kata dalam penulisan sejarah PRRI juga membuat "objek" tulisan hancur dan dicekam ketakutan.

## **KEKERASAN LEWAT KATA-KATA**

Ungkapan "kata-kata bisa lebih tajam dari mata pedang" telah menunjukkan bahwa kata-kata ternyata juga bisa digunakan untuk menganiaya dan menghancurkan orang lain. Kata-kata bisa membuat seseorang atau sekelompok orang binasa secara fisik atau mental. Bahkan tidak jarang ditemukan di tengah masyarakat komentar sebagian warga yang mengatakan bahwa penganiayaan lewat kata-kata lebih menyakitkan dan menghancurkan bila dibandingkan dengan penganiayaan lewat pisau atau senjata.

Dalam deskripsi sejarah PRRI kekerasan lewat kata-kata ini juga ditemukan. Kedua aktor sejarah yang menulis tentang PRRI, terutama tentara dan pemerintah sangat banyak menggunakan kekerasan lewat kata-kata ini.

Kekerasan lewat kata-kata adaah kekerasan yang menggunakan kata-kata yang memiliki makna kasar, menyakitkan, mendeskreditkan dan bahkan membuat seseorang atau sekelompok orang tersisih secara sosial-kemasyarakatan. Ada dua kelompok kekerasan lewat kata-kata yang berkembang dalam belbagai karya sejarah tentang PRRI. Pertama kekerasan lewat kata-kata yang ditujukan terhadap aksi (orang PRRI atau militer dan tentara), serta kedua kekerasan lewat kata-kata yang ditujukan terhadap pelaku sejarah (orang PRRI atau tentara serta orang-orang pemerintah pusat). “Pemberontakan” dan “kaum pemberontak” adalah kata-kata kasar yang dapat dikatakan pertama kali dan paling sering dikemukakan pihak militer/pemerintah dalam karya-karya sejarah yang terbit di hari-hari pertama meletusnya

PRRI. Dalam buku Pirngadi, Darmosugondo, Nursuhud, Tjahjono ditemukan puluhan dan ratusan kali penyebutan kata-kata “pemberontakan”, “gerakan separatis”, “pengkianatan terhadap negara”, “pemberontak”, “kaum separatis” dan “pengkianat bangsa” dan “teroris”. Kata-kata ini dikatakan kasar dan menyakitkan kerana dengan penggunaannya telah menempatkan aksi PRRI dan orang PRRI pada posisi melawan negara dan gerakan mereka jelas sebagai sebuah aksi yang inkonstitusional. Efek penggunaan kata-kata ini jelas sangat besar. Dengan sebutan sebagai “pemberontakan” dan tudingan sebagai “pemberontak” maka aksi mereka dan keberadaan mereka layak dibasmi. Negara – dengan alasan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa – mempunyai dasar hukum menggunakan segala cara untuk membasmi aksi dan keberadaan mereka.

Sebaliknya karya-karya yang ditulis dan dipublikasikan oleh pihak PRRI juga menggunakan berbagai kata yang juga kasar. Presiden RI misalnya digelar “diktator”, “presiden yang mabuk kekuasaan”, dan pemerintah disebut sebagai “pemerintahan diktator”, “pemerintahan korup”, “tidak memperhatikan kepentingan rakyat”, “Jawasentris”, “Jakartasentris” dan “ditunggani komunis”.

Kata komunis adalah kata kasar dan memiliki dampak negatif luar biasa. Pada saat-saat menjelang pecahnya PRRI, cap komunis bisa menyebabkan seseorang menjadi korban tindakan anarkis massa di Sumatera Barat khususnya di luar Jawa pada umumnya. Bagi orang PRRI kata komunis dipakaikan pada pemerintahan, orang-orang (para petinggi) pemerintahan sipil di Jakarta, dan para perwira militer. Tidak itu saja, tudingan komunis ini juga ditujukan kepada orang-orang PRRI yang membelot dan bergabung dengan “pusat”. Ampuhnya kata komunis ini bagi penghancuran pihak lawan bisa dilihat dari sikap barat (Amerika Serikat) yang akhirnya bersedia membantu PRRI.

Di sisi lain, sebagai balasan dari kekerasan lewat kata-kata komunis di atas, pihak militer/pemerintah menggunakan kata-kata yang tidak kalah seramnya dengan komunis, yakni kata “fasisme” atau “fasis” terhadap aksi PRRI dan orang-orang PRRI. Berkali-kali kata ini dipergunakan untuk menghantam PRRI dan

pendukungnya. Bahkan Nursuhud menggunakan kata ini sebagai bagian kalimat utama pada alinia pertama bukunya, yakni dengan mengatakan: “Sudah setahun lamanya Rakyat Sumatera Barat berada di bawah kekuasaan fasisme, fasisme ‘Dewan Banteng-PSI’” (Nursuhud, 1958: 5).

Pada bagian lain dari bukunya Nursuhud juga menyamakan atau menilai bahwa PRRI lebih jelek dari kolonialisme Belanda serta orang-orang PRRI lebih kejam dari PID Belanda. Dalam bukunya itu Nursuhud juga berkali-kali menyebut bahwa orang PRRI dalam aksinya sering kali melanggar HAM (Nursuhud, 1958: 22, 23).

Kekerasan lewat kata-kata juga membuat para penulis yang berpihak kepada TNI/pemerintah sering membuat deskripsi yang emosional. Tjahjono misalnya mengatakan bahwa sifat dan kekejaman PRRI lebih ganas dari Westerling dengan APRAnya (Tjahjono, 1964: 96).

Kata-kata lain yang sering dipergunakan untuk mendeskripsikan aksi dan orang-orang PRRI adalah dengan mengatakan “Dewan Banteng yang biadab”, “pemerintahan Dewan Banteng adalah pemerintahan *warlord* (raja kecil)”, “pemerintahan PRRI adalah pemerintahan asal-asalan”, “tokoh-tokoh PRRI adalah politisi dan perwira yang gagal”, “avonturir”, “penjual negara”, “kaki tangan kaum imperialis dan kolonialis”.

Kekerasan lewat kata-kata akhirnya menjalar “keluar” karya tulis. Kata-kata “kasar” seperti yang disebut di atas akhirnya menjadi ucapan keseharian di Sumatera Barat umumnya, serta terhadap aksi dan orang-orang PRRI pada khususnya. Tidak itu saja, di tengah masyarakat bahkan juga muncul kekerasan kata-kata yang baru yang akhirnya juga ditujukan kepada orang-orang yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan PRRI, seperti sebutan “orang-orang kalah”, sebuah ungkapan yang sering dilontarkan terhadap orang Sumatera Barat pasca PRRI. Kekerasan lewat kata-kata ini terasa menyakitkan, karena tidak semua orang Sumatera Barat yang mendukung PRRI.

Walaupun perlu diteliti tingkat kebenarannya, terjadinya eksodus besar-besarnya orang Sumatera Barat pada tahun 1960-an dan 1970-an (lebih dari 500.000 orang), sebagian besar di antaranya ke Pulau Jawa (Moh Naim 1977: 264; Tsuyoshi Kato 1983, 134-135), ada hubungannya dengan kekerasan lewat kata-kata ini. Sebagian orang Sumatera Barat yang meninggalkan kampung halamannya tahun 1960-an dan 1970-an mengaku, salah satu alasan kepergiannya adalah karena ketidaksanggupan mereka mendengar kata-kata kasar seperti pemberontak, pengkianat bangsa dan orang-orang kalah yang sering dilontarkan tentara pusat.

## AKHIRUL KALAM

Seiring dengan perjalanan waktu, PRRI semakin lama semakin menarik untuk dikaji. Peristiwa itu semakin menyediakan peluang bagi para peneliti untuk mengungkapkan berbagai persoalan yang melingkupinya. Sebagai bagian dari sejarah sebagai *as actuality*, kejadian historis itu dari hari ke sehari semakin memberikan tema-tema kajian yang menarik. Sejak runtuhnya orde baru misalnya, peristiwa itu telah mengilhami sejumlah peneliti untuk mengkaji pemikiran politik orang Sumatera Barat tahun 1950-an, tampilnya militer dalam pemerintahan daerah, gerakan otonomi dan desentralisasi di Sumatera Tengah tahun 1950-an, serta hubungan dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, dan juga tindak kekerasan yang terjadi pada saat peristiwa itu terjadi. Tidak itu saja, berbagai biografi dan autobiografi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini juga terbit bagaikan cendawanumbuh di musimhujan. Sebagai bagian dari sejarah *as written*, hasil-hasil kajian mengenai PRRI juga telah mengilhami sejumlah peneliti untuk mengungkapkan perkembangan penulisan sejarah mengenai peristiwa tersebut. Apa yang dilakukan dalam makalah ini adalah salah satu bentuk perkembangan itu.

Runtuhnya orde baru menjadi tanda kebangkitan studi tentang PRRI. Semangat zaman yang baru semakin memperbanyak perspektif penelitian terhadap peristiwa bersejarah itu. Jiwa zaman yang baru juga memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengungkapkan tema-tema dan topik-topik kajian yang selama ini tabu dibicarakan.

Pembahasan mengenai tindak kekerasan yang terjadi selama PRRI yang selama ini hampir tidak pernah diungkapkan terasa mendesak untuk dilakukan. Persoalan ini penting dikaji, karena rakyat banyak pada umumnya dan peminat sejarah pada khususnya membutuhkan informasi mengenai itu. Sebagai sebuah perang saudara, tindak kekerasan dipastikan terjadi dalam jumlah yang banyak pada masa itu. Kedua pihak yang menjadi pelaku sejarah juga dipastikan sama-sama melakukan tindak kekerasan tersebut. Karena itu, sebuah penelitian mengenainya sudah sepatutnya dilaksanakan.

Di sisi lain, karena selama ini PRRI telah diteliti dan ditulis dalam berbagai penulisan dengan cukup intensif, maka berbagai karya tersebut juga perlu dikaji dalam perspektif historiografis. Apa yang dilakukan tulisan ini sesungguhnya masih merupakan sebuah usaha pendahuluan, masih terbatas pada upaya penelusuran pendeskripsian tindak kekerasan yang dilakukan PRRI dan TNI selama peristiwa itu berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

Abrar Yusra dan SyafruddinAl, *Sebastian Tanamas, Tak Menggantung Asap: Otobiografi Seorang Pejuang dan Pengusaha Industri Kerajinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Abrar Yusra (ed.), *Otobiografi A. A. Navis: Satiris dan Suara Kritis dari Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas: Masa Pancaroba Kedua* (Jilid IV). Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara: Lebih Takut kepada Allah Swt*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.

Asvi Warman Adam, "Demiliterisasi Sejarah Indonesia", *Makalah* pada Seminar Sehari PRRI, 2000.

A. Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

B.D. Tjahyono, *Kisah Pemberontakan di Indonesia*. Surabaya: np. 1964.

Cribb, Robert, "Legal Pluralism, Decentralisation and the Roots of Violence in Indonesia" dalam Dewi Fortuna Anwar et (ads.), *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific: Histories Political Economies and Policies* (Jakarta: Yayasan Obor, 2005).

Darmosugondo, *Peristiwa PRRI di Sumatera Barat*. Djakarta: Kementerian Penerangan RI, 1958.

Deshpande, Jayashri, "The PRRI Rebellion" dalam *Indonesia the Possible Dream. United States and 1958 Rebellion*. 1981.

Dopepers, Daniel F. "An Incident in the PRRI/Permesta Rebellion of 1958" dalam *Indonesia*, 14 Oktober 1972.

Elidawati, "Latar Belakang Timbulnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat, 1948-1949", *Skripsi Sarjana*, Fak. Sastra Univ. Padjajaran, 1989.

Fachry Ali, "The Revolt of the Nation-State Builders: A Comparative Study of the Acehese Darul Islam and the West Sumatran PRRI Rebellions (1953-1962)" *Tesis Master*, 1994.

---, "Dua Cakrawala Ideologi dalam 'Pemberontakan Sumatera': Aceh dan Sumatera Barat dalam Dekade '50-an", *Makalah* pada Seminar Sehari PRRI 2000.

Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1962.

Hasril Chaniago, Khairul Jasmi, *Berigadir Jenderal Polisi Kaharuddin Datuk Rangkyo Basa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1998.

Hendra Esmara dkk., *Sumitro Djojokusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Ichlasul Amal, *Regional and Central Government in Indonesian Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1947-1979*. Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 1992.

Ismail Lengah, "Cerita Untuk Anak Cucu", *Manuskrip*, 1995.

Joni Patria, "Dewan Banteng di Sumatera Barat (1956-1958)", Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra Univ. Andalas, 1991.

J.R.Chaniago, "Dari Cerita Kasus-kasus yang Tercecer. Pengalaman Wawancara dengan Tokoh-tokoh PRRI", dalam *Lembaran Berita Sejarah Lisan*, No.10, Agustus, 1983.

Kahin, Audrey, *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.

Kato, Tsuyoshi, *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca, London: Cornell University Press, 1982).

Kementerian Penerangan, *Keterangan Pemerintah tentang Persoalan Sumatra* Djakarta: Penerbitan Khusus, 1958.

---, *PRRI. Penjelewanagan Jang Membahayakan Negara*. Djakarta: Kementerian Penerangan, 1958.

Kodam III/17 Agustus, *Sedjarah Kodam III/17 Agustus*. Padang: Sedjarah Militer Kodam III/17 Agustus, 1970

Lev, Daniel S., *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. Ithaca, N.Y.: Cornell University, Modern Indonesia Project, Monograph Series, 1966.

Makmum Salim, *Sejarah Operasi2 Gabungan Terhadap PRRI-Permesta: Seri Text-Book Sejarah ABRI (cet.ke-3)*. Jakarta: Pusjarah dan Tradisi ABRI, 1998.

Mestika Zed, Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang: Biografi Kolonel Ahmad Husein*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

---, Edy Utama dan Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta: Sinar Harapan, 1998.

--- , "PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterpretasi" dalam *Jurnal Studi Amerika*, Vol. IV, Januari-Juli 1999.

Mossman, James, *Rebels in Paradise, Indonesia's Civil War*. London: Jonathan Cape, 1961.

Muchtar Naim, Merantau: *Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.

Nopriyasman, "Gaduh di Ranah Minang: Suatu Studi tentang Pemberontakan PRRI", *Skripsi Sarjana*, Fakultas Sastra, Univ. Andalas, 1989.

--- , *Memoar Seorang Guru: Otobiografi H. Intan Djudin, Guru, Pejuang dan Pejuang Guru*. Pekanbaru: Keluarga Besar Intan Djudin, 2001.

Nugroho Notosusanto (ed.) *Sejarah Nasional Indonesia* (Jilid VI). Jakarta: Dep. Pend. dan Kebudayaan, 1975.

Nordholt, Henk Schulte, *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2002).

Nursuhud, *Menyingkap Tabir "Dewan Banteng"*. Djakarta: Jajasan "Pembaruan", 1958.

Onghokham, *Sapta Marga Berkumandang di Sumatra: Operasi-operasi Menumpas Pemberontakan PRRI*. Djakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1965.

Payung Bangun, *Kolonel Maludin Simbolon. Liku-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Reflis, "Ahmad Husein: Dari Cap Pejuang ke Cap Pemberontak", *Skripsi Sarjana*, Fakultas Sastra Univ. Andalas, 1998.

Rudy Pirngadi, *Peristiwa PRRI Ditinjau dari Sudut Sejarah TNI*. Djakarta: N.V. Endang, 1958.

R.Z. Leirissa, *PRRI-Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.

Saafroeddin Bahar, "Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Proses Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Sumatera Barat 1945-1984", *Disertasi Doktor Program Studi ISIPOL, Fak. Pasca Sarjana UGM*, 1996.

Sendam III/17Agustus, *Tjatur Warsa Kodam III*. Padang: Sendam III/17Agustus, 1970.

SESKOAD, *Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Penumpasannya* (Bandung; np., 1971).

Sjoeib, "Kondisi dan Status dari Affair PRRI dalam Sejarah Nasional",

*Makalah* pada Seminar Sehari PRRI, 2000.

Soeripto Putra Djaja, *Kegagalan Pemberontakan Husein Cs.* Surabaya: Grip, 1958.

*Sejarah TNI-AD 1945-1973: Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan NKRI* (Jilid 3). Bandung: Disjarah TNI-AD, 1979.

Soeripto Putra Djaja, *Kegagalan Pemberontakan Husein Cs..* Surabaya: Grip, 1958.

St. Moh. Rasjid, *The Birth of New Indonesia: Commemoration Monograph Genesis and Development of the Revolutionary Government of Republic of Indonesia.* Geneve: PRRI Mission in Europe, 1958.

Nasrul Hamdani:<sup>1</sup>

## AKTOR & AKSI KEKERASAN GAYA MEDAN 1945-1949

### PENDAHULUAN

**S**ajak daun tembakau pembungkus cerutu yang paling lezat di dunia dan hanya terdapat di tanah Deli, komoditas ini bernilai sangat tinggi. Tetapi di balik keuntungan besar, Deli identik dengan praktik kekerasan. Penanaman modal asing di perkebunan tembakau mendorong perubahan besar-besaran terhadap tatanan sosial, ekonomi dan politik tradisional. Bila sebelumnya tanah kurang berarti ekonomis, sesudah eksperimen Jacobus Nienhuijs di tahun 1863, tanah menjadi faktor paling penting dalam bisnis baru kaum kapitalis ini. Sultan Deli pun, dengan imbalan uang dari konsesi dan persen tanah, kian gencar melepas tanah di hutan-hutan dataran rendah bahkan tanah adat untuk lahan perkebunan tembakau yang 'boros tanah' digadaikannya. Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun telah berdiri 44 perkebunan baru, sebagian besar dikelola raksasa perkebunan swasta di Hindia Belanda: *De Deli Maatschappij*.

Kuli kontrak adalah poros tenaga kerja terpenting untuk membuka lahan, menanam dan memelihara pohon tembakau. Karena itu, pengerahan ribuan kuli kontrak dari berbagai tempat seperti pulau Pinang, Singapura daratan Cina dan pulau Jawa adalah model perbudakan yang sangat besar meraup laba bagi *De Deli Maatschappij*.

Seiring dengan perkembangan itu, lahirlah tatanan sosial dengan fenomena baru yang khas yaitu: masyarakat perkebunan. Dalam tatanan masyarakat perkebunan yang diskriminatif inilah adegan 'kekerasan ekstra legal' yang memilukan berlangsung menjadi tradisi. Dalam tatanan ini, berbagai bentuk penghukuman primitif dibenarkan terjadi untuk memberi pelajaran kepada kuli agar tidak melakukan kesalahan, dilakukan sendiri tanpa ijin sultan maupun badan peradilan. Inilah praktik paling keji di jaman kolonial yang dilegitimasi untuk memelihara hegemoni dari prinsip hubungan superior-inferior sekaligus menjaga mutu dan stabilitas produksi. Suatu peristiwa di tahun 1866, perintis perkebunan tembakau Deli, J. Nienhuijs pun merasa harus menghukum tujuh kuli Cina sampai mati demi tuntutan hegemoni itu. Begitulah awal dari praktik kesewenang-wenangan di perkebunan Deli. Pada tahun 1880/1881, model siksaan seperti dilakukan Nienhuijs dibenarkan secara hukum melalui pasal-pasal sanksi

<sup>1</sup> Hamdani adalah mahasiswa S-1 Universitas Sumatra Utara dan kini staf pengajar pada alma maternya.

penal dalam Koeli Ordonantie. (Harap baca van den Brand '*Nog Millioenen Uit Deli*').

Deli begitu kejam selama tahun-tahun terakhir abad ke-19, bahkan orang-orang Cina langsung panik bila mendengar kata 'Deli' di atas kapal yang sebenarnya membawa mereka ke Deli. Begitulah Deli, namun pada awal abad ke-20 perkebunan mengubah rupa Deli dengan mempersembahkan kota Medan yang cantik kepada dunia. Begitupun, sisi kelam dari 'budaya' perkebunan yang keras dipantulkan kota ini. Bukan sekedar pusat perekonomian baru yang menarik perantau, Medan juga menjadi tempat kesenangan, kemewahan dan mengekspresikan keangkuhan tiada tara bagi kalangan Deliaan atau 'Belanda kebon' yang merasa lebih pantas menghormati presiden direktur Deli Mij ketimbang gubernur jenderal Hindia Belanda. Setali tiga uang dengan lingkungan kerja mereka, Belanda kebon ini memiliki sifat-sifat khas: kasar, pemabuk, kurang adat, benci pada birokrasi, pokoknya benci pada apa saja yang menghambat pemupukan harta dan keuntungan. Beberapa ciri pokok kaum Deliaan ini kelak menjadi ciri 'orang Medan'.

Gemerlap kehidupan kota turut pula dinikmati sultan dan kaum bangsawan yang suka meniru kebiasaan kaum borjuis Eropa: menggelar jamuan, pesta-pesta dansa, pameran harta dan mengaku Belanda agak tampak berbeda dengan kebanyakan penduduk dari kaum sebangsanya, tetapi tanpa sadar ikut mempertajam perbedaan antara golongan kulit putih, kerajaan dengan bumiputera. Sesudah 1926/1927 pergerakan politik beralih ke sini, berhadapan dengan realitas politik yang sesungguhnya: jurang ekonomi yang lebar, pertentangan kelas dan sentimen antar etnik menguatkan anggapan orang luar betapa keras kehidupan di Medan. Begitupun dinamika pergerakan di sini tidak pernah lebih maju dari Semarang maupun Padang, tetapi aktifitas politik era 30-an ini telah memberi landasan kuat bagi gerakan sosial pada masa sesudahnya.

Pada masa Jepang, lansekap politik berubah total mengikuti aturan pemerintahan militer yang monolitik. Jepang membubarkan pemerintahan kolonial, mencabut hak politik kerajaan dan hak mereka atas tanah sehingga dominasi kerajaan merosot tajam. Sebaliknya, para kuli di perkebunan semakin percaya diri setelah 'mendapatkan' tanah. Meskipun tanah itu untuk program mobilisasi pangan, 'kepemilikan' ini mendorong polarisasi politik yang mencemaskan golongan kerajaan. Jepang pun menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh dari golongan bumiputera yang menjadi 'musuh politik' kerajaan melalui badan-badan propaganda. Hamka, konsul Muhammadiyah menempati posisi strategis di antara ulama lain. Karim M.S., tokoh komunis senior eks Digul diberi kesempatan memimpin BOMPA (Badan Oentoek Membantoe Pertahanan Asia), yang dalam satu propaganda di kalangan masyarakat pendatang ia berhasil mengobarkan semangat anti-kerajaan bahkan anti-Melayu.

Menjelang kalah, Jepang yang meragukan kesetiaan golongan kerajaan

merombak susunan Chuo Sangi-in; panitia kemerdekaan Sumatera, memasukkan tokoh-tokoh pergerakan dan menyisakan Tengku Saiboen sebagai wakil kerajaan. Inilah puncak dari kemerosotan peran sosial dan politik golongan kerajaan di Sumatera Timur. Polarisasi selama 1942-1945 ini membangun suatu poros kekuatan baru di kalangan bumiputera pendatang. Hari-hari terakhir menjelang proklamasi kedudukan politik golongan kerajaan semakin lemah dengan tidak seorang pun di antara para bangsawan Melayu yang dilibatkan dalam sidang-sidang pembentukan pemerintahan dan konstitusi Republik Indonesia yang tidak mengakomodasi kerajaan. Sebaliknya, tumbuh radikalisme terutama dalam aksi-aksi menuntut pembubaran kerajaan, selain aksi-aksi menentang kolonialisme terutama setelah pemerintahan Republik Indonesia berdiri.

## **MENUJU REVOLUSI**

Berita proklamasi kemerdekaan di Medan baru terwujud pada sebuah rapat umum di lapangan Fukuraido tanggal 6 Oktober 1945, atau lebih lama empat puluh empat hari sesudah Jakarta. Banyak hal yang menghambat tugas gubernur Mr.T.M Hasan yang berwenang menyiarkan kabar proklamasi itu, di antaranya persetujuan panjang gubernur Hasan dengan kalangan pemuda dalam menentukan tindakan politis apa setelah proklamasi diumumkan. Golongan pemuda menuntut tindakan konkret segera setelah proklamasi diumumkan: mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan melucuti senjata Jepang. Sementara itu, gubernur lebih menginginkan langkah-langkah pemindahan kekuasaan berlangsung secara damai berdasarkan petunjuk pemerintah pusat, termasuk di dalamnya mengakomodasi peran Sekutu. Namun di balik persetujuan itu ada persoalan besar yang menghadang langkah pemerintah, yaitu kebangkitan dan polarisasi kekuatan-kekuatan sektarian di masyarakat.

Sebelum mengumumkan proklamasi dalam suatu acara terbuka dan membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI), gubernur Hasan mencoba menjalin kontak dengan Dr. T. Mansjoer, ketua Shu Sangi Kai sekaligus tokoh paling berpengaruh dari golongan kerajaan agar rencana ini berjalan semestinya dan mendapat dukungan. Dengan berbagai pertimbangan, Mansjoer memberikan kesempatan mengumumkan kemerdekaan dalam sebuah rapat tertutup di gedung Shu Sangi Kai. Namun, hampir tidak ada respon dari golongan kerajaan yang diisukan sedang mempersiapkan suatu penyambutan atas kembalinya Belanda, polisi kerajaan pun dikabarkan gencar melakukan razia penangkapan orang-orang yang dianggap kolaborator Jepang dan telah mengambil alih pemerintahan. Terlepas dari kebenaran kabar-kabar itu, golongan kerajaan memang tengah melakukan konsolidasi untuk mengantisipasi kebenaran dari desas-desus proklamasi yang bisa saja menghalangi usaha pemulihan hak-hak kerajaan.

Pada pekan terakhir bulan September belum ada langkah konkret mengumumkan proklamasi sementara beberapa tokoh pemuda yang telah

mendapat kepastian proklamasi kemerdekaan dari sumber lain mendesak gubernur untuk segera bertindak. Berturut-turut sejak tanggal 17 September, National Control (NC) terbentuk sebagai representasi politik golongan kiri yang membina suatu 'hubungan bersyarat' dengan gubernur serta Barisan Pemuda Indonesia (BPI), perkumpulan lintas ideologi yang menampung golongan pemuda bekas pasukan pembantu Jepang dan yang terpenting apolitik. BPI inilah yang menjembatani kebuntuan rencana gubernur mengumumkan proklamasi. Dalam satu rapat pendahuluan, BPI mendaulat gubernur untuk berpidato mengenai berita proklamasi yang kemudian disambut luar biasa oleh sekitar 1.000 hadirin. Dalam acara itu BPI menyatakan siap mendukung suatu acara terbuka untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 6 Oktober. Maka sejak awal Oktober sampai menjelang hari 'H' berlangsung aksi memasang bendera merah-putih pada semua gedung yang diklaim milik republik. Beberapa dari aksi itu menimbulkan insiden dengan pasukan Jepang, hal ini menguatkan alasan pemuda untuk bertindak tegas, mengancam atau bila perlu dengan kekerasan.

Di tengah meningkatnya aksi-aksi pemuda di sekitar kota, tanpa disadari oleh golongan kerajaan sendiri kelompok ini mendapat kesempatan untuk menunjukkan eksistensi melalui acara penobatan putra mahkota Deli Tengku Osman menjadi sultan menggantikan ayahnya yang mangkat beberapa hari sebelumnya. Penobatan pada pagi 6 Oktober di halaman istana Maimun itu berlangsung megah di bawah kibaran bendera Belanda, dihadiri lebih dari 30.000 orang termasuk gubernur Sumatera yang ditempatkan di sudut ruangan, tidak lebih terhormat dibanding perwira Inggris, Belanda dan Jepang. Menjelang siang, bendera merah-putih berkibar di lapangan Fukuraido menandai rapat umum yang 'hanya' dihadiri beberapa ribu orang untuk mendengarkan pembacaan naskah proklamasi dan pidato singkat gubernur lalu dibubarkan dengan tertib. Berselang tiga hari, lebih dari seratus ribu orang terlibat dalam pawai besar-besaran untuk mendukung Republik di sepanjang jalanan kota Medan. Belum tampak sentimen anti-kerajaan, tetapi pawai itu berhasil mengesankan Medan telah berada dalam genggaman Republik.

Sekalipun mendapat dukungan massa, pemerintah Republik tidak dapat bergerak cepat dalam mengambil langkah-langkah konkret, bahkan untuk beberapa hal pemerintah di Sumatera ini kelihatan tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Seperti telah disebut, komunikasi dengan golongan kerajaan ditanggapi dingin menyusul beredarnya kabar Belanda pasti kembali yang membuat para sultan bergairah, terutama sultan Deli dan Langkat yang sempat mengirim surat tanda setia kepada ratu Belanda. Selain itu, tidak semua tokoh-tokoh pemuda, terutama yang berafiliasi ke NC tidak memberi dukungan penuh setidaknya bersyarat. Situasi ini tentu semakin merugikan pemerintah yang sedang menginginkan suatu pengakuan kerajaan-kerajaan atas Republik. Aktifitas pemuda lain yang bergelora dalam beberapa hari menjelang rapat umum pun terkena imbasnya, tidak ada gerakan berarti selain menunggu. Semangat pemuda bergelora lagi

setelah 5.000 pasukan penjaga status quo dari Inggris yang membonceng NICA mendarat di Belawan. Pemuda 'bergairah' seolah menemukan lawan sepadan, apalagi pengumuman pertama pasukan Inggris bersifat perintah yang terkesan menantang: 'terutama pemuda, supaya tidak mengganggu ketentraman orang Jepang, Sekutu, Cina atau Belanda'.

Aktifitas pertama-tama tentara Inggris segera menimbulkan kecurigaan dan mempercepat polarisasi kekuatan-kekuatan pro-republik. TKR yang berumur beberapa hari ikut bersemangat meski sadar tidak punya cukup kekuatan sekedar untuk bergerak. Sebaliknya, kutub-kutub kekuatan baru tumbuh dari kampung-kampung, kelompok-kelompok yang kemudian mengikatkan diri pada tentakel tokoh-tokoh beraliran kiri-radikal 'yang terpaksa' diakomodasi dalam pemerintahan untuk mengendalikan pemuda yang sedang membangun kekuatan bersenjata sendiri-sendiri atas dasar kesamaan etnis, lingkungan maupun keterikatan pada satu tokoh pada kelompok sosial yang sudah ada. Di Tembung, sekelompok pemuda pimpinan Jacob Lubis membentuk 'Pasukan Tembung'. Jalan Serdang dan Sentosa dikuasai laskar pimpinan Zaharsjah Aksjah. Laskar pimpinan Lahiraja Munthe menguasai jalan Sepat. *Onderbouw* NC, Barisan Pelopor pimpinan Marzuki Lubis menguasai daerah ekonomis di jalan Asia dan jalan Emas. Bedjo membentuk pasukan Naga Terbang di Pulo Brayan, anggota-anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda Jawa. Di Belawan, komando laskar dipegang M. Jusuf ditambah 'Pasukan Laut' yang dipimpin seorang eks-Kaigun, R. Sulijan. Di Polonia, pemuda Kasjmir membentuk Pasukan Udara. Di 'daerah Batak' Sei Mati terbentuk 'Pasukan ke-V' pimpinan W.F. Nainggolan dan seorang preman bermarga Sihite.

Sosok Karim M.S. pendiri NC pun segera populer di lingkungan kelompok-kelompok pemuda yang kian bersemangat mencari sandaran politis itu, dan dengan suatu 'pertimbangan khusus' gubernur ia diangkat sebagai koordinator TKR. Dalam posisinya yang strategis, sosok komunis flamboyan ini memainkan banyak peran terutama dalam menentukan arah dan sasaran radikalisme kelompok pemuda yang tampaknya diberi prioritas lebih daripada tentara resmi. Ia pun melibatkan kawan-kawan komunisnya yang mengakibatkan usaha konsolidasi kekuatan pro-republik tersendat-sendat. Salah satu sebabnya adalah, masing-masing dari mereka memelihara laskar yang setia dan memiliki persenjataan lebih baik daripada tentara resmi berkat posisi mereka dalam badan ini. Inilah yang selalu digunakan golongan kiri untuk 'menekan pelan-pelan' gubernur yang dinilai lembek itu. Selain itu, kebencian atas pribadi gubernur pun mulai diperlihatkan secara terbuka. Meski dibungkus rasa tidak puas, kebencian itu muncul karena sentimen etnis dan agama. 'Kelompok-kelompok etnis Batak' terutama orang Toba yang merasa 'kiri' dan tersisih dalam pergaulan masa sebelumnya karena kekristenan dan faktor 'Batak-nya' mulai unjuk kekuatan lewat aksi-aksi yang berlebihan.

Dominasi golongan kiri-radikal dalam pemerintahan dengan cepat menimbulkan ketidakpatuhan laskar-laskar pada perintah gubernur. Aksi-aksi penggedoran, penjarahan gudang-gudang milik Jepang perampokan atau pencurian barang-barang dari toko-toko milik orang Cina, India bahkan pejabat republik oleh kelompok yang mengatasnamakan republik berlangsung di mana-mana. Sebagian besar dari laskar pengacau itu pun berani menyatakan memiliki hubungan - meski sekedarnya- dengan tokoh kiri di pemerintahan untuk membenarkan tindakan mereka. Untuk hal ini para komunista itu tidak membantah dan tidak pula mengakuinya, tetapi menyatakan tindakan itu sebagai akibat lambannya tindakan gubernur mengantisipasi perubahan, sehingga membuat posisi mereka semakin kuat. Namun suatu yang tidak bisa dielakkan, yang merusak legitimasi kuasa golongan kiri atas laskar-laskar adalah konflik antar laskar. Penyebabnya, masing-masing ingin pengakuan atas suatu daerah kekuasaan yang bernilai ekonomis, pertentangan etnis, dendam pribadi sampai soal-soal yang sentimentil. R. Westerling, jeli memanfaatkan pertikaian itu untuk mengalihkan perhatian atas operasi polisionil mereka dengan cara-cara yang sangat sederhana; adu domba lewat surat kaleng berisi penghinaan. Meski pertikaian antar laskar dapat diselesaikan sekedarnya saat itu, laskar-laskar tetap menjadi kekuatan destabilisasi.

Peta kekuatan laskar dan konflik bahkan tidak berubah bahkan semakin kompleks pertentangannya ketika Jakarta mendorong demokrasi melalui pembentukan partai-partai politik yang dianggap dapat menertibkan perjuangan dari berbagai kelompok ideologis. Maklumat 3 Nopember 1945 menetapkan PNI sebagai partai negara -beberapa hari kemudian dibatalkan- segera menjadi partai besar oleh dukungan massa dan bergabungnya golongan kiri beserta kekuatan laskarnya. Namun partai ini, dan juga partai-partai lain tetap tidak cukup mampu mengendalikan jajarannya yang terdiri dari laskar-laskar kecil dengan reputasi jelek, bahkan tidak mampu menghindari perpecahan ketika harus Karim keluar untuk mendirikan PKI dengan Barisan Merah-nya. Setelah PNI membawahi Laskar Napindo, berdiri pula Parmusi dengan Sabilillah; Pesindo dengan Ksatria Pesindo-nya. Begitupun, konstelasi partai dan kelaskaran terus berubah akibat perseteruan perebutan sumber-sumber ekonomi antar laskar maupun laskar dengan partai sehingga kesetiaan komandan-komandan laskar sering berpindah dari partai satu ke partai lain yang menjanjikan pengakuan atas otoritas mereka.

Sebagai kekuatan politik, partai-partai cukup berhasil memainkan peran politik yang memaksa laskar-laskar tunduk pada garis perjuangan, tetapi tidak cukup mampu memenuhi hasrat laskar akan persenjataan dan daerah kekuasaan yang menghasilkan uang. Akibatnya persaingan antar laskar semakin tajam, penyerobotan tanah perkebunan, lucut melucuti, serang-menyerang dan penyelundupan menjadi ciri kawasan ini, melibatkan semua kekuatan bersenjata termasuk TKR yang cenderung menjauh dari daerah operasi Sekutu; Hatta sendiri pernah berkata 'di daerah itu (Sumatera Utara) banyak terjadi penyerobotan,

lucut-melucuti kurang disiplin dan korupsi'd Menjelang rasionalisasi laskar tinggal empat laskar yang dominan; memiliki persenjataan lengkap, pemimpin yang kharismatik, anggota yang setia, organisasi yang teratur dan ideologi yang semakin jelas, yaitu Napindo (PNI), Hizbullah (Masjumi), Barisan Merah (PKI) dan Kstaria Pesindo (Pesindo). Begitupun proses laskar partai menuju babak akhir revolusi sering terganjal oleh persoalan-persoalan kecil semacam sentimen agama, etnik, soal dikotomis kolaborator atau anti-Jepang dan koordinasi yang tidak tepat sehingga lebih sering menimbulkan kesalahpahaman.

Pada bulan Desember, menyusul pendirian 'Markas Agung' oleh golongan kiri yang tidak puas dengan kebijakan persuasif gubernur Hasan terhadap golongan kerajaan, babak baru perjuangan konfrontasi dimulai. Dalam beberapa hal Markas Agung dapat mengakomodasi keinginan partai-partai untuk menghabisi golongan kerajaan, namun pengaruh komunis dalam propaganda yang juga digunakan partai lain tidak bisa diabaikan dalam strategi konfrontasi politiknya selama 1945-1946. Melalui tokoh-tokoh sarat pengalaman semacam Nathar Zainuddin dan Junus Nasution, Markas Agung menjadi wadah berkembangnya ide-ide perjuangan dalam konteks pertentangan kelas dan radikalisme dalam aksi-aksi laskar serta organisasi yang berdiri sesudahnya, yaitu Volksfront (Februari 1946) yang menjalankan ide revolusi sosial dan Resimen Laskar Rakyat Medan Area (Agustus 1946). Sejak terbentuk, Markas Agung sudah merencanakan suatu tindakan keras terhadap golongan kerajaan melalui revolusi sosial yang berdampak luas dengan melibatkan seluruh badan-badan perjuangan, termasuk mempengaruhi kebijakan gubernur. Pada 3-4 Maret 1946 melalui tangan-tangan laskar yang menginduk ke Volksfront, Markas Agung 'sukses' menghabisi musuh-musuh feodalnya itu.

## **BABAK REVOLUSI**

Rentetan aksi kekerasan di Medan merupakan eksekusi dari himpitan masalah sebelumnya. Kekerasan taraf pertama pecah tanggal 13 Oktober di Pension Wilhelmina, asrama KNIL, seminggu sesudah pengumuman proklamasi. Insiden berdarah, yang konon dirancang NC 'sukses' memicu radikalisasi di kalangan pemuda yang semula ragu-ragu untuk bertindak. Pada hari itu tersiar kabar, seorang pemuda Indonesia dihajar serdadu KNIL setelah menolak menelan emblem merah putih yang dipakainya. Kabar tersebar cepat, dalam waktu singkat massa sudah berkerumun di depan asrama serdadu di jalan Bali yang tidak jauh dari Pasar Sentral untuk membuktikan. Keributan pun segera terjadi di barisan depan yang dijawab dengan tembakan dari dua serdadu totok di atas motor yang dipacu kencang. Massa dapat dibubarkan dengan meninggalkan seorang Indonesia yang tewas diterjang peluru. Menjelang siang, massa yang marah kembali dengan berbagai alat yang dijadikan senjata. Pisau, parang, golok, kayu panjang, balok kayu, tombak, cangkul, tongkat besi, lembing dan bambu runcing diacungkan di antara kerumunan. Sebagian alat-alat yang dijadikan senjata hari itu

diambil beramai-ramai dari toko-toko dan kios di pusat pasar.

Meski sempat menyusut karena himbuan Achmad Tahir, ketua seksi kelaskaran BPI dan peringatan pasukan Jepang, sekitar pukul satu kerumunan kembali membesar akibat 'provokasi yang tidak berhenti'. Di babak kedua, isu 'Provokasi NICA' mencapai maksudnya: massa menyerang, menerjang barikade truk pasukan Jepang, mendobrak gerbang asrama. Bersamaan dengan itu letusan-letusan senjata api terdengar lagi. Setelah usai, diketahui kalau kapten Groenenberg, tujuh serdadu KNIL dan dua orang berkebangsaan Swiss tewas; sebanyak 99 orang dari kerumunan menderita luka-luka, tiga orang di antaranya adalah perempuan. Sore itu semua serdadu dipindahkan ke barak Inggris di Polonia guna mencegah aksi susulan. Besok hari, seolah diilhami 'peristiwa di jalan Bali' sebuah hotel yang dijadikan markas NICA di kota Pematangsiantar luluh lantak diguncang aksi massa; 5 orang Belanda serta 12 serdadu KNIL tewas, beberapa pasukan Jepang ikut menjadi korban; 17 orang Ambon dan 10 orang Belanda tertangkap massa dalam insiden itu. Esoknya sebuah hotel yang dijadikan markas NICA di kota Pematangsiantar mengalami nasib yang sama.

Akibat dua peristiwa sporadis itu, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mengeluarkan maklumat 18 Oktober yang berisi bahwa setiap rakyat dilarang untuk memiliki dan menggunakan senjata api, bagi yang terlanjur memiliki harus menyerahkannya kepada Sekutu. Segera setelah itu jenderal yang bersitegang dengan Brondgeest soal rencana menangkap pejabat Republik yang dianggap terlibat dalam peristiwa di atas memerintahkan razia. Beberapa gedung yang diduduki pemuda dan pemerintah Republik diambil alih hanya untuk dikosongkan, redaksi surat kabar *Pewartu Deli* dan kantor gubernur diperiksa. Mohammad Said, sang pemimpin redaksi ditahan, sementara surat-surat termasuk pistol inventaris ke gubernuran hilang saat pengeledahan. Permintaan maaf Jenderal Kelly tidak bisa menahan rasa tersinggung gubernur. Selama itu berlangsung tingkat keamanan di kota menurun sampai titik terendah, terutama pemuda, pejalan kaki atau siapa saja yang berpapasan dengan patroli langsung diperiksa paksa tanpa kecuali. Di rumah-rumah pengeledahan terasa lebih kasar lagi, warga kerap mengeluhkan uang dan atau barang-barang mereka berharga selalu hilang dalam setelah pengeledahan, dari rumah-rumah di pinggiran kota alat-alat masak bahkan atap seng ikut diambil. Bersamaan dengan operasi Inggris, aksi-aksi kriminalitas mengatasnamakan republik terjadi di mana-mana, sasarannya adalah golongan penduduk asing terutama Cina oleh gerombolan. Selama bulan Nopember intensitas pencurian dan perampokan rumah dan toko-toko milik orang Cina meningkat di luar aksi penjarahan gudang-gudang Jepang. Serangan dan tindak kekerasan terhadap warga Cina dalam skala yang lebih besar terjadi setelah TKR-Pesindo menerbitkan pengumuman tentang ancaman hukuman bagi yang bekerjasama dengan musuh pada bulan berikutnya. Dalam ketentuan ini, semua warga Cina di dalam kota menjadi kelompok yang paling dirugikan

karena dianggap memiliki hubungan khusus dengan Belanda. Beruntung di antara bulan-bulan itu juga beberapa kali gencatan senjata disepakati. Inggris pun dapat memperluas daerah aman dengan menetapkan *Fixed Boundaries Medan Area* yaitu kawasan dalam radius 8 Km<sup>2</sup> dari batas terluar kota Medan sebagai daerah status quo. Dengan begitu serangan-serangan laskar mulai berkurang dengan sendirinya meski tidak berhenti sama sekali.

Penetapan kawasan penyangga yang terlarang bagi laskar secara tidak langsung memperkuat kedudukan pasukan Inggris. Secara teratur patroli-patroli pasukan ke tapal batas terjauh semakin sering dilakukan untuk mengusir laskar yang selalu tidak mematuhi kesepakatan, mereka melewati batas untuk sekedar masuk kekota melepas beberapa tembakau lalu pergi. Dalam hal ini, sekaligus usaha meminimalisir korban, pasukan Inggris yang kekurangan personel selalu menggunakan peralatan tempur berat dalam operasi pengusiran laskar. Dalam sebuah patroli mengamankan jalur transportasi utama Sumatera Timur di Selatan Medan tanggal 25 Juli 1946 misalnya, pasukan Inggris mengerahkan 2 pesawat pemburu, 4 tank dan sejumlah personel yang diangkut 43 truk. Patroli hari itu berhasil memukul mundur laskar-laskar yang bersembunyi di sekitar kampung-kampung perkebunan di Tanjung Morawa, Patumbak, Amplas dan Mariendal. Bila sudah demikian, patroli selanjutnya diarahkan ke perkampungan penduduk terdekat, di sini Inggris biasa menangkap penduduk, merusak bangunan dan rumah-rumah kosong dengan mortar.

Di sela-sela perang, Markas Agung tidak melupakan rencana untuk melancarkan suatu aksi revolusi yang sebenarnya atas golongan kerajaan. Di tengah meningkatnya patroli Inggris menekan laskar, PKI mengajukan proposal 'pembersihan republik dari pengkhianat dalam golongan kerajaan' dengan menunjuk sayap militer kerajaan seperti Siap Sedia (SS) dan Persatuan Anak Deli Islam (PADI) yang dikabarkan bangkit kembali. Proposal ini segera didukung partai-partai, dengan suatu catatan harus tertib, tanpa mobilisasi massa dan hukum harus dijunjung tinggi, ketua KNI Sumatera Timur Mr. Luat Siregar menyetujui rancangan itu meski tahu sudah muncul respon positif kerajaan atas kedudukan republik. TRI ditunjuk sebagai peninjau yang mengawasi aksi 'bersih-bersih' yang sepenuhnya dijalankan laskar-laskar partai. Maka dimulailah aksi-aksi revolusi sosial lebih awal, setelah SS dan PADI ditaklukan para sultan dan rajaraja menjadi sering menerima ancaman terutama setelah Volksfront berdiri.

Akhir Februari, gubernur yang tidak setuju dengan tindakan memaksa kerajaan 'diamankan' melalui tur Sumatera mengunjungi beberapa propinsi di selatan, sementara wakilnya, Dr. Amir diyakinkan untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Pematangsiantar dan Asahan. Awal Maret 1946, PKI, PNI dan Pesindo mempersiapkan aksi pembersihan keras yang dilakukan di berbagai tempat. Yang menarik ide-ide kiri, nasionalisme maupun demokrasi tidak begitu penting dalam persiapan revolusi yang emosional ini. Justru kedekatan para sultan dan raja-

raja dengan Belanda-lah yang mendapat respon, 'disikat saja!', 'lipat saja!' dan sebagainya.<sup>f</sup> Selanjutnya, tanggal 3 Maret, massa ketiga partai dalam jumlah besar menyerbu Istana Sunggal, membunuh Datuk Sunggal yang telah berusia lanjut. Beberapa anggota keluarga dan pegawai kedatukan yang tidak termasuk dalam daftar orang yang dicari, ikut dibunuh massa termasuk menghabisi tiga ksatria Melayu yang ingin mati terhormat dengan cara mengamuk. Aksi permulaan itu membuat suasana Medan mencekam selama beberapa hari. Istana Maimun luput dari amuk massa berkat penjagaan Inggris.

Dari Medan revolusi merembet ke Simalungun, Tanah Karo dan Langkat. Padahal, sehari sebelumnya sultan Langkat sudah mendukung Republik dan mengibarkan bendera merah-putih. Pengakuan itu pula yang membuat sultan patuh saat Volksfront melucuti senjata polisi dan segera tak berdaya ketika 37 bangsawan Langkat ditangkap termasuk penyair T. Amir Hamzah, wakil pemerintah NRI di Langkat. Setelah ditahan dua minggu di penjara Kebun Lada Binjai, seluruh bangsawan Melayu itu dibunuh di ladang tebu Kuala Begumit. Tanjungpura ibukota kerajaan kacau-balau oleh pembakaran, penjarahan, perampokan dan perkosaan. Sultan Abdul Jalil Rahmatshah dan putra makhota Tengku Musa diselamatkan dua pemimpin laskar dengan motif yang tidak diketahui. Beberapa hari setelah kejadian itu, dua pemimpin laskar di Tanjung Pura diburu oleh oleh Barisan Merah yang juga mengincar sultan. Setelah ditangkap, kedua pemimpin laskar itu dihukum mati dengan tuduhan 'melanggar moral revolusi, merugikan nama baik revolusi'. Sultan dan pangeran dapat diselamatkan TRI ke Pematangsiantar.

Kerajaan Serdang di Perbaungan pun kena imbasnya. Meskipun tidak separah Langkat, tindak kekerasan, penjarahan, perampokan dan pembunuhan terjadi juga. Istana Kota Galuh, sebagian besar keluarga bangsawan dan harta benda kerajaan senilai *f*.10 juta pun dapat diselamatkan. dengan jaminan keamanan TRI. Persoalan baru justru muncul dengan harta benda sultan Langkat yang dititipkan kepada detasemen polisi di Binjai dan harta Serdang yang disimpan di salah satu bankkluis di Pematangsiantar. Sesudah dititipkan, harta benda kerajaan Langkat sebanyak 16 peti ukuran kecil dan satu ukuran besar tidak pernah lagi diketahui rimbanya. Tidak ada dokumen apapun yang dapat membuktikan penitipan itu, juga harta sultan Serdang. Harta-harta feodal terpecah di mana-mana dan saling diperebutkan antara TRI juga sesama laskar, kegiatan inilah yang menciptakan medan-medan pertempuran baru di berbagai tempat di Sumatera Timur, dengan kawasan Medan Area sebagai indikator keberhasilannya.

Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hasan menyesalkan peristiwa yang menentang otoritas pemerintahan, hukum yang sah, melancarkan teror, memaksakan keinginan sendiri, pembunuhan, dan aksi brutal lainnya. Namun ia dapat menerima bahwa revolusi sosial dalam pengertian sebagai aksi politik radikal yang didukung oleh rakyat luas dan memiliki tujuan politik yang jelas. Hari-hari

gubernur Hasan sesudah peristiwa berdarah itu jadi bertambah sulit sebab, meski menjadi klimaks revolusi, aksi-aksi kekerasan tidak berhenti dengan segera. Terutama laskar-laskar semakin tidak patuh, mengganggu ketertiban penduduk, saling berperang memperebutkan perkebunan-perkebunan di sekeliling Medan. Sementara ancaman Belanda yang menggambilalih tugas Inggris sudah tampak di depan mata. Puncak kesulitan gubernur terjadi ketika agresinya Belanda memaksa seluruh kekuatan republik harus mundur ke pedalaman yang secara ekonomis tidak berarti apa-apa. Di sini, pertentangan dari Medan mencuat kembali dan mengeruhkan suasana.

## **PENUTUP**

Aksi-aksi kekerasan selama revolusi mencapai sudah puncaknya, namun mengiringi lemahnya kontrol republik atas alat-alat kekuasaan negara menjadikan kekerasan sebagai satu-satunya cara dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tercatat aksi-aksi pencurian, perampokan dan pembunuhan orang-orang yang dianggap 'mata-mata Belanda' semakin sering terjadi. Warga Cina menjadi sasaran utama yang kemudian membela diri dengan membentuk (milisi) Pao An Tui. Pengalihan kekuasaan kepada Belanda yang segera memperluas daerah status quo semakin mendorong aksi-aksi pembalasan laskar, sehingga daerah pendudukan tidak lebih aman dari daerah-daerah yang secara de facto telah dikuasai republik. Ini adalah kumpulan realitas dari sebuah revolusi yang berlangsung begitu rumit. Kekerasan sudah menjadi bagian dari sejarah masyarakat/warga di kota yang memang dikenal keras sejak dahulu. Begitupun. Fragmen-fragmen kekerasan dalam sejarah sosial di kota perkebunan ini tidak lebih dari sekedar refleksi yang tidak menampilkan realitas secara utuh, kekerasan (dan sifat/sikap bergaya keras) sebagai jawaban atas kegamangan menghadapi perubahan cepat dan krisis yang mengubah identitas seseorang atau kelompok.

Kekerasan yang berlangsung bukan sekedar masalah politik, tetapi sangat terkait dengan masalah sosial ekonomi. Nilai-nilai dan semangat revolusi yang mengharuskan perjuangan bersenjata dan pantang menyerah, seperti memberi ruang bagi kekerasan yang dengan mudah diikuti oleh kelompok-kelompok yang sudah berpengalaman dengan tindak kekerasan. Sehingga tindak kekerasan yang dianggap lazim dalam sebuah aksi revolusi akhirnya hanya menjadi ingatan yang dikenang oleh pelaku revolusi sebagai tindakan heroik. Sebaliknya bagi korban, aksi revolusi yang mengorbankan diri, kerabat dan pengikutnya akan lebih baik bila dilupakan. Hal inilah yang tersulit, karena ia adalah tragedi. Pelaku revolusi pun kerap menampik cara-cara kekerasan yang dilakukannya, karena merasa pantas melakukannya. Terlepas dari ide revolusi di Medan 'rasa bangga (pernah) melakukan kekerasan' selalu membuncah dan menjadi sifat kolektif dari kebanyakan orang Medan hingga saat ini, meski ada pameo, kekerasan adalah tanda dari kelemahan.

*Emil W. Aulia*

## BROSUR VAN DEN BRAND

### CUPLIKAN DARI “KEKERASAN DI KAWASAN MEDAN”

**D**ibalik keuntungan yang besar, perkebunan tembakau di Deli identik dengan praktik kekerasan. Berikut ini kisah luka-luka ribuan kuli kontrak yang ditulis oleh seorang Belanda, Mr. J. van den Brand. Sebagai ahli hukum Brand tinggal di Medan, melihat semua kebijakan negaranya tentang salah urus dan kekejaman di perkebunan tembakau Deli. Brand kemudian memasuki kancah politik lokal dengan menjadi anggota Dewan Kota Praja Medan. Karena kritik Brand yang pedas, dia dikucilkan dalam pergaulan Eropa di Medan. “Mereka mengatakan tidak ada kekerasan yang diakibatkan aturan kuli ordonansi ....” (2006:233). Brand dituduh pengacara yang tak laku, karena itu dia mencari berita sensasi murahan ....

Brosurnya yang berjudul *Millioenen uit Deli* (1902) mendapat kritikan seru. Untuk menjawab semua kritikan keras itu, Brand menulis lagi, *Nog Eens: De Millioenen uit Deli* (1904). “Belanda dan Hindia gempar. Semua orang membicarakan *Millioenen uit Deli* yang Tuan tulis. Tuan telah membuat sejarah. Luar biasa,” ujar J.T.L. Remrev, mantan jaksa di Pengadilan Tinggi Batavia. Remrev dipindah ke Medan, atas perintah Gubernur Jenderal Rooseboom di Batavia (2006:228 – 229).

Tetapi sebaliknya di Sumatra Timur, sejak brosur tersebut terbit, “para tuan kebun dan pendukung *poenale sanctie*<sup>111</sup> tampak sangat terganggu,” demikian van den Brand. Ahli hukum pencari keadilan ini mendapat dampatan hebat dari rekan-rekan senegaranya. “*Dia tidak cinta tanah air. Dia pria yang tidak tahu berterimakasih. Dia sudah mengotori Deli, tempat dia mencari makan dengan kotorannya sendiri*” (2006:238). J. van den Brand meninggal di Medan, sewaktu menunggu kapal yang akan membawanya pulang ke Belanda.

Berikut ini kutipan dari *Millioenen uit Deli* (1902) dan *Nogs Eens: De Millioenen uit Deli* (1904), novel karya Mr. J. van den Brand yang diolah-terjemahkan oleh Emil W. Aulia dengan judul: *Berjuta-juta dari Deli – Satoe Hikajat Koeli Contract*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006:209-215)

<sup>111</sup> *Poenale sanctie* adalah undang-undang yang berisi syarat-syarat pekerja kontrak yang bila dilanggar (misalnya melarikan diri sebelum kontrak habis) berakibat si kuli kontrak mendapat hukuman yang sangat kejam. *Poenale Sanctie* ini tak pernah dicabut dan karena semakin banyak kuli-kuli yang melarikan diri, 1908 diganti dengan sidik jari dan kartu pengenalan (Karl J. Pelzer, 1978:170).

## “JUMINI”

*DERAI hujan memukuli bangunan bungalow dan pekarangan. Rintiknya terdengar menembus hingga ke kamar. Angin menderu-deru, menghempas jendela dan gordena. Diranjangnya yang berkelambu, dengan seprai yang acak-acakan, Tuan Le tidur dengan mulut menganga. Di sebelahnya, seorang perempuan, dengan keringat yang membasahi tubuhnya yang sawo matang, terbaring pasrah. Perempuan itu diam. Wajahnya beku. Hanya sepasang matanya bergerak-gerak, mengikuti seekor cicak yang merayap di langit-langit kamar.*

*Pelan-pelan, Jumini melepaskan tangan kiri Tuan Le yang terkulai di atas perutnya. Tangan itu ditumbuhi bulu-bulu kemerahan dengan daging-dagingnya yang putih kenyal, berminyak, penuh bercak-bercak berwarna coklat. Hati-hati Jumini meletakkan tangan itu ke sampingnya. Dia menahan napas saat dilihatnya Tuan Le menggeliat, berbalik, menghadapkan tubuhnya ke dinding. Dengan mata terpejam, tangannya meraih guling, mendekapnya erat, meneruskan tidurnya yang lelap. Jumini mendengar suara gigi-geligi pria itu bergemeretak.*

*Yakin Tuan Le pulas, Jumini menyibak kelambu lalu turun dari tempat tidur. Sekarang dia kenakan setagen dan melilitkan sarung. Kaki-kakinya yang kecil kemudian melangkah, pelan beranjak mendekati meja bundar yang berada di sudut kamar. Pada cermin di atas meja, diperhatikannya bajangan yang terpantul. Seraut wajah yang sendu, menyimpan sesuatu. Entah apa. Adakah Jumini tahu kalau dia menawan?*

*Cukup lama Jumini mengamati bajangan wajahnya hingga akhirnya dia meraih sebatang sisir dari dalam laci. Diperhatikannya lagi bayangan dicerminkan itu sebelum dia benar-benar menyisir rambutnya yang hitam, yang berderai jatuh dibahunya yang kecokelatan.*

*Beberapa hari ini, Jumini suka mematut diri di cermin.*

*Memandangi pipi, hidung yang ramping dan alis mata yang memayungi sepasang mata kanak-kanaknya yang bukat. Adakah dia tahu kalau cermin itu melukis wajahnya yang cantik?*

*Apalah artinya cantik. Itu hanya sebuah kata. Sebuah bunyi. Jumini tidak peduli. Baginya, kata cantik adalah suara desau angin musim kemarau yang mnampar-nampar dedaunan dan tiang bamboo hingga menimbulkan suara gemerisik.*

*“Kamu cantik, Jumini. Tubuhmu membuat saya berahi. Mulai sekarang amu tinggal di rumah ini!” Demikian Tuan Le berkata kepadanya. Lebih setahun lalu.*

*Tuan Le tidak membolehkan Jumini jadi kuli lagi. Jumini mengangguk.*

*Dia tidak bisa menolak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa menolak? Dia orang kontrak. Harus patuh. Harus tunduk. Lelaki Eropa itu sudah bertitah. Siapa berani membantah?*

*Kemudian hari menggelinding. Matahari terbit lalu tenggelam. Pagi datang membuka tirai kegelapan, senja menutupnya. Setiap hari Jumini menyiapkan makanan untuk Tuan Le. Dia menyampaikan apa yang dia lihat dan dengar tentang segala sesuatu yang terjadi dan dibicarakan di bangsal-bangsal kuli. Hari berlalu dan terus berlalu. Tidak penting baginya mengingat waktu yang bergulir. Tidak ada yang perlu diistimewakan. Tidak ada yang perlu dicatat apalagi dipikirkan.*

*Jumini tidak memikirkan hari-hari yang dilewatinya namun bayang-bayang kebengisan yang diiringi pekik kesakitan itu selalu datang setiap pikiran dan hatinya tercenung. Di samping bungalo, ada bangunan kayu berdingding tepas dengan bagian depannya yang terbuka. Derai hujan malam ini memukuli bangunan itu.. Angin mengayun-ayunkan ujung-ujung atap yang terbuat dari daun nipah. Sesekali kilat menyambar, membungkus bangunan itu dalam cahaya birunya yang buram.*

*Di balik derai hujan, bayangan-bayangan menakutkan berkelebat dari ruangan itu. Di situ, di ruangan itu, Tun Le biasa menyiksa kuli-kuli yang dianggapnya malas, ceronoh, tidak cakap atau menyebalkan. Hukuman keras yang dijatuhkan kepada kuli-kuli itu seperti memberi kepuasan tersendiri baginya. Tuan Le senang membuat ciut nyali kuli-kuli lain agar tidak berbuat yang tidak disukainya.*

*Dari balik jendela, Jumini melihat Saman tergantung di sebatang kayu. Tubuhnya basah oleh hujan yang mengguyur. Entah masih hidup atau sudah mati, Jumini tidak tahu. Tadi sore, orang-orang Batak itu membawanya, lalu menyerahkannya pada Tuan Le.*

*Saman, tentu bukan orang pertama yang berada di tempat itu. Masih tegas menjejak dalam ingatan Jumini bagaimana Kasina Satu, empat hari yang lalu, dipukuli dalam keadaan telanjang, juga di ruangan itu. Tangan dan kakinya terikat pada sebuah tiang. Tuan Le mengayunkan tongkat rotannya hingga kepala perempuan itu mengucurkan darah dan beberapa giginya rontok. Suara erangannya masih tersisa di otak Jumini.*

*Lalu bayangan keji lainnya datang mendesak. Tuan Le menghajar dua orang kuli perempuan sekaligus: Rasiem dan Sumina. Seperti Kasina Satu, mereka juga ditelanjangi saat pundak mereka dihantam kayu hingga kedua lengan mereka patah; muka bonyok, pinggang keselo dan kemaluan berdarah. Bayangan lain sekonyong-konyong menerobos dan mendesak pula. Samina, Isa Dua dan Kariosumito mendapat hukuman serupa, dengan lolongan yang sahut menyahut. Kecuali Kariosumito yang entah kenapa tiba-tiba meludah saat dipukul, Tuan Le*

memberinya hukuman tambahan: menyuruh kuli itu merangkak dan memakan tahi kuda.

Orang-orang hanya bisa memandang kasihan setiap ada kuli yang bisa keluar dengan nyawa masih di badan dari neraka itu. Namun tidak untuk Samina. Setelah bebas dari tempat penyiksaan itu, kini orang-orang malah mentertawakannya. Setiap hari, kerja Samina Cuma mondar-mandir di depan biliknya dengan langkah kaki gemetar dan kedua tangan pengepit di samping. Dia tampak lucu. Lebih lucu lagi kalau dia terkejut saat anak-anak melempar seekor ayam ke hadapannya. Samina akan melompat, terpekik, meraung, bersembunyi di balik pintu lau tiba-tiba tertawa. Begitu melihat Samina tertawa, pecah pula tawa mereka.

Dalam menerapkan hukuman, Tuan Le agak berbeda dengan tuan kebun lainnya. Dia tidak terlalu suka memasukkan kuli yang bersalah ke dalam penjara.

"Penjara, bukan cara menghukum yang baik," katanya di suatu sore pada seorang asisten muda.

"Kenapa?"

"Itu memboroskan waktu. Tenaga kuli yang seharusnya bisa dipakai menjadi mubazir. Dari pada dia dipenjara, lebih baik membuatnya jera dengan dipukuli!"

Derai hujan mengucur kian deras. Angin menderu-deru. Langit hitam pekat bagai raksasa tak terkalahkan. Pelan dan lembut, Jumini sekarang mengusap perutnya. Telapak tangannya merasakan ada sentakan di dalamnya. Sentakan halus yang seperti meronta, meminta elusan. Khidmat dan suci Jumini membelai-belai perutnya. "Mungkin kamu hamil," terngiang di telinga Jumini perkataan seorang perempuan tua kepadanya saat mereka bertemu di warung perkebunan tadi siang.

Sudah empat bulan Jumini tidak haid. Apalah itu tanda kalau dia hamil? Tidak, tidak ... Jumini tidak menginginkan itu. Sebulan lalu, Tuan Le mengusir Tugiyem karena ketahuan hamil!

Tugiyem, perempuan yang sejak setahun ini juga menemani Tuan Le tidur. Berdua mereka – Jumini dan Tugiyem – menemani lelaki Belanda itu di ranjangnya setiap malam. Hingga benihnya yang bertumpahan itu kemudian menyemai kehidupan di dalam perut mereka. Tugiyem diketahui hamil lebih dulu. Sekarang, Jumini juga hamil dan kalau Tuan Le tahu, dia juga akan diusir seperti Tugiyem.

Di perkebunan mana pun di Deli, kebanyakan laki-laki Eropa tidak mau direpotkan oleh gundik-gundiknya yang hamil. Mereka tidak butuh anak-anak

yang dilahirkan dari rahim perempuan-perempuan pribumi. Mereka juga tidak butuh perkawinan resmi. Untuk apa? Itu semua hanya membuat repot. Perempuan hamil banyak permintaan, selalu berkeluh-kesah dan tubuh mereka menjadi jelek. Aturan yang ada juga membelenggu. Lelaki Eropa dilarang menikah dengan perempuan pribumi. Kalau ada yang menikah, mereka tidak boleh pulang ke tanah air mereka kalau membawa anak-anak dan isteri-isteri pribumi mereka.

Tentu mereka tidak mau direpotkan oleh hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik hidup bersama saja tanpa ikatan. Selain kebutuhan berahi terpenuhi, kapan saja mereka memutuskan pulang ke tanah airnya, mereka bisa membebaskan diri dari segala ikatan. Toh, di Eropa lebih banyak perempuan cantik yang bisa mereka pilih menjadi isteri dari ras mereka karena mereka membawa uang berkoper-koper.

Gundik-gundik yang diusir, tak ada yang kembali. Sebelum Tugiyem, ada beberapa gundik lain yang juga dienyahkan. Mereka tak pernah kembali kecuali kabar pilu tentang nasib mereka. Beberapa meregang nyawa saat dipijat dukun. Beberapa merasakan kerongkongannya tercekik setelah meminum ramuan pembunuh janin. Beberapa lainnya menjadi pelacur untuk membesarkan anak-anak yang dilahirkan.

Di luar hujan turun makin rapat. Petir menggelegar. Langit seperti bobol. Kembali Jumini mengelus perutnya. Elusan yang tiba-tiba terlihat ganjil. Elusan yang sekonyong-konyong menjadi remasan yang mencengkeram. Keras dan menekan-nekan.

SUARA tong-tong memcah subuh yang dingin. Gemanya menyelubung perkebunan. Kuli-kuli bangun, keluar dari pondok-pondok membawa mata yang mengantuk. Dingin menggantung. Setengah jam kemudian, gaung percakapan menyeruak dari dalam barisan. Kuli-kuli berbicara lebih keras dan lebih banyak. Hal yang tidak biasa.

"Jumini mati."

"Mati?"

"Kenapa?"

"Dia mati bunuh diri."

"Di mana?"

"Di rumah Tuan Besar."

"Dia mati tergantung di rumah Tuan."

"Innalillahi wa innailaihi rojiuun."

"Kasihannya betul."

"Eh, oh, kasihan, ya."

"Kabarnya dia sedang hamil."

"Aku dengar juga begitu."

"Dia hamil?"

"Sehari sebelum meninggal dia bilang sudah tiga bulan tidak datang bulan."

"Empat bulan atau tiga bulan?"

"Kenapa dia bunuh diri?"

"Entahlah."

"Padahal hidupnya senang."

"Tentu, dia kan nyai."

"Tuan kasih dia baju bagus."

"Semoga dia masuk sorga."

"Orang bunuh diri tidak masuk sorga."

"Hus!"

"Tidak baik ngomongin orang mati."

"Aku kira dia masuk neraka."

"Hus!"

"Kenapa?"

"Dia kan makan babi."

"Hus!"

"Dia juga zina sama Tuan."

"Hus!"

"Apa bedanya sama kamu? Kamu kan juga berzina sama kuli-kuli Cina itu?"

Beberapa opas lewat melintas, menggotong tubuh Jumini yang telentang di atas tandu. Wajah Jumini pasi. Matanya melotot, Sarungnya berantakan. Pahanya yang putih pucat dan licin tersingkap. Cahaya matahari pagi menyentuh kulitnya. Sepasang paha itu berkilatan seperti sendok perak.

"Kasihannya, ya."

"Eh, oh, iya, kasihannya ..."

"Dia mati muda."

"Dia bodoh sekali. Kenapa mesti bunuh diri?"

"Tapi, pahanya mulus juga."

"Hi ...hi ... hik."

"Huss!"

Andi Suwirta\*)

## SURAT KABAR SOEARA MERDEKA:

### DARI BANDUNG KE TASIKMALAYA, 1945-1947

**K**ekalahan Jepang dalam Perang Dunia II (1939-1945) membawa pengaruh bagi perkembangan sosial-politik di Indonesia. Tentara pendudukan Jepang yang otoriter dan represif, tidak lagi berdaya di Indonesia. Kekuatan-kekutan yang bersifat revolusioner dari masyarakat – yang selama ini dibungkam oleh rezim militer Jepang – melesat ke permukaan dan mengalir laksana air bah yang dahsyat.

Dalam suasana yang seperti itulah, pers bangsa Indonesia bermunculan sekitar Agustus 1945. Kehadirannya sangat berperan bukan saja untuk penerangan dan koordinasi bagi hasrat besar bangsa yang ingin bebas merdeka, tetapi juga untuk memahami visi dan misi dari para pemimpin bangsa tentang bentuk kemerdekaan yang dicita-citakan.<sup>1</sup>

Sekitar 1,5 bulan setelah proklamasi (17 Agustus 1945), surat kabar resmi yang semula milik Jepang diambil paksa menjadi surat kabar “milik Republik” oleh pemuda pelajar yang punya pengalaman di bidang jurnalistik. Misalnya surat kabar *AsiaRaya* di Jakarta menjadi *Merdeka* (1 Oktober 1945-2002), *Tjahaja* di Bandung menjadi *Soera Merdeka* (September 1945-Juli 1947), *Sinar Baroe* di Semarang menjadi *Warta Indonesia* (September 1945-November 1945), *Sinar Matahari* di Yogyakarta menjadi *Kedaulatan Rakyat* (27 September 1945-sekarang) dan *Soera Asia* di Surabaya menjadi *Soera Rakjat* (Oktober 1945-Juli 1947).<sup>2</sup>

Surat kabar di kota-kota lain juga bermunculan. Hal ini sejalan dengan anjuran pemerintah, selain keinginan dari masyarakat sendiri, untuk mendirikan surat kabar sebanyak mungkin sebagai manifestasi dari revolusi Indonesia yang demokratis. Maka di Jakarta, selain surat kabar *Merdeka*, terbit pula *Berita Indonesia*, *Ra'jat*, dan *Negara Baroe*; di Bogor dan *Gelora Rakjat*; di Cirebon ada *Republik* dan *Genderang*; di Magelang ada *Penghela Rakjat*; di Yogyakarta, selain *Kedaulatan Rakjat*, ada *Al-Djihad*, *Boeroeh*, dan *Nasional*; di Surakarta ada *Lasjkar*, *Soera Moeda*, *Menara Islam*, dan *Perintis*, di Madiun ada *Api Rakjat*; di

1 \*) Drs. Andi Suwirna, M.Hum. adalah Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Suwirna adalah juga Wakil Ketua MSI Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat. Ulrich Kratz, “Peranan Pers dalam Revolusi” dalam Collin Wild dan Peter Carey (eds.), *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 49-51.

2 Tentang perubahan surat kabar dari *Asia Raya* ke *Merdeka*; dan *Soera Asia* ke *Soera Rakjat*, lihat JR. Caniogo et al., *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka, 1945-1985* (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987), hlm. 23-24; dan Nuriwita Ki S. Hendrowinoto, *A. Azis Wartawan Kita* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm. 82-103.

Mojokerto ada *Bhakti*; di Malang ada *Berdjoeang*, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam hal ini kebebasan pers untuk mengekspresikan pendirian, sikap, dan pandangannya sangat jelas pada masa awal revolusi Indonesia. Semangat yang meluap dari rakyat untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan, radikalisme sebagian besar pemuda untuk merebut senjata dari Jepang, dan pertempuran melawan tentara Sekutu yang diboncengi NICA-Belanda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, menjadi berita utama dan disorot dengan tajam oleh surat kabar pada waktu itu. Identifikasi pers sebagai pembawa suara dan aspirasi rakyat, nampak dari pemilihan nama penjaga kolom catatan pojok yang populer pada masing-masing surat kabar. Misalnya "Mas Kloboth" atau "Dr. Clenic (*Merdeka*)", "Mas Semprot" atau "Semar" (*Kedaulatan Rakjat*), "Bang Djeboel" (*Berita Indonesia*), "Bang Bedjat" (*Al-Djihad*), "Fikiran Rakjat" (*Warta Indonesia*), "Podjok Kiri" (*Genderang*), "Soedoet Tikam" (*Api Rakjat*), dan sebagainya.

Aneka karikatur, walaupun tidak banyak, untuk menyindir atau mendeskreditkan pihak lawan, terutama tentara Inggris dan Belanda, disajikan dengan cara terus terang. Sedangkan slogan, motto, atau kata-kata mutiara untuk membangkitkan semangat rakyat, sebagai renungan, dan arah perjuangan, ditempatkan pada bagian muka sudut kanan atau kiri surat kabar. Semuanya itu menunjukkan bahwa pers memiliki peranan yang tidak kecil sebagai "pengawal pendapat umum" selama revolusi Indonesia berlangsung.

Apa yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah melihat perkembangan surat kabar *Soeara Merdeka* di Bandung pada masa revolusi Indonesia. Sebagai surat kabar yang terbit di daerah pendudukan (karena sejak bulan Oktober 1945 tentara Inggris dan Belanda sudah menduduki Bandung), *Soeara Merdeka* menarik untuk dikaji dalam hal: (1) proses kelahiran dan perkembangannya; (2) pandangan surat kabar tersebut sebagai refleksi dan visi para redaktornya; serta (3) akhir dari pendudukan surat kabar *Soeara Merdeka* di daerah pendudukan ini. Pada bagian akhir akan dilihat sekedar perbandingan dengan surat-surat kabar di daerah lain yang terbitan sezaman dengan *Soeara Merdeka* di Bandung. Betapapun usianya singkat (1945-1947), *Soeara Merdeka* merupakan saksi aktual sezaman untuk masyarakat Bandung dan Tasikmalaya khususnya, serta Jawa Barat umumnya pada masa revolusi Indonesia.

## SOEARA MERDEKA DARI BANDUNG KE TASIKMALAYA

Surat kabar *Soeara Merdeka* terbit pada bulan September 1945.<sup>4</sup> Surat kabar ini terbit di atas reruntuhan surat kabar *Tjahaja* milik Jepang di Bandung. Dalam

3 Wartiini Santoso, *Katalog Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Nasional 1810-1984*, (Jakarta: Perpustakaan-Depdikbud, 1984).

4 Edisi perdana *Soeara Merdeka* yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta adalah tanpa nomor, tanggal, bulan dan tahun terbitan. Namun menurut John R. Smail dalam studinya *Bandung at the Early Revolution 1945-1946* (Ithaca, New York: Cornell University, 1964), hlm. 49, *Soeara Merdeka* terbit pada tanggal 17 September 1945.

hal ini peran yang dimainkan oleh Boerhanoeddin Ananda dan Mohamad Koerdi dalam mengambil-alih kantor surat kabar *Tjahaja* dan kemudian mengubahnya menjadi *Soeara Merdeka* menjadi penting. Sebab, kedua orang itulah yang kemudian menjadi Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksinya. Terbit setiap hari dengan 4 halaman, *Soeara Merdeka* pada mulanya beralamatkan di Jalan Groot Postweg-Oost No. 54-56 (sekarang Jalan Asia Afrika) di Bandung.

Namun ketika terjadi bencana banjir akibat meluapnya sungai Cikapundung di bulan November 1945, dan desakan tentara Sekutu (Inggris) agar kota Bandung dikosongkan dari para pemuda yang berjiwa republikan, *Soeara Merdeka* pun pindah ke daerah pedalaman, dan beralamatkan di Jalan Galunggung No. 46, Tasikmalaya. Baik ketika masih di Bandung maupun di Tasikmalaya, visi dan jatidiri *Soeara Merdeka* sebagai pers yang ingin menyuarakan kemerdekaan rakyat Indonesia di satu sisi, dan membela kepentingan politik Negara RI di sisi lain relative tetap tidak berubah.

Pada zamannya, *Soeara Merdeka* termasuk pers yang berpengaruh. Dengan oplah sekitar 5.000-7.500 eksemplar, surat kabar ini mampu menjangkau kota-kota penting di seluruh Jawa Barat, dan bahkan sampai ke kota Cilacap dan Purwokerto di Jawa Tengah.<sup>5</sup> Sebagaimana lazimnya pers yang terbit pada masa awal revolusi, *Soeara Merdeka* tidak mencantumkan susunan dewan redaksinya. Baru pada tahun 1947 surat kabar ini mengumumkan nama-nama redaktur persnya yang terdiri dari: Boerhanoeddin Ananda (Pimpinan Umum), Mohammad Koerdi (Pemimpin Redaksi), Koko Koswara (Pemimpin Administrasi), M. Padmi (Pemimpin Perusahaan), dan Adiwikarta, Joso Soeprapto, dan Atje Bastaman (Pemilik).<sup>6</sup>

Dari nama-nama redaktur pers itu, Mohamad Koerdi, sebagai Pemimpin Redaksi, memegang peranan yang penting dalam menentukan warna pemberitaan dan corak pandangan *Soeara Merdeka*. Lebih-lebih setelah surat kabar ini pindah ke Tasikmalaya, sebagai orang Sunda, Mohamad Koerdi sangat memahami perasaan, kemauan dan harapan khalayak pembacanya. Tajuk-tajuk dan catatan pojok *Soeara Merdeka*, dengan demikian, banyak ditulis oleh Mohamad Koerdi. Sedangkan Boerhanoeddin Ananda sendiri, sebagai orang Sumatera Barat dan menjabat sebagai Pimpinan Umum *Soeara Merdeka*, nampaknya lebih tertarik untuk menganalisa berbagai masalah dan kejadian yang ada di luar negeri.

Mengingat sentralnya peran yang dimainkan oleh Mohamad Koerdi dalam membentuk visi dan jatidiri *Soeara Merdeka*, ada baiknya melihat latar belakang sosialnya secara selintas. Dilahirkan di Ciamis, Jawa Barat, pada tanggal 10 September 1907, Mohamad Koerdi, dengan demikian, pada masa awal revolusi

5 Wawancara dengan Atje Bastaman, mantan wartawan *Soeara Merdeka* (Bandung: 16 Oktober 1995). Mengenai agen-agen surat kabar ini, lihat *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 26 November 1946), 3

6 "Pemberi Tahoean", berita *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 1 Juli 1947), 3

berumur 38 tahun.<sup>7</sup> Pendidikan dasar (HIS) dan menengah (MULO) diselesaikannya pada tahun 1925 dan tahun 1929. Pengalaman jurnalistiknya ditempa sejak zaman kolonial Belanda dengan bekerja sebagai wartawan *Sipatahoenan*, sebuah pers milik organisasi Paguyuban Pasundan yang terbit mula-mula di Tasikmalaya (1927) dan kemudian di Bandung (1933). Visi dan karakter Mohamad Koerdi yang “*singer tengah*” (moderat), tenang, rasional, dan demokratis, tampaknya terbentuk dalam pergaulannya dengan tokoh-tokoh Paguyuban Pasundan seperti Oto Iskandar Di Nata, Oto Koesoemasoebrata, dan R.A.A. Wiranatakoesoemah.

Karena ketika itu Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 dan menunjukkan sikap-sikap yang otoriter dan represif, Mohamad Koerdi pada mulanya tidak mau bekerjasama dengan pemerintah militer itu. Namun berkat bujukan dari berbagai pihak, termasuk kawan-kawan dan keluarganya sendiri, ia kemudian mau bergabung dengan *Tjahaja*, pers milik Jepang yang terbit di Bandung. Dan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, yang diikuti dengan lahirnya Negara RI pada bulan Agustus 1945, Mohamad Koerdi dan kawan-kawan berinisiatif untuk mengambil-alih surat kabar *Tjahaja* itu untuk diubah menjadi *Soeara Merdeka*.

Sebagai pers “republikan” yang terbit di Bandung dan pada bulan Oktober 1945 tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) sudah menduduki kota itu, *Soeara Merdeka* sangat yakin dengan perlunya politik diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan RI di satu sisi, dan perlunya masyarakat bertindak tenang, teratur, rasional dan taat kepada pemerintah RI di sisi lain.<sup>8</sup> Kutipan tajuk berikut ini menunjukkan sikap surat kabar *Soeara Merdeka*:

*[...] Dan lapang Perdjoengan kita sekarang beroelang-oelang ditegaskan oleh Pemimpin kita, ialah djalan diplomasi melaloei pertjoeran internasional. Dengan tenang dan tenteram, dengan damai kita mempertahankan kemerdekaan kita.*

*Dengan kepertjajaan jang tegoeh, dengan tekad jang boelat ingin tetap merdeka. Dengan tertib dan seksama kita mengikoeti segala keadaan dan kedjadian, mengikoeti dan melakoekan perintah Pimpinan kita [...]*

*Djangan terpedaja oleh hal-hal jang moengkin akan mendjeroemoeskan kita sebagai bangsa merdeka [...]*<sup>9</sup>

Bahkan ketika berbagai pihak, termasuk pers, melibatkan diri dalam pro-kontra di sekitar Perundingan Linggarjati pada bulan November 1946-Maret 1947.<sup>10</sup> *Soeara Merdeka* termasuk pers yang tetap konsisten dengan visi dan

7 Mengenai biodata Mohamad Koerdi, lihat Soebagijo I.N., *Jagat Wartawan Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung, 1981), 91-100; dan Gunseikanbu, *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), 286

8 Lihat, misalnya, tajuk-tajuk *Soeara Merdeka* seperti: “Tetap Dibelakang Pemimpin” (Bandung: 20 September 1945); dan “Perjoengan Kita” (Bandung: 24 September 1945).

9 “Kewajiban kita”, tajuk *Soeara Merdeka* (Bandung: 18 September 1945), hlm. 2.

10 Susanto Zuhdi, “Perjanjian Linggarjati Dilihat oleh Beberapa Surat Kabar Lokal di Jawa” dalam A.B. Lapijan & P.J. Drooglever (eds.), *Menelusuri Jalur Linggarjati* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992).

artikulasinya, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu penting, serta perlunya berpikir dingin, tenang, dan rasional dalam mensikapi berbagai keadaan.

Walaupun begitu bukan berarti surat kabar ini tidak punya daya kritis sama sekali. Sikap kritis *Soeara Merdeka* yang disampaikan dengan cara-cara yang tenang, elegan, dan rasional itu tetap ada seperti nampak dalam catatan-catatan pojoknya. Bahkan kritik-kritik yang lebih canggih, dengan nada menggelitik dan cerdas, disampaikan lewat sajian cerpen kontekstual yang sering ditulis oleh M.O. Koesman, dengan inisial M.O.Km., seorang penulis lepas bekas wartawan *Sipatahoenan* pada zaman Belanda.

Begitulah, misalnya, ketika pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946 tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) sering menembaki para pemuda sengan senjata "mitrayleur", *Soeara Merdeka* mengejeknya dengan "*mata liuer*" alias membabi buta. Dan ketika Inggris berperan sebagai wasit dalam perundingan Indonesia-Belanda pada akhir tahun 1946, surat kabar ini memplesetkan istilah "*wapenstilstand*" (sikap tenang, berdiri tegap, dan siap sedia sambil memegang senjata sebagai tanda dimulainya perundingan) menjadi "wakil setan"; dan sikap Inggris sebagai wasit acapkali melakukan politik "intervensi" di Indonesia, disindirnya sebagai politik "*incer bensin*", terbukti dari kota-kota penting di Jawa dan di Sumatera yang diduduki oleh tentara Sekutu itu memang merupakan daerah produksi yang sangat potensial kekayaan alamnya.

Terhadap Sutan Sjahrir, Perdana Menteri RI, *Soeara Merdeka* sering menyebutnya dengan "Juragan" Sjahrir, sebuah istilah dengan konotasi feudal, merasa benar, dan pintar sendiri. Hal ini disebabkan menurut *Soeara Merdeka*, karena acapkali Sutan Sjahrir tidak mau menerangkan secara rinci dan jelas kepada masyarakat tentang kebijaksanaan politik diplomasinya yang banyak mengundang kontroversi, bahkan akhirnya menimbulkan sikap oposisi dan antipati padanya.<sup>11</sup>

Terhadap pihak Belanda, jelas *Soeara Merdeka* bersikap keras dalam kritik-kritik sosialnya. Perhatikan salah satu catatan pojok surat kabar ini dalam konteks mengejek tentara Belanda yang bangga dengan kehebatan "Divisi 7 Desember", yang akan didatangkan ke Indonesia. Dengan diberi judul "Memento morie" catatan pojok *Soeara Merdeka* dengan cerdas berkata:

*Mereka membanggakan divisinja sebagai divisi jang istimewa (7 Desember).*

*Dan hari pemboekaan koperensi di Den Pasar mereka tetapkan 7 Desember (jang akan datang).*

*Dan tanggal 7 Desember itoe dimoelai roentoehnya Hindia Belanda.<sup>12</sup>*

11 Lihat M.O.Km., "Rapat Raksasa", *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya, 18 November 1946: 3 dan "Satoe Tahoen", *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya, 26 November 1946: 3

12 "Memento morie", pojok *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 7 November 1946: 2

Apa yang secara jelas ingin dinyatakan oleh surat kabar ini adalah bahwa makna tanggal “7 Desember” itu, baik bagi divisi tentara Belanda maupun pembentukan Negara-negara boneka buatan Belanda, nasibnya akan diyakini sama dengan runtuhnya pemerintahan Belanda di Indonesia ketika menyatakan perang kepada Jepang dalam Perang Dunia II – yang membawa Indonesia pada kemerdekaan secara nyata.

Sementara itu terhadap pihak-pihak yang dianggap anti-republiken, *Soeara Merdeka* – berbeda dengan pers lain yang acapkali bersikap emosional dan kasar – tetap bersikap tenang dan elegan, namun cukup tajam dan proporsional dalam melakukan kritik-kritik sosialnya. Kasus berdirinya Negara Pasundan pada bulan Mei 1947, dengan Kartalegawa sebagai Presidennya, dalam pandangan *Soeara Merdeka* dianggap sebagai fenomena wajar dalam sebuah revolusi dimana perubahan dan kekalutan sosial yang terjadi sangat cepat menyebabkan seseorang yang secara mental dan psikologis tidak siap akan melakukan tindakan yang aneh-aneh dan negative. Tidak terkecuali dengan *Oetje* (panggilan akrab Kartalegawa), kata *Soeara Merdeka*, yang tidak siap menghadapi revolusi itu kemudian melakukan tindakan menerbas untuk kepentingan dirinya sendiri dan dimanfaatkan oleh Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Karikatur *Soeara Merdeka* kepada Kertalegawa dan Koestomo, dua tokoh pendiri Negara Pasundan bentukan Belanda dilakukan sedemikian rupa untuk menunjukkan sifat dalam nuansa hubungan kolonial: sikap tuan Belanda yang congkak dan besar kepala di satu sisi, dengan jiwa budak pribumi yang rendah dan hina-dina di sisi lain. Kesan yang ingin disampaikan oleh surat kabar ini adalah bahwa tokoh-tokoh dalam karikatur itu (Van Mook dan Spoor di pihak Belanda dengan Kertalegawa dan Koestomo di pihak pribumi) paradoks dengan jiwa zaman yang menghendaki kemerdekaan, hubungan egalitarian, dan hidup bermartabat sebagai anak bangsa yang merdeka. Sikap sembah dan harap dari Kertalegawa (menyebut diri “*Patik yang hina-dina*”) kepada Van Mook dengan kata-kata feodal (menyebut “*tuanku paduka yang mulya kanjeng tuan besar gubernur jenderal*”); dan sikap malu-malu, merendahkan diri dari Koestomo (dengan mengucapkan secara terbata-bata “*te-ri-ma ka-sih tuan-ku*”) kepada Jenderal Spoor yang akan menjamin keamanan dan ketertiban di Indonesia, semakin memperkuat kesan bahwa mereka (Kertalegawa dan Koestomo) memang hanya sekedar budak, kaki-tangan, wayang, dan boneka yang dimainkan oleh Belanda.

Begitu juga dengan kasus berdirinya NIT (Negara Indonesia Timur), *Soeara Merdeka* menanggapi dengan dingin namun tetap kena dan menggelitik kritik sosialnya. NIT itu, kata *Soeara Merdeka*, mungkin tepat bila diplesetkan menjadi “*Nog In Twiffel alias masih ragoe2 kata seseorang*”. Atau juga disebut sebagai “*Niet In Tel alias ta' masoek kolom*”, sebuah sindiran yang menunjukkan bahwa NIT itu tidak penting, tidak populer, dan tidak perlu diperhatikan. Dengan kata lain, peristiwa itu tidak layak masuk berita dalam surat kabar *Soeara Merdeka*.

Bahkan terhadap salah seorang tokoh pendiri NIT, I Gde Tjokorde Soekawati, surat kabar ini memberikan kritik yang kena dan menggelitik, bahwa yang bersangkutan memang "orang sakit". Perhatikan catatan pojok *Soeara Merdeka* berikut ini:

*Soekawati mengatakan senantiasa, bahwa nasionalisme jang didjadikan pegangannya mentjapai "kemerdekaan" itoe adalah nasionalisme jang sehat.*

*Kalau berpidato ia tidak loepa bahasa Belanda, dan selaloe pidatonja itoe ditoetoe dengan "Leve de Koningin!", dengan "Leve Van Mook!" dan – sebagai koentjinja – "Hou zee!"*

*Ia masih ingat semoea, seperti djoega kepandaiannya bertereak "Tenno Heika Banzai!" dan "Banzai Dai Nippon!" didjaman Djepang.*

*Tidak mengherankan, banyak jang sakit merasa sehat, dan biar bagaimana tidak maoe pertjaja akan (hasil) diagnose dokter; dan Tjokorde kita satoe diantaranya!<sup>13</sup>*

Berita-berita yang bersifat *human interest* juga acapkali muncul dalam sajian *Soeara Merdeka*. Anak-anak yang lahir pada masa revolusi Indonesia, misalnya, tidak luput dari pemberitaan dan diberi makna penting oleh surat kabar ini, dengan harapan "*mudah-mudahan saja semua berjiwa merdeka*". Perhatikan catatan pojok berikut ini:

*Anak-anak jang lahir pada tanggal 17 Agoestoes 1946 didaerah Krawang banjak jg. diberi nama "merdeka", misalnya: Agoes Setia Merdeka, Mohamad Merdeka, Mer dikawati, Djoko Merdeka, Merdikadingati, Merdikaningsih, dll.*

*Moedah-moedahan sadja semoea berdjiwa merdeka!<sup>14</sup>*

Sementara anak-anak Presiden Soekarno yang lahir pada masa revolusi, juga menjadi berita *Soeara Merdeka*. Megawati Soekarnoputri, misalnya, tokoh yang pada awal abad ke-21 (2001-2004) pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, kelahirannya diberitakan oleh *Soeara Merdeka* sebagai berikut:

13 "Jang Sehat?", pojok *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 21 Januari 1947), hlm. 3.

14 "What is a name", pojok *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 24 Januari 1947), hlm. 2.

**ALHAMDOELILLAH**

*Dengan berkat Toehan, telah lahir pada hari Kamis malam Djoem'at  
23/34 Djanoeari 1947 digedoeng Presidenan:*

*Adiknja Moehammad Goentoer Soekarno Poetra. kami beri  
kepadanja nama:*

**DYAH PERMATA SOEKARNA POETRI**

*Alias*

**MEGAWATI-SATYAWATI**

*Terima kasih kami oetjapkan kepada Prof. Dr. Raden Sarwono  
Prawirohardjo, Dr. R. Soeharto, dan djoeroerawat Nj. Nani Soeradiatmadja*

*Keloearga SOEKARNO<sup>15</sup>*

Betapapun *Soeara Merdeka* termasuk pers yang cukup moderat dalam pemberitaan dan pandangannya – tidak hanya kepada pemerintahan RI tetapi juga kepada pemerintah Belanda dan orang-orang Indonesia yang mau dijadikan kaki-tangannya – namun ketika Belanda melakukan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menduduki kota Tasikmalaya, surat kabar ini akhirnya dibredel juga.

Seminggu sebelum aksi militer itu dilakukan, *Soeara Merdeka* sudah menangkap tanda-tanda ketidaksenangan Belanda terhadap pers republiken yang dinilainya menghasut dan menimbulkan permusuhan. Menghadapi tuduhan Belanda seperti itu, pihak redaksi menyatakan sikapnya:

*Dan kita berpendapat, bahwa penghentian permoesoehan bisa terdjadi, djika kedoea belah pihaknja ingin damai. Tidak seperti sekarang: hanja pihak Indonesia jang didesak oleh pihak sana soepaja menghentikan permoesoehan, sedangkan pihak Belanda sendiri teroes sadja bersikap memoesoehi.<sup>16</sup>*

Itulah sikap dan pembelaan terakhir yang bisa dilakukan oleh *Soeara Merdeka* menghadapi ancaman agresi militer I Belanda, menjelang tanggal 21 Juli 1947. Setelah *Soeara Merdeka* ditutup, para redaktornya pergi mencari jalan sendiri-sendiri. Ada yang mengungsi ke daerah RI di Jawa Tengah, tapi ada juga yang nekad pergi ke Bandung, daerah yang telah diduduki Belanda, untuk menerbitkan pers yang menyuarakan kepentingan Republik. Mohamad Koerdi, misalnya, menerbitkan *Harian Indonesia* di Bandung pada akhir tahun 1947.

15 *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 25 Januari 1947), hlm. 1.

16 "Semangat perang pers Belanda", berita *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 15 Juli 1947: 2)

Sedangkan Atje Bastaman, staf redaksi *Soeara Merdeka*, mendirikan kembali surat kabar *Sipatahoenan* di Bandung pada tahun 1948.<sup>17</sup>

## PENUTUP

Surat kabar pada masa revolusi Indonesia merupakan saksi yang aktual pada zamannya. Ia tidak hanya memberitakan kejadian/peristiwa yang dinilai penting, tetapi juga memberikan pandangan dan kritik terhadap realitas sosial dan perubahan yang diharapkan. Unsur *news and views* tetap melekat dan berfungsi optimal dalam pers Indonesia pada masa revolusi.

Jika ditempatkan dalam konteks revolusi Indonesia, kasus surat kabar *Soeara Merdeka* tidaklah sendirian. Beberapa kabar yang kemudian terbit di daerah pendudukan (seperti *Merdeka* di Jakarta, *Warta Indonesia* di Semarang dan *Soeara Rakjat* di Surabaya) memiliki semangat dan cita-cita yang sama. Namun artikulasi dan visinya tentang kemerdekaan bisa berbeda-beda tergantung pada karakter dan keberanian para redaktornya. Surat kabar yang berada di daerah Republik umumnya lebih berani dan lantang dalam menyuarakan kemerdekaan. Sementara surat kabar di daerah pendudukan harus mempertimbangkan keadaan, betapapun cita-cita dan semangat kemerdekaan tetap digelorakan.

Akhir dari kisah hidup surat kabar yang terbit di daerah pendudukan pada masa revolusi Indonesia juga berbeda-beda. Surat kabar *Soeara Merdeka* di Bandung dan Tasikmalaya barangkali bisa disejajarkan dengan surat kabar *Soeara Rakjat* di Surabaya (yang kemudian pindah ke Kediri, Malang dan Mojokerto). Keduanya dibredel oleh Belanda ketika melakukan agresi militernya yang pertama (Juli 1947). Betapapun *Soeara Merdeka* tidak terbit lagi pada pasca revolusi Indonesia – berbeda dengan *Merdeka* di Jakarta dan *Kedaulatan Rakjat* di Yogyakarta<sup>18</sup> -- namun perlu dicatat, bahwa surat kabar ini (*Soeara Merdeka* di Bandung dan Tasikmalaya) telah menjadi saksi penting dalam episode perjalanan sejarah bangsanya.

---

17 Dalam sebuah wawancara, Atje Bastaman (Bandung: 16 Oktober 1995) menyatakan bahwa keputusan untuk pindah dan berjuang ke daerah pendudukan Belanda, dengan cara mendirikan pers yang republikan, dipertimbangkan atas dasar: apabila berada di daerah Republik yang acap kali tidak aman karena gangguan dari para lasykar rakyat, misalnya, sangat boleh jadi nasibnya tragis seperti dialami Oto Iskandar Di Nata, Soepriadinata, dan Dr. Moewardi yang meninggal di daerah Banten, Garut, dan Solo. Sedangkan apabila berada di daerah pendudukan Belanda dan wartawan Indonesia itu dihukum atau ditembak Belanda misalnya, namanya akan terkenal dan menjadi masalah di dunia internasional.

18 Andi Suwarta, *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta), 1945-1947* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2000).

## IN MEMORIAM

### Ramadhan Kartamihardja<sup>1</sup>

(16 Maret 1928 - 16 Maret 2006)

**M**angгаа, selamat datang," ujar Ramadhan Kartahadimadja lirih. Waktu itu, bulan puasa awal November 2004, kami tiba di wisma Konsul Jenderal Salfrida N. Ramadhan K.H. Kawasan perbukitan di atas kawasan *Groote Schuur*. Wisma besar dengan pemandangan lepas ke ujungnya *Mountain Table*, samudra Atlantik dan di kejauhan gunung batu yang bernama *Lion Head*. Indah sekali. Apalagi kami tinggal di kamar atas, dengan pemandangan yang lebih luas. Hotel berbintang lima pun, kalah. "Bagaimana penerbangannya? Wah, saya sudah nggak kuat kalau terbang jauh-jauh," sambung Ramadhan yang biasa kami panggil 'Kang Atun,' sambil memberikan kumpulan sajaknya *Priangan Si Jelita*, yang mendapat hadiah Sastera Badan Musyawarah Kebudayaan tahun 1960, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan Inggris. Dari *Priangan Si Jelita* ini Ramadhan mendapat hadiah Sastra Nasional (1957/58)

Tujuh hari kami menginap dan selama itu pula Kang Atun dan istrinya Safrida bercerita tentang berbagai pengalaman, cerita anak cucu dan "saya sedang menyelesaikan sebuah novel tentang permainan korupsi di bank," demikian Kang Atun. Waktu itu, Ramadhan sudah sakit-sakitan, tetapi tak pernah mengeluh tentang penyakitnya, kanker prostat. Beliau tidak turut puasa, makan selalu tepat waktu, disiplin menelan obat dan semangatnya tetap tegar. Kami sering tidak ingat kalau penyakitnya bersarang ditubuhnya, karena beliau turut serta kemana kami pergi. Makan *fish & chips* di dekat pelabuhan, ke pabrik anggur di luar kota, turut hadir ketika Sutardji Calsoum Bachri membaca sajaknya di hall dekat Adderley Street, mengantar kami mengunjungi Masjid Syekh Yusuf dari Bugis yang sangat dihormati golongan Muslim Afrika Selatan, museum budak dan banyak lagi.

Meski kami tahu bahwa kanker prostatnya sulit disembuhkan, tapi kami terkejut dan sangat merasa kehilangan, ketika berita wafatnya Ramadhan K.H. tepat di hari ulang tahunnya yang ke-78, hari Kamis, 16 Maret 2006 jam 08.30. Jenazahnya diterbangkan dari Cape Town untuk kemudian diistirahatkan di samping istrinya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

---

1. Ramadhan K.H adalah anggota kehormatan masyarakat sejarawan indonesia sejak tahun 2001

Sikapnya selalu santun, tinggi budi dan suaranya lemah lembut. Sebagai seorang penyair, penulis novel, roman, memimpin majalah budaya (*Kisah, Siasat dan Gelanggang*) dan penulis biografi yang handal, buku biografi terkenal yang ditulisnya yang kini menjadi bacaan klasik ialah tentang istri Bung Karno kedua, Inggit. Dalam *Kuantar Ke Gerbang*, Ramadhan sangat bagus menulis percintaan Sukarno yang waktu itu masih menjadi mahasiswa ITB, indekos, dengan induk semang bernama Inggit yang masih jadi istri Haji Sanusi. Akhirnya Sanusi 'menyerahkan' Inggit kepada Sukarno. Inggit pulalah yang kemudian mencari uang (dengan berjualan bedak dan jamu) untuk membiayai perjuangan Sukarno, turut diasingkan ke Ende dan Bengkulu.

Ramadhan, sebagai *priyayi Sunda*, pernah masuk ITB satu semester saja. Setelah keluar dari ITB, dia mencoba masuk ADLN (Akademi Dinas Luar Negeri). Gagal lagi. Tetapi Kang Atun berhasil memetik seorang diplomat putri, Prustin Atmadjasaputra atau Tines, sebagai istrinya. Dari perkawinan ini, mereka mempunyai dua orang putra, Gumilang dan Gilang Ramadhan. Di selang seling penempatan Tines di luar negeri sebagai diplomat, almarhum produktif sekali menulis. Misalnya, ketika berada di Los Angeles, Kang Atun menulis *Gelombang Hidupku*, riwayat sri panggung Dardanella, Miss Dja. Novelnya berjudul *Royan Revolusi* (1970) berhasil meraih hadiah sayembara Ikapi/UNESCO (1968). Akhir tahun 1980-an, novelnya *Ladang Perminus* tentang korupsi di Pertamina, mendapat hadiah Sastra Asia Tenggara. Setelah itu puluhan novel, sajak dan biografi (antara lain Ali Sadikin, Hugeng Imam Santoso, Sumitro, Alex Kawilarang) telah ditulis almarhum, budayawan yang pandai sekali melukiskan karakter dan kisah hidup seseorang. Penulis biografi handal ini diangkat menjadi Anggota Kehormatan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) bersama Haji Waang alias Rosihan Anwar, tahun 2001.

Sayang sekali Prustin Atmadjasaputra sang istri, telah dipanggil Tuhan April 1990. Dan atas amanah sang istri pula, Kang Atun menikah dengan sahabat almarhumah, Safrida Nasution, yang kini jadi Konsul Jenderal Afrika Selatan. Hal inilah yang membuat Kang Atun hidup berselang-seling di luar negeri dan Indonesia. Tetapi hal ini tidak membuatnya lupa akan usahanya untuk mendirikan Taman Ismail Marzuki (TIM). Bersama Ayip Rosidi, Kang Atun mendesak Ali Sadikin yang waktu itu gubernur DKI Jakarta, untuk mendirikan TIM.

Buku terakhir yang terbit dan ditulis atas permintaan ialah *Soeharto, pikiran ucapan dan tindakan saya: otobiografi, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.* Buku 599 halaman, 102 sub judul, otobiografi ini banyak dicari orang, terlebih karena Soeharto sudah *lengser keprabon*. "*Berkat pengalaman dan penghayatan kedua penulis tersebut mengenai sisi-sisi kehidupan Presiden Soeharto, maka guratan-guratan pena kedua penulis dapat*

*menghasilkan suatu tulisan yang mengasyikan,*" demikian tulis kata pengantar penerbit. "Ah, saya nggak mau bicara soal buku itu," demikian Kang Atun, pada suatu hari ketika kami ngobrol-ngobrol di Cape Town.

Air muka Ramadhan memerah menahan marah. "Saya hanya berjumpa dua kali untuk penulisan buku tersebut," ujarnya, "itupun diantar dengan Pak Dwipa. Tetapi ada yang lebih menyakitkan lagi!" Kang Atun meninggalkan kami dan dia berjalan masuk kamar. Safrida setengah berbisik berkata: "Dia marah sekali kalau mengingat hal itu. Bukan hanya tidak dibayar honorinya. Tapi Tutut memanggilnya dan berkata bahwa suami saya tak boleh mendapat *royalty*."

Tutut atau Mbak Tutut adalah pemilik Citra Lamtoro Gung Persada, yang bertindak sebagai penerbit buku tersebut.

Toeti Kakiailatu

## Teuku Ibrahim Alfian

(14 Februari - 31 Mei 2006)

**T**euku Ibrahim Alfian meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006 dalam usia 76 tahun. Almarhum adalah Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejarah kehidupannya menunjukkan bahwa hampir sebagian besar masa hayatnya diabdikan dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, baik di Universitas Gadjah Mada maupun di perguruan tinggi lainnya.

Teuku Ibrahim Alfian dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1930 di Tanah Rencong atau Serambi Mekah - Aceh, tepatnya di Lhok Seumawe, sebagai putra tunggal dari pasangan Teuku Bin Banta Achmad dan Siti Hawa. Sebagai anak kelahiran pada masa penjajahan Belanda ia menikmati pendidikan *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) yang ditempuhnya pada 1936-1943. Pada masa Pendudukan Jepang ia mengenyam pendidikan Kokumin Gakko (1942-1943) dan Nanpo Sekiyu Kogyo Gakko (1943-1944), sementara pada masa setelah kemerdekaan ia menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) pada 1950-1953. Setelah tamat SLTA di Aceh, Teuku Ibrahim Alfian pergi ke Yogyakarta untuk meneruskan pelajarannya di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil program studi Sejarah di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan (1953-1959). Bersama dengan pemuda Taufik Abdullah (kini Prof. Dr. Taufik Abdullah) dari Sumatra Barat yang juga meneruskan pelajarannya di Jurusan Sejarah, ia menjadi murid Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, dan mengalami suasana masa-masa awal perkuliahan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1950-an yang di selenggarakan di kompleks Wijilan, perumahan milik Keraton Yogyakarta. Kegiatan kemahasiswaan yang disukai Teuku Ibrahim Alfian pada waktu itu antara lain ialah ikut menjadi anggota kelompok teater mahasiswa Fakultas Sastra dan Kebudayaan yang dipimpin oleh W.S. Rendra.

Setelah memperoleh gelar Sarjana Muda (BA) di Universitas Gadjah Mada ia mendapat kesempatan untuk tugas belajar di Kansas University, U.S.A. di bidang Sejarah (1959-1961) hingga memperoleh gelar Master of Arts (MA). Thesis Masternya berjudul "The Postdam Agreement and the First Postwar Election in Germany". Sekembali ke tanah air, ia menyelesaikan program studi doktoralnya di Jurusan Sejarah, tempat ia belajar sebelumnya. Sesudah memperoleh gelar

Doktorandus (Drs.) dalam bidang Ilmu Sejarah (1963), ia meneruskan ke program Doktornya di Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor dalam Ilmu Sejarah diraihnya pada 1981. Disertasinya berjudul "Perang di Jalan Allah: Aceh, 1873 - 1912".

Kedudukannya sebagai dosen di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada diawali dengan menjadi tutor di Jurusan Sejarah (1957-1957), dan kemudian diangkat menjadi dosen tetap pada 1961, yaitu setelah ia kembali dari tugas belajar di U.S.A dan telah bergelar M.A. Sejak itu ia meniti kaiernya dengan menduduki berbagai jabatan baik struktural maupun akademik sebagai tempat pengabdianya. Berbagai jabatan yang pernah dipegangnya, antara lain, ialah Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Universitas Gadjah Mada (1961-1962), Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, 1962-1966, dosen tamu di Universitas Kebangsaan Malaysia (1970-1974), Direktur Pusat Latihan Penelitian Imlu Sosial Aceh (1975-1976), Dekan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada selama dua periode (1985-1988 dan 1988-1991), dan Ketua Jurusan/Bidang Humaniora pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (1984-2004). Beberapa kali ia mendapat undangan sebagai Guru Besar tamu di universitas luar negeri, antara lain yaitu Universita Negeri Nagoya (1995), University of Philippines (1996), dan Universitas Kebangsaan Malaysia (1997). Kegiatan akademiknya, baik dalam perkuliahan, bimbingan maupun seminar dan konferensi tingkat nasional dan internasional tidaklah surut sekalipun secara resmi ia telah pensiun pada 1995.

Sebagai seorang sejarawan ia telah meninggalkan sejumlah publikasi karya tulisnya yang cukup berarti dalam bidang kajian sejarah. Di antaranya, ialah *Kronika Pasai: Sebuah Tinjauan Sejarah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1971); *Mata Uang Emas Kerajaan Aceh* (Banda Aceh: Museum Negeri Aceh, 1980); *Perang di Jalan Allah* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987); *Sastra Perang* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992); *Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*, karya bersama Rusdi Sufi, et al. (Jakarta: Bank Exim, 1994); *Wajah Aceh dalam Linrtasan Sejarah* (Banda Aceh; Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), 1999); *Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara*. (Yogyakarta: Ceninnets, 2005), dan sejumlah artikel yang dimuat dalam majalah di dalam dan di luar negeri.

Berbagai tanda penghargaan atas jasa dan pengabdianya juga telah diterimanya. Diantaranya, ialah Tanda Penghargaan Pengabdian di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta selama 25 tahun (1984), Tanda Penghormatan Satyalancana Karya Satya Kelas II dari Presiden Republik Indonesia tahun 1986; Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri Tahun 2002; dan Tanda Kehormatan Medali Emas

dari Pemerintah Daerah Naggroe Aceh Darussalam pada tahun 2004, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang besar dalam lapangan kebudayaan.

Sebagai seorang pribadi, Teuku Ibrahim Afian, pada dasarnya adalah seorang sosok yang selalu berpenampilan ceria, ramah, suka kelakar, suka bergaul, berpakaian serba necis, dan romantis. Ia, sesungguhnya juga seorang sosok pribadi yang tegar dan tabah dalam menghadapi dinamika kehidupannya. Ia dikenal juga sebagai sosok dosen yang suka memberikan nasihat kepada para mahasiswanya, terutama yang tengah mengalami kesusahan. Hampir semua bekas murid dan kolega terdekatnya banyak memiliki kenangan manis dan unik selama bergaul dengan almarhum.

Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian, M.A. meninggalkan seorang istri bernama Nurhani Binti Abdullah, dan tiga orang anak, yaitu Teuku Abdullah Mahkuzzakir, Tjut Syafiatuddina, dan Teuku Muzaffarsyah, serta dua orang menantu dan seorang cucu putri. Ia telah menunaikan tugasnya di dunia dengan baik. Kini ia telah tiada. Ia telah menghadap Sang Khaliknya. Selamat jalan Pak Ibrahim.... Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, menerima amal solehnya, dan menempatkannya di tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Nya. *Amien.*

Yogyakarta, Juli 2006.

Djoko Suryo.

Sejarawan, Profesor Emeritus UGM

## **Ayatrohaedi**

(5 Desember - 18 Februari 2006)

Tahun 1980, ketika saya baru beberapa bulan bekerja di Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (sekarang berubah namanya menjadi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI), sebuah seminar tunggal diadakan dengan menampilkan Dr. Ayatrohaedi sebagai pembicara tentang kebudayaan. Pada perjumpaan pertama ini saya terkesan oleh penampilannya yang sederhana. Kesederhanaan itu rupanya merupakan ciri khasnya. Pada perjumpaan berikut dengannya di Solo, dalam symposium internasional tentang Austronesia (Juli 2005), kesederhanaannya tidak berubah. Bajunya dibiarkan terjulur di luar, memakai sandal dan lebih dari 10 tahun terakhir ia mengenakan peci khas berwarna kecoklatan berkombinasi warna putih. Ketika Mang Ayat, --demikian panggilan akrab Prof. Dr. Ayatrohaedi-- dikukuhkan menjadi guru besar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, banyak sekali yang datang. Orang-orang itu katanya ingin melihat Mang Ayat memakai jas dan sepatu, sesuatu yang tidak biasa baginya, tetapi hari itu ia harus memakainya.

Ayatrohaedi dilahirkan di Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat, pada 5 Desember 1939. Ayahnya bernama D. Sutawiria adalah seorang guru Sekolah Dasar yang dikenal gemar menulis sastra. Bakat sastra sang ayah itu rupanya menurun pada dua puteranya, yaitu Ajip Rosidi (putera pertama) dan Ayatrohaedi. (putera kedua). Pendidikan dasar Ayatrohaedi ditempuh di desanya, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Majalengka. Setelah tamat SMP Negeri Majalengka ia pindah ke Jakarta, melanjutkan pendidikannya ke SMA Muhammadiyah. Setamat dari SMA Mang Ayat meneruskan kuliah di Fakultas Sastra mengambil Jurusan Ilmu Purbakala dan Sejarah Kuna Indonesia (sekarang Arkeologi) Universitas Indonesia. Pilihannya di Arkeologi itu, konon karena sangat terkesan pada guru sejarahnya di SMA yang ternyata adalah mahasiswa Arkeologi. Ia mulai kuliah tahun 1959, dan selesai tingkat sarjana tahun 1964. Mang Ayat lalu bekerja pada Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Mojokerto, Jawa Timur. Satu tahun kemudian ia pindah ke Bandung, menjadi dosen pada Fakultas Sastra, Universitas Pajajaran. Di Bandung ia pernah tinggal serumah bersama mahasiswanya, Edi S. Ekajati, yang kelak memiliki keahlian yang sama dengannya. Di Bandung ia jatuh cinta dengan seorang gadis Jawa bernama Sri Yuniati yang kemudian dinikahinya dan membuahkan tiga orang anak. Ratna Wiyati, Satria Diwidiyana dan Asri Nuraini.

Tahun 1971 ia memperoleh kesempatan memperdalam studi arkeologi di

Universitas Leiden, Belanda. Sekembali dari Leiden, tahun 1972 ia kemudian mengajar di almamaternya, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Jakarta. Ia juga pernah memperdalam linguistik selama satu tahun (1975-76) di Universitas Grenoble II, di Perancis. Tahun 1978 Ayatrohaedi meraih gelar doktor di Universitas Indonesia dalam bidang linguistik dengan mengajukan disertasi berjudul *Bahasa Sunda di Daerah Cirebon: Sebuah Kajian Lokabasa*. Menurut promotornya, Prof. Dr. Amran Halim, disertasi ini merupakan yang pertama mengenai dialektologi di Asia Tenggara. Ayatrohaedi pernah menjabat Ketua Jurusan Arkeologi (1983-1987), Pembantu Dekan Bidang Akademik (1999-2000), Pembantu Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) selama lima tahun (1989-1994).

Kegiatan Ayatrohaedi cukup bervariasi, meliputi bidang-bidang kebahasaan, kusastraan, kasejarahan, kebudayaan, dan kepurbakalaan. Karena itu Ayatrohaedi disebut selain sastrawan adalah juga sejarawan, linguist dan budayawan. Guru besar Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia ini, lebih dulu dikenal sebagai sastrawan Sunda, dan juga Indonesia. Ia menulis cerpen dalam bahasa Sunda sejak masih di SMA. Ia juga seorang arkeolog yang berhasil menjadikan kalangan muda tertarik pada arkeologi yang dulu dianggap ilmu “terbelakang” dibanding ilmu-ilmu lain yang mudah menghasilkan uang. Beberapa anak muda yang mengikuti jejak langkah Ayatrohaedi antara lain keponakannya (putri Ajip Rosidi), dan putranya sendiri. Teman karibnya, H. Usep Romli, menyebut Mang Ayat sebagai orang yang cukup paripurna. Selain menghasilkan karya tulis sendiri (karya sastra, artikel populer, dan karya ilmiah), juga menghasilkan karya-karya terjemahan dari sastra dunia. Antara lain *Puisi-puisi Negro* karya para penyair kulit hitam Amerika dan Afrika, *Nyanyian Ombak* karya Yukio Mishima. Ia pun menulis beberapa judul buku cerita anak-anak berdasarkan kisah sejarah, seperti *Panji Segala Raja* yang berlatar belakang kerajaan Purnawarman.. Seperti layaknya, seorang ilmuwan, Kang Ayat aktif berseminar, menyajikan makalah, membahas, dan menjadi nara sumber. Ia juga menjadi juri lomba karya ilmiah, penilai proposal untuk program riset kompetitif yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi khususnya bidang Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Sebagai seorang muslim, Mang Ayat sangat taat menjalankan kewajiban agamanya, sekalipun dalam keadaan sulit dan sempit.

Prof. Dr. Ayatrohaedi meninggal dunia pada hari Sabtu, 18 Februari 2006, pukul 11.30 di Sukabumi dalam usia 67 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka, Kompleks Perumahan Dosen Universitas Indonesia, Depok dan dimakamkan hari Minggu 19 Februari. Kiranya Allah SWT menerima amal salehnya, mengampuni dosanya, dan menempatkan arwahnya di tempat yang diridhai-Nya.

M. Hisyam

## Hasan Muarif Ambary

(13 Mei 1939 - 18 Mei 2006)

**H**asan Muarif Ambary, menyelesaikan sarjananya di Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi, Universitas Indonesia pada 1967. Gelar Master dalam bidang yang sama diperolehnya dari Ecole des Hautes Etude en Science Sociales (EHESS) Paris tahun 1983. Sementara Ph.D-nya juga di Universitas yang sama, diperoleh tahun 1994 dengan judul disertasi: "*L'Art Funeraire Musulman en Indonesie des Origines au XIX eme Siecle; Etude Epigraphique et Typologique*"

Jabatan yang pernah diembannya adalah Kepala Pusat Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud sampai tahun 1999. Juga sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Sebagai seorang ahli arkeologi Islam di Indonesia, ia telah menulis sejumlah karya besar antaranya: "Rapport Preliminaire sur les Manuscriptes Ancienne et les vestiges Epigraphiques de Ternate et Tidore," *Archipel*, 1982; "Recent Archaeological Discoveries at Sriwijaya Sites", dalam *Study on Sriwijaya*, Jakarta: Puslit Arkenas, 1980; "Some Notes on the Discovery of the Archaeological Evidence at Ternate", *Aspects in Indonesian Archaeology*, No. 10, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1980; A Preliminary Report of the Excavation on the Urban Sites in Banten (West Java), *Buletin of the Research Centre for Archaeology of Indonesia*, No.11, Jakarta: P4N, 1977; dan *Catalogue of Sites, Monuments and Artifacts of Banten*; Jakarta: Depdikbud, 1988, yang ditulis bersama dengan Halwany Michrob dan John N. Miksic; *Menemukan Peradaban Arkeologi dan Islam di Indonesia*; Jakarta: Puslit Arkenas, 1988.

Beliau selama ini memang menderita sakit gula. Tetapi sebelum meninggal, pihak keluarga tidak merasakan firasat apapun, bahkan sore harinya masih sempat bercanda dengan ibu Hasan. Pada waktu makan malam, Pak Hasan karena merasakan enak, "mengatakan terima kasih ibu Hasan, terima kasih ibu Hasan", ibu Hasan menganggap itu sebagai guyonan saja dan tidak memperhatikan. Waktu menjelang tidurpun, Pak Hasan, "bilang kangen dengan ibu dan sudah capek", rupanya itu adalah kata-kata terakhir dari Pak Hasan. Pada waktu bangun pagi Bu Hasan berusaha membangunnya, tetapi Pak Hasan rupanya telah meninggal dan segera menghubungi pak Machi Suhadi sebagai tetangga dekatnya. Menurut dokter Pak Hasan meninggal sekitar pukul 04.00 pagi, dalam usia 64 tahun. Atas permintaan pak Hasan pada waktu masih hidup, beliau di makamkan Majalengka, Jawa Barat. Selamat jalan Pak Hasan...

Nina Herlina Lubis

## Edi S. Ekadjati

(25 Maret 1945 - 1 Juni 2006)

**D**ilahirkan di Kuningan tanggal 25 Maret 1945. Setelah tamat Sekolah Rakyat (1958), ia melanjutkan ke sekolah Pendidikan Guru Agama Persatuan Umat Islam (PGA-PUI) di Kuningan, tetapi mengikuti ujian persamaan SMP Negeri bagian B dan lulus (1961), kemudian melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Kuningan. Pada tahun 1964, ia melanjutkan pendidikan pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran dan lulus tujuh tahun kemudian. Pada tahun 1973 mengikuti Program Filologi untuk Sejarah di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda (1974-1975) sambil melakukan penelitian atas naskah-naskah Sunda lama. Lulus dari Program Doktor Filologi Universitas Indonesia pada tahun 1979.

Di samping mengikuti kuliah, ia bekerja sebagai guru di SMP Triyasa Ujungberung (1967-1970). Diangkat menjadi Dosen Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran (1969-); memegang berbagai jabatan: Sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran (1973-1974), Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran (1980-1982), Sekretaris Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran (1977-1982), Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (1990-1992), Dosen Teori Filologi dan Teori Sejarah pada Program Studi Sastra Pascasarjana Universitas Padjadjaran (1990-2006). Sejak tahun 1995 menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra dan Gurubesar Madya Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran. Ia pun pernah bekerja sebagai redaktur mingguan berbahasa *Sunda Kudjang* (1970-1974), redaktur majalah *Bunga Rampai Ilmu Sastra* (1982-1984); Pemimpin Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi), 1984-1987; Dosen Sejarah Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katholik Parahiyangan (1988-1992). Sejak tahun 1980 ia menjabat sebagai Kepala Museum Konperensi Asia Afrika, Departemen Luar Negeri.

Beberapa artikelnya tentang sejarah, sastra, dan kebudayaan dimuat dalam mingguan *Kudjang* dan *Galura*, harian *Pikiran Rakyat*, dan majalah *Bunga Rampai Ilmu Sastra*. Hasil karya tulisnya yang telah terbit ialah *Fatahillah Pahlawan Arif Bijaksana* (1974), *Penyebaran Agama Islam di Pulau Sumatra* (1974) sebagai bacaan umum; *Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat* (1975), *Wawacan Sajarah Galuh* (1981), *Masyarakat Sunda dan*

**KEPUTUSAN FORMATUR/KETUA UMUM MSI PUSAT  
PERIODE 2006-2011**

**NOMOR : Kept./OT.11.1/2006**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS HARIAN MSI PUSAT**

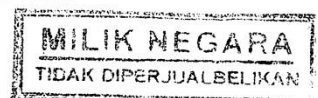
- I. Dewan Penasehat**
- : Taufik Abdullah  
Azyumardi Azra  
A.B. Lopian  
R.Z. Leirissa  
Djoko Suryo  
Edi Sedyawati  
Anhar Gonggong  
Hamid Hasan  
Djulianti Suroyo
- II. A. Pengurus Harian:**
- Ketua Umum** : Mukhlis PaEni (Budpar)  
**Ketua I** : Susanto Zuhdi (UI)  
**Ketua II** : M. Dien Madjid (UIN)
- Sekretaris Umum** : Magdalia Alfian (Budpar)  
**Sekretaris I** : M. Hisyam (LIPI)  
**Sekretaris II** : Restu Gunawan (Budpar)
- Bendahara Umum** : Yuke Ardiyati L (UI)  
**Bendahara I** : Agus Santoso (ANRI)  
**Bendahara II** : M. Sanggupri Buchari (Budpar)
- B. KOMISI-KOMISI**
- 1. Organisasi** : Ibnu Qoyim (LIPI)  
Shalfiyanti (Budpar)
- 2. Pertemuan Ilmiah** : Erwiza Erman (LIPI)  
Abdul Syukur (UNJ)
- 3. Publikasi** : M. Iskandar (UI)  
Amurwani (Budpar)
- 4. Kerjasama** : Asvi Warman Adam (LIPI)  
Usep Abdul Matin (UTN)
- 5. Dana** : Tri Wahyuning M. Irsyam (UI)  
Puspa Dewi (Budpar)  
Sri Indra Gayatri (Budpar)

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Nopember 2006

**PENGURUS PUSAT  
MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA (MSI)**

Periode 2006-2011  
Formateur/Ketua Umum,

**MUKHLIS PAENI**



*Kebudayaan*nya (Editor, 1984), *Kebudayaan Sunda* (1991), *Cerita Dipati Ukur: Karya Sastra Sejarah Sunda* (Pustaka Jaya, 1982), dan *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Pustaka Jaya, 1995). Publikasi karya bersama: *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat* (1982), *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat* (1983), *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat* (1987) *Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat* (1993) dan terakhir menulis buku *Sejarah Kebudayaan Sunda Jilid 1 dan 2*, dan tentang Kosmologi Sunda (2006).

Setelah dirawat di rumah sakit Al-Islam selama sebulan karena *stroke* (beberapa tahun sebelumnya pernah dioperasi jantung di Australia), pada tanggal 1 Juni 2006, Prof Dr Edi S. Ekadjati meninggal dunia dan dimakamkan di kampung kelahirannya yaitu di Kuningan Jawa Barat.

Nina Herlina Lubis

# *Jurnal* **Sejarah**

JURNAL SEJARAH merupakan kelanjutan sejarah yang diterbitkan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia. Jurnal ini merupakan media untuk saling tukar pandang dan informasi di kalangan cendekiawan, sarjana, dan peminat sejarah, sebagai upaya mengembangkan dan meningkatkan ilmiah di bidang sejarah



ISSN 1858-2117



9 771858 211719